Pagar Hasibuan & Ahmad Suhaimi

Tragedi Pilpres Mengoyak Ulama di Indonesia

Dari Gerakan Politik ke Paham Keagamaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Prof. DR. Pagar, M.Ag.
Drs. Ahmad Suhaimi, MA.

TRAGEDI PILPRES
MENGOYAK ULAMA DI INDONESIA
Dari Gerakan Politik ke Paham Keagamaan

Diterbitkan Oleh:
CV. MANHAJI Medan
2 0 1 9

KATA PENGANTAR

Pilpres 2019 bukan hanya mengoyak ulama semata di Indonesia, tapi mencabik dan memicu perseteruan di antara mereka. Kesepakatan ijtimak ulama 212 mengangkat Prabowo Sandi menjadi capres cawapres seolah telah mengklaim bahwa inilah calon pemimpin pilihan ulama dan umat Islam Indonesia di satu sisi, sekaligus Prabowo Sandi semakin percaya diri dengan pencalonan mereka bahwa merekalah yang didukung oleh fatwa Ulama sehubungan merekalah idola sekaligus manifestasi dari suara ummat sesuai mekanisme syariat Islam. Sebaliknya, Cawapres KH. Ma`ruf Amin yang menjabat secara resmi sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada sisi yang lain setelah resmi menjadi cawapres Jokowi, menyindir lawan politiknya, dengan mengatakan bahwa tidak menghargai ulama, Ijtimak Ulama 212 telah mengeluarkan fatwa yang merekomendasikan Ustad Salim Segaf Al-Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS) atau Ustad kondang Abdul Somad Batubara dari Riau sebagai cawapres Prabowo Subianto, tapi tidak digubris sama sekali sehingga ulama GNPF menyodorkan lagi nama ustad Arifin Ilham, namun tetap tidak dihiraukan sampai akhirnya nama Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi ditetapkan sebagai cawapres. Ijtima' Ulama 212 itu bukanlah manifestasi dari semua Ulama di Indonesia, ini hanya akal-akalan politik mereka saja untuk memanfaatkan Islam sebagai agama dalam legitimasi kandidat untuk

mendulang suara sebanyak-banyaknya dari umat Islam. Lebih dari itu, kedua sisi yang saling berseberangan mengemukakan pendapat sebebas-bebasnya, bahkan saling serang antara satu sama lain yang berdampak pada retaknya ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Penggunaan IT semacam media sosial juga turut membuat masifnya penyebaran informasi ini sampai masuk pada setiap sendi kehidupan umat Islam. Tidak heran kalau ulama telah terperangkap dalam perseteruan, dan umat terkotak-kotak sesuai loyalitas paksi Islam yang mereka ikuti.

Ternyata pilpres 2019 adalah gerakan politik yang memiliki nilai destruktif yang cukup dahsyat untuk mengoyak, bahkan mencabik ulama dan umat Islam di Indonesia. Bukan hanya terlihat pada terbelahnya ulama dan umat Islam pada dua kubu yang saling berhadap-hadapan, bahkan ulama, umat, dan simpasisan internal satu corak paham keagamaan pun ikut menjadi terbelah, misalnya; komunitas yang terhimpun pada NU, Muhammadiyah, Alwasliyah, DDII, dan MUI sendiri ikut terpropokasi menjadi berhadap-hadapan dan saling menyerang antara satu sama lain. Pengalaman pilpres 2019 kali ini benar-benar istimewa dalam pelibatan ulama sebagai motor pengerak politiknya yang berbeda dengan pilpres lainnya di Indonesia sepanjang sejarah.

Buku ini menjadi istimewa karena ditulis berdasarkan hasil penelitian. Di samping mengacu kepada literatur, buku ini banyak mengangkat datanya dari realitas yang ditemukan di lapangan, mulai dari wawancara, informasi liputan media, dan hasil observasi langsung sebagai sesuatu yang dilihat, didengar, dan dialami bahkan dirasakan langsung oleh peneliti. Semua ini dianalisis dan dijadikan sebagai data dalam rangkaian memperkokoh penelitian ini. Dengan merubah format penyajiannya akhirnya penelitian tersebut disajikan dalam sebuah buku ilmiah populer yang cukup bernilai dan aktual.

Penulis sadar bahwa buku ini masih banyak menyimpan kelemahan dan keterbatasan. Mulai dari pemilihan dan penyajian datanya, pengorganisasiannya, keterbatasan data dan isu yang terserap pada buku ini, serta contoh-contoh faksi dan pertikaian mereka, sampai

kepada redaksi kalimat yang dipergunakan, counter dan serangan baliknya, dan lain sebagainya. Semua ini jelas merupakan keterbatasan penuis untuk membuat yang terbaik. Pada semua keterbatasan ini, penulis mengucapkan maaf, semoga di lain kesempatan dapat menyajikan yang lebih baik lagi. Sekaligus, kepada semua pihak masih terbuka kemungkinan untuk memberikan masukan dan kritik membangun dalam rangka keutuhan buku ini tersajikan dalam sebuah realitas yang sesungguhnya.

Sungguh luar biasa dukungan dari berbagai pihak sehingga buku ini bisa terselesaikan. Mulai dari instansi Kementerian Agama dan jajarannya sampai kepada LP2M dan dosen di lingkungan UIN-SU Medan, sampai kepada dukungan instansi lain terkait, terutama daerah tempat sampel pengumpulan data dilakukan, responden, pejabat dan umat Islam, percetakan dan penerbitan, serta semua pihak yang tidak bisa diperinci satu persatu. Semua ini adalah personalitas yang sangat berjasa dalam penulisan buku ini. Karenanya, kepada semua mereka ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis tidak bisa membalas budi baik mereka, terima kasih suci yang tiada tara disampaikan kepada mereka, semoga Tuhan memberi balasan yang berlipat ganda kepada mereka, amin.

Meskipun dari segi format sajiannya buku ini terbilang masih sangat sederhana, namun tertumpu harapan besar lewat rahmat, hidayah, dan InayahNya. Semoga buku ini dapat menjadi pelajaran, dan i`tibar untuk menentukan sikap terbaik di masa mendatang dalam rangka membangun bangsa dan agama secara beriringan, dan bermanfaat adanya bagi semua pihak, termasuk politisi dan ulama dalam menentukan sikap terbaiknya di masa-masa mendatang.

Medan, 1 Januari 2020
Penulis,

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

BAB I

PETA POLITIK
PAHAM KEAGAMAAN INDONESIA

A. Paham Keagamaan

Dahsyatnya pertarungan pilpres 2019 sesungguhnya hanya puncak gunung es dari pergulatan bathin (idelogi) keagamaan umat beragama yang ada di Indonesia selama ini. Terkoyaknya ulama dalam pilpres 2019 merupakan sesuatu yang tampak di permukaan, lebih jauh dari itu, sebenarnya telah diawali dari sesuatu penyebab yang tidak tampak ke permukaan sama sekali, tetapi mengendap dalam alam pikir dan keyakinan, serta suasana bathin dari berbagai golongan Islam Indonesia, yakni adanya corak paham keagamaan yang berbeda. Sengitnya perseteruan tersebut adalah klimaks dari pengejawantahan keyakinan spiritual yang mengendap, terselubung, dan tersimpan rapi selama ini dalam grand memeri spiritual ulama dan banagsa Indonesia.[1]

Proses penyerapan referensi keislaman yang beragam dan bervariasi telah memunculkan perbedaan paham keagamaan pada internal ummat Islam itu sendiri. Perbedaan ini lebih mudah dikenali dengan pelebelan Islam modernis dan Islam tradisionalis. Belakangan kita juga dapat mengenalnya pada istilah turunannya yang berbeda, seperti; konservatif, fundamentalis, radikal, dan moderat. Namun demikian, secara umum perbedaan itu terakumulasi pada dua kelompok besar Islam modernis dan Islam tradisionalis, dan mereka ini tersebar pada beberapa ormas Islam sesuai dengan dengan corak paham keagamaannya masing-masing, seperti; NU, Muhammadiyah,

[1] Said Muhammad, *Sejarah, Ideologi Islam dan Kuasa,* dalam Islam Kepulauan, id., 16 Mei, 2019.

Nahdlatul Wathan (NW), PERTI, Jam'iyah Al-Wasliyah, Wahdah Islamiyah, DDII, MTA, dan ormas-ormas Islam transnasional lainnya.

Corak keagamaan tersebut dapat diidentifikasi dari karakteristiknya yang kelihatan. Misalnya Islam tradisionalis, berawal dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Pulau Jawa yang ditandai dengan pergerakannya yang *adaptatif*, lalu dia melayani kebudayaan orang Jawa yang dipenuhi kosmos simbol-simbol adat dan budaya. Sebagi dampak akulturasinya, menjadi kelihatan bahwa Islam di Jawa kental dan diwarnai dengan tradisi, simbol-simbol dan ritual keagamaan. Realitas ini dapat dipahami sebagai proses Islamisasi yang elastis dalam upaya pembentukan model Islam dan keberagamaan di Jawa. Dengan demikian, psikologi religiusitas muslim Jawa adalah berupa perpaduan simbol-simbol dan ritual dalam balutan nilai luhur Jawa dengan substansi nilai-nilai Islam itu sendiri.

Berbeda halnya dengan Islam modernis yang datang belakang. Sewaktu Islam telah tumbuh dan berkembang pada beberapa wilayah Nusantara, terjadilah interaksi muslim Nusantara dengan Dunia Islam lainnya, terutama Timur Tengah (Mesir dan Saudi Arabia). Banyak umat Islam dari Nusantara berangkat ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama, yang belakangan memberi pengaruh pada gerakan Islam di Indonesia. Pengaruh itu lebih kental terlihat pada upaya pemurnian praktek keagamaan dari unsur khurafat, takhayul dan bid'ah. Mereka ini bergerak dalam wadah organisasi keagamaan, seperti; Hizbut Tahrir (HT), Salafi dan Jama'ah Tabligh. Gerakan ini lebih dapat diidentifikasi pada aktifitasnya yang melampaui sekat-sekat teritorial negara-bangsa (nation-state).

Kemunculan gerakan Islam tersebut memiliki visi dan misi perjuangan berbeda mulai dari yang konsen dengan aktivitas dakwah sampai kepada obsesinya dalam perjuangan politik. Di antarnya, berawal dari latar belakang penderitaan umat Islam di berbagai penjuru dunia oleh penetrasi kolonialisme Barat atas negara-negara berpenduduk muslim di berbagai belahan dunia. Pan Islamisme dan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbut Tahrir di Libanon, Jama'ah

Tabligh di India. Di sisi lain, gerakan Islam lainnya terinspirasi oleh semangat dan perlawanan kaum lemah terhadap kekuatan kaum penindas Barat yang telah menancapkan kaki imperialisme di negeri mereka. Perjuangan HT melawan kaum imperialis memang tidak memakai kekerasan dalam mencapai cita-citanya, apalagi terhadap sesama Muslim, namun mereka tidak sungkan-sungkan mengkritik dan menyalahkan kalangan Muslim yang mengadopsi pandangan dan praktik kehidupan yang dianggap bukan berasal dari Islam. Apa yang dipandang HT sebagai sesuatu yang bukan Islam hampir semuanya berasosiasi dengan budaya Barat. Dengan getol merka mengeritik berbagai hal, seperti demokrasi, kapitalisme, nasionalisme, negara dan bangsa (*nation and state*), dan hak asasi manusia. Tidak sekadar mengeritik, lebih dari itu, HT cenderung menempatkan budaya Barat itu sebagai sesuatu yang paradoksal dengan Islam, dia adalah antitesis Islam, dan dia berkeyakinan bahwa keterpurukan umat Islam di berbagai belahan dunia disebabkan oleh dominasi Barat. Tidak heran kalau ada orang yang mengatakan baahwa kehadiran HT adalah sebagai wujud dari perlawanan pemikiran (*ghazw al fikr*) dunia Islam atas Barat dan juga sebagai benturan peradaban, sebagai telah dipopulerkan oleh Samuel Huntington dalam tulisannya *the clash of civilizations* di awal 1990-an.[2]

B. Gerakan Keagamaan Transnasional

Meskipun jumlah paham keagamaan Transnasional yang ada di Indonesia ini sesungguhnya cukup banyak jumlahnya, tetapi pada kesempatan ini hanya disajikan 2 (dua) kelompok saja, sesuai norak dan mencolok pada ciri khas dan paham keberagamaannya, yaitu; HTI dan Salafi.

[2] Kementerian Agama RI., *Perkembangan Paham Keagamaan Trans Nasional di Indonesia*, Ahmad Syafi'i Mufid (Editor), (Jakarta: 2011, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., Cet. Ke-1), hlm. Xii.

1. HTI (Eks HTI)

a. Sejawah Awal dan Ide Perjuangan

Sejarah awal Hizbut Tahrir (HT) ditandai dengan berdirinya gerakan ini pada tahun 1953 M. oleh Taqiyuddin An-Nabhani (1909-1977) di Jerusalem Timur. Berdirinya HT ini erat kaitannya dengan keprihatinan atas tumbangnya sistem khilafah dalam pemerintahan dari dunia Islam oleh kolonialisme Barat dalam persepsi Taqiyuddin An-Nabhani. Sejalan dengan hal itu maka aspek yang menjadi perhatian utamanya adalah menghidupkan kembali sistem khilafah dalam pemerintahan Islam, menentang tegas imprelisme Barat terhadap dunia Islam, bahkan ingin membebaskan umat Islam dari pengaruh Barat, mulai dari aspek fikriyah, budaya, sistem politik dan ekonomi, serta yang lainnya yang sudah menjadi tradisi selama ini. Dia juga ingin mempersatukan umat Islam yang dipandang telah porakporanda, tercabik-cabik kepada beberapa faksi dan negara akibat ulah penjajahan Barat tersebut. Reaksi apriori gerakan ini terhadap Barat terlihat sangat jelas dan kuat pada banyak dimensi, terutama politik.

Sistem demokrsi yang berasal dari Barat jelas menjadi sasaran kritik tajam HT. An-Nabhani melihat bahwa "demokrasi" adalah sebagai sistem kenegaraan kufur, secara diametris hal ini bertentangan dengan Islam. HT melihat, Islam mengetahui bahwa hanya Tuhan sebagai pihak pembuat hukum, bukan manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Sejalan dengan hal tersebut, HT menyatakan haram hukumnya bagi umat Islam untuk menjadikan demokrasi sebagai dasar negara, dan juga haram mensosialisasikannya. Bagi HT, politik adalah sebagai sarana untuk bisa menjamin urusan masyarakat dan Islam senantiasa sesuai dengan aturan dan solusi Islam. Tujuan HT tiada lain kecuali untuk menjamin terselenggaranya kehidupan umat Islam yang solid dan religius, serta terselengaranya dakwah

Islam yang merata ke seluruh penjuru dunia. Intinya HT ingin mempersatukan umat Islam, meraih kembali kejayaan umat Islam dalam sebuah Darul Islam yang menjadikan syari`at sebagai dasar (pandangan hidup) dalam pemerintahannya.

Memperhatikan keinginan HT ini, tampaknya erat kaitannya dengan mengangkat substansi model khilafah Turki Usmani yang pernah jaya di abad pertengahan. Kekhalifahan Turki Usmani telah resmi dihapus pada tahun 1924, namun dari aspek historis dia telah pernah jaya sebagai pemerintahan Islam yang bersifat global, sekaligus penguasa tunggal terbesar dunia saat itu, sistem khilafah yang diembannya menjadikannya sebagai kekuasaan Islam tanpa batas daerah teritorial yang dapat diekspansinya. Hal ini akan memungkinkan Islam untuk mengembangkan dakwahnya ke seluruh dunia dan membuka peluang untuk bisa meraih kembali kejayaannya di masa silam.

Dari aspek hukum, An-Nabhani memandang bahwa mendirikan negara Islam dalam bentuk khilafah adalah kewajiban agama. Seluruh umat Islam berkewajiban untuk menjamin tergaknya khilafah Islamiah, tanpa kecuali pada setiap pribadi umat Islam akan berdosa jika khilafah Islamiyah tidak ditegakkan, maka tidak heran kalau umat Islam sekarang ini semuanya dipandang dalam keadaan berdosa karena belum menegakkan khilafah Islamiyah tersebut. Mendirikan khilafah sebagai bentuk negara menurut HT adalah karena menjalankan amanat al-Qur’an, al- Hadits dan juga sesuai dengan Ijmak ulama. Dengan demikian tidak ada tawar menawar dalam menjadikan khilafah sebagai sistem pemerintahan dalam Islam.

Memperhatikan akan hal tersebut, terlihat HT ini radikal dalam pesan ide politiknya, namun mereka menjalankannya lewat cara yang lebih lunak dan damai untuk mencapai tujuannya. Radikalnya, terlihat pada perjuangan mereka untuk merubah sistem politik yang ada sekarang ini menjadi lebih

fundamentalis, mereka ingin membongkar total sistem negara-negara yang ada sekarang ini dan menggantinya menjadi sistem khilafah. Dalam perjuangannya terlihat lebih lunak, mereka memiliki strategi bertahap (*tadarruj*) dalam bertindak. Paling tidak hal ini dapat dirumuskan pada tiga tingkatan, yaitu; Pertama, Tahap *Tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), pada fase ini diharapkan akan lahir orang-orang yang mampu meyakini fikrah (ajaran) HT sebagai sebuah gerakan, Kedua, Tahap *Tafa'ul* (interaksi), yaitu mampu melaksanakan dakwah Islamiyah sewaktu berintegrasi dengan komunitas lainnya, baik berupa dakwah *bil hal* demikian juga dakah *bi al-litsan*, Ketiga, Tahap *Istilamul Hukmi* (pengambil-alihan kekuasaan). Fase ini sebagai puncak perjuangan, di mana umat Islam hijrah dari tradisi lama kepada penerapkan ajaran Islam dalam praktek kehidupan mereka secara total. Dengan demikian tercapailah obsesinya.

b. Kehadirannya di Indonesia

Sebenarnya, benih HT ini telah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an, namun tependam sebagai poteni yang menunggu turunnya hujan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Secara politis, sifat tegas dan refresifnya Orde Baru membuat HT tidak berdaya dan tidak memiliki peluang untuk tumbuh. Perkembangan selanjutnya, pada 21 Mei 1998 saat Suharto telah tumbang, rezim otoritarianisme telah berakhir, situasi menjadi berubah, keran demokrasi telah dibuka lebar sekaligus menandakan keterbukaan dan keleluasaan bagi faksi-faksi yang selama ini terkekang menjadi leluasa untuk bersuara dan berekspressi mengalir deras menyampaikan aspirasinya di depan publik. Era reformasi memang telah berjasa membuka saluran yang tersumbat selama ini, sekaligus telah mengalirkan segalanya dengan tanpa filter yang jelas untuk dipilih dan dipilah sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi.

Kehadiran HTI di Indonesia terkait erat dengan kiprah dua orang tokoh Islam, yaitu; Abdurrahman Al-Baghdadi dan KH. Abdullah Nuh di tahun 1980-an. Abdurrahman Al-Baghdadi adalah seorang tokoh HT berkebangsaan Arab Libanon, belakangan menjadi warga Negara Australia, dan datang ke Indonesia, serta menjadi dosen di Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LIPIA) Jakarta, dari sinilah dia menyamai HT untuk pertama kalinya. Penyamaian HT oleh Abdurrahman al-Baghdadi ini menjadi potensial dan tumbuh subur karena dibantu oleh KH Abdullah Nuh (seorang tokoh agama dan pendiri pesantren Al-Ghazali Bogor), terutama di kampus-kampus daerah awal pengembangannya, sementara Abdurrahman Al-Baghdadi mengembara ke berbagai daerah di Indonesia terutama kampus dan pesantren).

Dari Jakarta inilah HT berkembang ke seluruh Indonesia. Ekspansi pertamanya ke Bogor, dimulai dari pesantren Ulil-Al-Bab Bogor, lalu masuk ke kampus IPB, terutama lewat masjid Al-Ghifari, dan halaqah (pengajian) pun mulai dibentuk di tempat ini (kampus dan luar kampus), kemudian meluas ke Bandung, terutama lewat masjid Salman kampus ITB, akhirnya menyebar ke kota-kota besar lainya di Indonesia, seperti; kota Depok, HT masuk tahun 1994, kota Semarang, HT masuk tahun 1990-an lewat kampus UNDIP (Univeritas Diponegoro), dan yang lainnya.

Perkembangan awal, HT ini masih berjalan lambat. Lima tahun awal HT ini hanya bisa merekrut anggotanya sebanyak 17 orang saja, di antaranya adalah Ismail Yusanto (dalam perkembangan terakhir sebelum dibubarkan dia telah menjadi orang peting dan menjabat sebagai juru bicara HTI).

Dalam perkembangan selanjutnya HT ini telah menunjukkan eksistensi dan pengaruhnya yang lebih besar. HTI telah berkembang secara signifikan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2002, dia atelah menyelenggarakan Konfrensi

Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta yang dihadiri oleh sekitar 5.000 orang. Kegiatan monumental ini sekaligus menandai telah lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia yang secara langsung langsung dideklarasikan sebagai partai politik berideologi Islam, namun mereka engan untuk bergabung dengan sistem politik yang ada di Indonesia ini. Keengganan ini adalah terutama pada sistem politik Indonesia sebagai bangsa (natioan) yang terbatas pada daerah teritorial Nusantara, sementara eksistensi HT pada daerah yang tidak terbatas sama sekali, karena bersifat internasional, demikian juga pada bentuk NKRI yang berbentuk presidential yang berdasar kepada pancasila, berbeda dengan akidah mereka yang ngin mendirikan negara Islam yang menerapkan hukum dan perundangan Islam dalam bentuk khilafah, dan kepala negaranya adalah seorang khalifah. dipimpin oleh seorang Khalifah. Pada saat ini terlihat perkembangan HT ini telah menjadi lebih pesat.

Perkembangan HT ini menjadi lebih melejit lagi sewaktu mereka telah melakukan ekspansi secara terbuka dalam bentuk kegiatan dan memanfaatkan media. Di samping kegiatan dakwah lewat pengajian dan ceramah, HT ini mulai tampil dalam forum diskusi dan seminar. Gerakan yang lebih masif lagi terjadi sewaktu mereka mulai melakukan penerbitan buku dan buletin Jumat Al-Islam, demikian juga majalah bulanan Al-Wa`ie di tahun 2000-an, bahkan dengan melakukan unjuk rasa damai berkeliling kota oleh para anggota dan simpatisannya. Meskipun semula HTI ini lebih banyak digandrungi oleh kawula muda, namun belakangan sudah menjadi lebih bervariasi, termasuk orang tua. Pada masa ini HTI sudah menjadi lebih besar.

Dalam pengelolaannya, organisasi ini lebih kaku dan terkendali. Pimpinan HTI di pusat (Jakarta) memegang peranan yang lebih besar, semua kebijak harus melalui

pimpinan pusat, sementara pimpinan daerah memiliki hak kordinasi untuk menjalankannya. Kegiatan yang belum diataur sebelumnya tidak dapat dilaksanakan oleh daerah secara umum sebelum terlebih dahulu ada komando dari pusat.

Kekhasan HT ini dibanding dengan ormas lainnya terlihat pada bidang *tsaqafah* (kelimuan). Mereka sering dan tekun melakukan kajian-kajian, karena landasan pembentukan pribadi muslim dan umat Islam dalam pandangan HT ini adalah lewat keilmuan, maka pada setiap kelompok mereka ini tslah ditentukan pembinanya dan yang pembinanya ini pun ada lagi pembinanya, demikianlah seterusnya sampai ke tampuk pimpinan tertingginya. Secara berjenjang, pada setia tingkatannya mereka memiliki pembina.

Berbeda dengan yang lainnya, HT terlihat lebih jelas menampakkan identitas politik dan wawasan transnasionalnya. Mulai dari misi khilafah yang diusngnya dengan mengambil simbol Islam era sahabat dan beberapa dekade berikutnya sebagai sistem kenegaraan yang bersifat global, sampai kepada penempatan ideologi Islam yang sempurna dalam model khilafah yang diinginkan. Mereka menolak dengan tegas ideologi kapitalisme, sekularisme dan komunisme, bahkan pluralisme, dan nasionalisme. Jelas paham ini ingin menghilangkan nasionalisme dan pluralisme bangsa Indonesia yang selama ini terajut baik dan berintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan yang ada.

2. Salafi

Penamaan salafi dimaksudkan kepada setiap orang yang berpedoman kepada *manhaj* Salaf, baik menurut aqidah, syariat, akhlak, demikian juga dakwah (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2009 : 22). Kata salaf berasal dari bahasa Arab "*salafa-yaslufu-salafan*" yang berarti kaum terdahulu, karenanya penamaan Salafi ini adalah penye butan bagi orang yang mengikuti paham

keagamaan orang yang terdahulu. Salaf dalam pengertian istilah adalah sifat bagi kelompok orang yang mengikuti tradisi dan simbol-simbol keagamaan para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Dengan demikian, penyebutan ulama Salaf adalah pada ulama yang mengidentikkan ulama corak paham keagamaannya pada tradisi dan simbol-simbol keagamaan yang telah dipraktekkan oleh sahabat sampai kepada tabiin.

Corak paham keagamaan Salafi ini bersifat global. Hal ini dapat dilihat, mulai dari Timur Tengah, Yordan, Yaman dan Quwait, sampai ke Indonesia. Semua mereka berpedoman kepada teks Al-Qur'an dan AS-Sunnah, dengan berpedoman kepada manhaj *salaf al-shalih*. Untuk masalah khilafiyah, mereka menstikmanya dengan bid'ah, dan hal itu dikategorikan sesat. Tidak heran kalau mereka ini konsern dan sungguh-sungguh untuk memberantas kebid'ahan tersebut, seperti: Perayaan Maulid Nabi, Perayaan Isra'Mi'raj, Qunutan, Tahlilan 3, 7, 14 hari, maupun 40 hari, mengaji (membaca Alqur`an di depan mayat, di kuburan, melakukan ziarah kubur, membaca surat yaasin (yaasinan) pada malam jum'at dan evan tertentu. Mereka membid`ahkan hal ini, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Kelompok ini sangat ketat mengikuti Sunnah Nabi. Hal yang sering dicontohkan adalah; Memelihara dan memanjangkan jenggot, dan memakai celana panjang/kain panjang di atas mata kaki (celana jingkrang).

Perkembangan awal Salafi di Indonesia adalah pada tahun 1980-an. Imdadun Rachmat mengatakan bahwa persentuhan awal aktivis pro salafi Indonesia dengan pemikiran salafi terjadi pada sat pembukaan Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA) di Jakarta sekitar tahun 80-an. Kemudian lembaga ini berganti nama menjadi LIPIA, lewat lembaga inilah mereka mengenal dan memahami pemikiran ulama salaf. LIPIA Jakarta ini sebenarnya merupakan cabang dari Universitas Muhamad Ibnu Su`ud (King Sa`ud University) yang ada di Riyadh. Tujuan mereka untuk hadir ke Indonesia sebenarnya adalah dalam rangka ekspansi

penyebaran paham Wahabi dengan wajah salafi ke seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia. LIPIA Jakarta ini telah menghasilkan ribuan alumni, pada umumnya alumni ini berorientasi wahabi salafi dengan berbagai variasinya. Sekarang banyak dari merka ini yang menjadi aktivis PKS, da'i salafi, dan aktivis HTI (sekarang eks HTI).

Kelangsungan LIPIA di Jakarta menjadi sesuatu yang teramat penting dalam pandangan Pemerintahan Saudi. Di samping status LIPIA di tempatkan langsung di bawah Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Sa'ud, Riyadh, juga dipimpin secara langsung oleh direktur berkebangsaan Saudi, dan bertanggung jawab langsung kepada Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta (Direktur pertamanya adalah 'Abd al-'Aziz 'Abd Allah al-'Amir, seorang mahasiswa Bin Baz). Pejabat tinggi Saudi senantiasa berkunjung ke sana, seperti: Sejumlah Pangeran, mulai dari Pangeran; Sultan Ibnu Abdul Aziz, Sa'ud Al-Faysal, Sultan Ibn Salman Ibnu Abdul Aziz, Turki AlFaysal, sampai kepada Khaliq bin Muhamad Al-Anqari, 'Abdul Al-Muhsin Al-Turki, Usama Faysal, 'Abdullah Al-Hijji, 'Abdullah Ibnu Shalih Al-'Ubaiyd, dan Ibrahim Al-Akbar. Dengan dukungan Saudi secara penuh ini, LIPIA berhasil mengembangkan pengaruhnya di seluruh Indonesia (Nurhaidi Hasan, 2008 : 60).

Di antara pengembangan dakwah Salafi ini di Indonesia dilakukan dengan cara; Pertama, Mencetak kitab-kitab mereka (berpaham Wahabi). LIPIA mencetak Alqur'an dan dibagikan kepada lembaga pendidikan dan ormas Islam secara gratis, juga mencetak kitab-kitab Wahabi, di antaranya; 1). Al-Ubudiyah, Al-'Aqidat Al-Wasyatiyah, oleh Ibnu Taymiyyah., 2). Aqiqat Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah, oleh Muhammad Ibnu Shalih Al-'Uthaymin., 3). Butlan 'Aqaid al-Syiah, oleh Abdul al-Sattar al-Tunsawi., 4). Al-Khuththal 'Arida li-al-Syiah al-Istna 'Asyariyah oleh Muhib al-Din al-Khatib, dan 5). Kitab al-Tauhid

oleh Muhamad ibn ’Abdu al-Wahhab. Kedua, Melalui kegiatan dakwah, seperti perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur’an, membuka halaqah (kelompok pengajian) dan dauroh-dauroh yang bekerjasama dengan ormas Islam.

LIPIA benar-benar dipergunakan untuk mencetak mahasiswa yang akan menjadi ujung tombak perjuangan mereka selanjutnya. LIPIA mulai dengan program beasiswa ke luar negeri, mereka merekrut dan mengirim mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Universitas Imam Muhammad ibn Sa’ud di Riyadh dan Universitas Islam Madinah di Madinah, yang berjumlah minimal 30 orang alumninya dibayai studinya di Arab Saudi Arabia setiap tahun. (Nurhaidi Hasan, 2008 : 62).

Tijauan yang paling awal memperlihatkan bahw Laskar Jihad merupakan bagian dari gerakan salafi di Indonesia[3]. Potensi salafi masuk dan berkembang di Indonesia sejak era konial Belanda. Salah satunya indikasi yang dinominasikan adalah Gerakan Paderi yang dipelopori oleh Tuanku Nan Tuo, yaitu orang Paderi dari Koto Tuo Ampek Anggek Candung (1784-1803). (Imam Tholhah, 2003 : 35).

Ide dan gerakan yang dilakukan Wahabi semuanya dalam koridor pemurnian akidah tauhid dari segala bentuk kemusyrikan dan kebid’ahan. Proses pemurnian akidah tauhid ini dilakukan dengan cara keras, misalnya menghancurkan bangunan kuburan yang dianggap keramat oleh kolompok umat Islam. Sikap mengeramatan makam para ulama Islam ini oleh kelompok Wahabi dianggap sebagai bid’ah dan bisa menjurus kepada syirikan. Karenanya, tempat-tempat tersebut harus dihancurkan. Pandangan kaku dan literal seperti ini dikembangkan oleh

[3] Istilah kata Salaf bukan sesuatu yang baru karena telah dipergunakan sejak msa Rasul Muhammad SAW. Saat ini, terminologi Salaf bukanlah menunjuk pada golongan tertentu, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah sesuai pemahaman yang benar. Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, (Bogor: 2009, Pustaka At-Taqwa), hlm. 22.

penganut Wahabi, kemudian diikuti dan diamini oleh gerakan Salafi secara umum. Hal ini terlihat jelas pada sikap tuduhan bid`ah dan penyesatannya dalam keyakinan tasawuf mereka (Zaki Mubarak, 2007 : 119)

Masuknya Salafi ke Indonesia melalui jalur pendidikan, yaitu melalui alumni Pendidikan Tinggi Timur Tengah, terutama mereka yang kuliah di Universitas Arab Saudi dan Kuwait. Dua negara ini merupakan basis utama gerakan pengembangan salafi di dunia Islam, terutama karena sumber dananya yang sangat memadai dari anugrah lautan minyak bumi kekayaan alam yang mereka miliki (Zaki Mubarak, 2007 : 119). Dalam hal ini termasuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), yaitu lembaga dakwah bentukan Muhamad Natsir (1908-1993) dan para mantan Masyumi lainnya tahun 1967). Sekembalinya para alumni LIPIA yang telah menuntaskan studinya di Arab Saudi ini, mereka mulai mengembangkan sayapnya di Indonesia, seperti; Abu Nida[4], Ahmad Faiz Asifuddin dan Aunur Rafiq Gufron

[4] Dia adalah alumni Timur Tengah, kelahirn tahun 1954 di Lamongan Jawa Timur, setelah menyelesaikan studinya dari PGA Muhamadiyah Karang Asem, dia mulai ikut kursus dakwah pada DDII yang ada di Pesantren Darul Falah Bogor, kehadiran Pesantren ini adalah bagian dari kegiatan yang diprogran untuk mengirimkan para da'i ke daerah-daerah transmigrasi, lalu dia dikirim ke pedalaman daerah Kalimantan Barat. Setelah merampungkan dakwhnya di sana, ia memperoleh rekomendasi dari Muhamad Natsir untuk belajar ke Arab Saudi. Sebelum belajar di Universitas Imam Muhammad Ibnu Sa'ud Arab Saudi, dia terlebih dahulu memantapkan bahasa Arab di LIPIA. Untuk tujuan pengembangan gerakan salafi ini, dia membuka halaqoh dan dauroh Salafi di di beberapa mesjid, seperti; 1). Mesjid Mardiyah dekat Fakultas Kedokteran UGM, 2). Masjid Mujahidin dekat IKIP Jogyakarta, 3). Masjid siswa Graha, Pogung, 4). Masjid STM Kentungan dan 5). sebuah rumah yang terletak di Jl. Kaliurang Yogyakarta. Dengan strategi inilah Abu Nida berhasil merekrut banyak mahasiswa, terutama UGM, IKIP dan UPN, dan mereka masuk dalam genggamn Salafi. Di sini dia memperkokoh dakwahnya dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia butuh pemahaman Islam yang sejati seperti dipraktekkan oleh Salaf al-Shaleh sehingga bangsa Indonesia bisa sampai kepada pemahaman yang benar., lihat, Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad, Islam, Militan, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru. (Jakarta: 2008, Pustaka LP3ES Indonesia dan KITLV-Jakarta), hlm.65.

sebagai kader DDII, Mereka masuk dan mengajar di beberapa pesantren, seperti; Al-Mu'min di Ngeruki, Wathaniyah Islamiyah di Kebarongan Banyumas dan Al-Furqon di Gresik. Semua pesantren ini dikenali dengan ciri khas pada kemoderenannya, penekankan kurikulumnya pada; 1). Pengajaran bahasa Arab, 2). Teologi Islam, dan 3). Hukum Islam. Mereka ini semua adalah wahabisme dalam payung gerakan dakwah salafi yang banyak berjasa merekrut putra putri Indonesia menjadi Wahabi.

Dengan dukungan dua sahabat dekatnya (Ahmad Faiz Asifuddin dan Rofiq Gufron), Abu Nida menjadi lebih sukses. Dia menggelar dauroh yang sifatnya bulanan di Pesantren Ibnu Qayyim Sleman Yogyakarta, yaitu sebuah Pesantren yang didirikan oleh DDII. Eksistensinyanya menjadi lebih kokoh lagi dalam berdakah, dengan kehadiran Ja'far Umar Thalib yang baru menyelesaikan studinya di Institut Islam Maududi, Lahore dan juga di Fakistan, juga bergabungnya Yazid bin Abdul Qadir Jawas sebagai seorang yang sudah menyelesaikan studinya di Universitas Imam Muhammad Ibnu Sa'ud Arab Saudi, ditambah dengan datangnya Yusuf Usman Baisa sebagai seorang yang baru menyelesaikan studinya di Pusat Kajian Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Shalih al-Uthaimin di Najran. Semua mereka ini semula adalah sesama alumni LIPIA keturunan Hadrami yang melanjutkan studi ke luar negeri, dan sekarang mereka telah pulang kembali untuk mengabdikan ilmunya di Indonesia.

Tokoh Wahabi lainnya, yang dipandang memiliki gerak langkah dan perjuangan yang relatif sama masih cukup banyak jumlahnya. Di antara mereka adalah; 1). Ustadz Yazid bin Abdul Qodir Jawas, 2). Ustadz Abdul Hakim, dan 3). Ustadz Badrusalam. Mereka ini adalah sesama muridnya Prof. DR. Syakh Abdurrazzaq yang mengajar di Universitas Jami'ah Al-Islamiyah Madinah, setelah mereka menamatkan studinya, lalu mereka pulang, dan bertekat untuk mengembangkan dakwahnya di kampung mereka masing-masing. Lewat mesjid dan kelompok

pengajian, mereka mengembangkan dakwah konten salafi yang mereka tekuni.

Sering juga pada pengajian itu terjadi komplain atas protes masyarakat yang tidak setuju dengan model dakwah mereka, namun mereka tetap sabar untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Sehubungan banyaknya intensitas pembahasan soal kegiatan masyarakat yang diklaim sebagai bid`ah, sementara masyarakat sudah terbiasa melakukannya, maka masyarakat banyak yang tidak setuju dengan kegiatan itu. Hal ini mereka anggap sebagai tantangan yang biasa dalam perjuangan mengembangkan dakah Islamiyah sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Saw. dahulu kala. Dengan demikian, mereka tetap tabah dalam menghadapi cobaan tersebut, dengan tetap komit dalam kegiatan dakwah mereka.

Generasi berikutnya bermunculan penerus yang lebih semarak. Di antara anak didik penerus Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Badrus Salam adalah: 1). Ustadz Djazuli LC, yang bertempat tinggal di Bekasi, 2). Ustadz Qumaidi menetap di Ciracas, 3). Ustadz Ibnu Hajar bertempat tinggal di Bambu Apus, 5). Ustadz Zainal Abidin yang menetap di Limus Pratama, 6). Ustadz Arman Amri bertempat tinggal di Bekasi. Semua mereka ini adalah tokoh-tokoh Wahabi yang tekun dan giat berdakwah tentang salafi di Jakarta.[5]

Selanjutnya, tokoh Wahabi yang mengembangkan paham Salafi ini, namun mendapat tantangan dari masyarakatnya adalah Ustadz Badrussalam. Dianya bertempat tinggal di Cileungsi, mereka (dia bersama komunitasnya) membangun sebuah Masjid Al-Barkah yang tidak jauh dari rumahnya, Dia menyajikan dakwah salafi di sana, kegiatan keagamaan dimuati dengan dakwah, misalnya saat shalat jumat, pada waktu-waktu setelah shalat subuh, demikian juga pengajian atau majelis taklim untuk

[5] Kementerian Agama RI., *Perkembangan Paham ...,* hlm. 232.

kaum bapak yang dinaminya dengan istilah ikhwan. Mengingat konten ceramahnya yang banyak bermuatan kajian bid`ah dan penyesatannya, maka cukup banyak masyarakat yang protes, dan tidak setuju dengan model dakwah tersebut, dan mereka menentangnya, karena dianggap meresahkan masyarakat di tempat itu. Dakwah mereka tetap berjalan walau di tengah banyaknya rintangan dalam perjuangannya.

Untuk menyajikan dakwah yang lebih masif lagi, mereka berinisiatik menggunakan media radio. Para alumni Pondok Pesantren Imam Buchori Solo, misalnya, Ustadz Pawaz, Ustazd Abu Zuhri, dan Ustadz Agus Hasan datang untuk menjumpai Ustadz Badrussalam dan Ustadz Yazid dalam rangka mohon persetujuan untuk mendirikan Rodja (Radio Dakwah Ahlussunnah Waljama'ah) yang didirikan pada tahun 2004, dengan tujuan supaya dakwah dapat dilakukan secara luas, tidak terbatas hanya pada masyarakat yang ada di Bogor saja, tetapi juga di seluruh Indonesia memungkinkan untuk mendengar dakwah salafi tersebut. Dengan cara ini semakin masiflah pengembangan dakwah Wahabi yang bermuatan slafi ini.

C. Peran Ulama

Hal yang paling istrimewa terlihat pada pilpres 2019 adalah mencoloknya peran ulama di dalamnya. Tidak heran kalau kata ulama pun menjadi surplus dalam perbendaharaan narasi politik Indonesia, setiap kali ada informasi dan cerita politik maka subjek sekaligus objek yang banyak berperan di sana adalah ulama, dan hampir tak pernah ada kegiatan politik dalam pilpres kali ini yang tidak mengikut-sertakan ulama. Untuk hal ini telah muncul banyak jargon, misalnya; ijtima' ulama, aksi gerakan pengawal fatwa MUI, belakangan berubah menjadi aksi gerakan pengawal fatwa ulama, tagar kamibersamaulama, dan lain sebagainya. Pokoknya, ulama telah menjadi icon dalam pilpres kali ini.[6]

[6] https://indoprogress.com/2018/09/berebut-klaim-dukungan-ulama-dan-

Perbedaan (*Ikhlitaf)* pilihan politik di kalangan ulama pada Pilkada serentak tahun 2018 tidak sepenuhnya menjadi rahmat. Pengamatan yang dilakukan mengindikasikan bahwa di antara ulama itu sendiri ada yang tereliminasi dari pergaulan sesama ulama itu, ada yang diintimidasi, *bullying*, embargo sosial-ekonomi dan bahkan ancaman fisik dan keselamatan. Bila hal ini baru pada tingkat pilkada maka dampak Pilpres 2019 lebih dahsat lagi.

Pernyataan dukungan terhadap calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) telah melibatkan banyak ulama. Mereka itu terdiri dari berbagai latar-belakang, termasuk etnis, pendidikan, organisasi keagamaan, Cendikiawan dan paham keagamaan. Keberadaan mereka ini terkategori sebagai lintas sektoral Ulama Indonesia.

Sebagaimana dilansir *kompas.com* terkaiat Pilpres 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pencalonan Capres dan Cawapres sampai pengucapan sumpah/ janji. Pencalonan presiden dan wakil presiden sudah dimulai pada 26 Maret 2018 dan berakhir pada 21 September 2018. Terhitung sejak 20 September 2018-16 November 2018 dilakukan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Kampanye Capres dan Cawapres telah berlangsung terhitung sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Selanjutnya pemungutan suara telah dilaksanakan pada 18 April 2019, yang kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara pada 18 April 2019-22 Mei 2019. Sejak 23 Mei 2019 hingga 15 Juni 2019 dijadwalkan penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian pada Juli-September 2019 peresmian pasangan Presiden terpilih dan Agustus-Oktober 2019 pengucapan sumpah/ janji mereka. Terakhir, penetapan pasangan presiden dan wakil presiden ditetapkan pada 6 Oktober 2019.[7]

---

miskinnya-gagasan-politik/.

[7] *Ini Tahapan dan Jadwal Lengkap Pemilu 2019,* Kompas.com 20 Februari 2018, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019

Saat kampanye Pilpres 2019 telah digelar pada tanggal 18 Apriil 2019, masing-masing kandidat mengklaim bahwa mereka didukung oleh ulama. Justifikasi dukungan ulama dari berbagai latar belakang etnis, daerah dan organisasi dilakukan sebagai bagian dari strategi politik mereka untuk meningkatkan dukungan dan pilihan umat dengan cara menjual kharisma tokoh keulamaan yang ada. Jelas ulama ini memiliki jamaah dan pengaruh yang besar untuk menentukan pilihan yang benar.

Hubungan harmonis politik dan agama mendapatkan tantangan pasca pilpres 2014. Pergolakan dan pergesekan politik yang bermuatan sentimen agama terjadi secara signifikan yang memuncak di penghujung tahun 2016. Berbagai kelompok Islam turun ke jalanan ibukota melakukan aksi protes terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Aksi protes yang melibatkan jutaan orang itu menamakan aksi mereka sebagai Aksi Bela Islam yang dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada 17 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Kegiatan ini diprakarsai oleh ormas Islam, di antaranya; Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), dan puluhan organisasi Islam lainnya (Inilah.com, 2016).[8] Aksi tersebut mendapat dukungan dari sekelompok ulama.

Pasca aksi tersebut, komunikasi ulama mengalami polarisasi yang sangat tajam, dan meluas ke berbagai daerah, serta berdampak pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 yang lalu. Hal ini dapat dicontohkan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Utara. Pencoretan nama ustad sebanyak 40 orang dari daftar khatib di kota Medan khususnya, umumnya di Sumatera Utara telah terjadi akibat pilihan politik yang berbeda. Bahkan, curahan hati (Curhat) salah seorang ustadz sempat menjadi viral (buah bibir) di media sosial, karena

---

[8] Ari Ganjar Herdiansah, Junaidi, dan Heni Ismiati, 2017. *Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional* dalam Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 – 9185, Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 61 – 73, DOI: 10.24198/jwp.v2i1.11480, hlm. 62.

namanya dicoret bersama puluhan ustadz lainnya untuk tidak diberi kesempatan khatbah pada mesjid tertentu karena perbedaan pilihan politik tersebut. Setelah ditelusuri, sumber awal curhat ini diposting dari akun Ustadz Miftah, kemudian berkembang kemana-mana.

Berikut pertikan curahan hatinya:

"Tolong Saya Wahai Semua Saudara-Saudara Se-Bangsa & Se-Tanah Air

Saya sedih sesedih-sedihnyanya, hanya karena perbedaan pandangan politik yang memang disahkan oleh negara karena saya memilih Djoss, saya dan teman-teman harus dikeluarkan dari jadwal Khatib Jum'at di kota Medan, dihina, dihujat dan dicaci. Ini merupakan cara-cara dzalim, dimana saya harus kehilangan jadwal ceramah demi kepentingan politik.

Sadarlah wahai ummat Islam, ini semua hanya untuk kepentingan politik, meraih kekuasaan dengan cara-cara yang curang. Kalau bukan karena kepentingan politik, tentunya jadwal kami, para ustadz di berbagai Masjid tidak dihapus.

Di Masjid saya sendiri, saya di non-aktifkan menjadi wakil BKM, tidak boleh menjadi Imam. Cara-cara seperti ini merupakan cara dzalim ala ISIS, menyusupnya paham radikal yang tidak bisa menerima perbedaan.

Sadarlah wahai ummat Islam, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya serahkan semua ini kepada Allah dan mengahadapinya dengan sabar. Biarlah Allah menjamin rezeki saya dan istri saya. Saya korbankan semuanya untuk memilih calon pemimpin yang baik seperti Pak Djarot yang tetap sabar walaupun dihina, direndahkan dan dicaci."[9]

Dari sumber media sosial lainnya, juga menyebutkan, 18 nama ustadz yang menjadi korban pencoretan nama sebagai penceramah/ khatib, yaitu: 1) Miftahul Khair; 2) Agus Riza Koto; 3) Edi Purnomo;

[9] Miftah (postingan linimasa tanpa judul yang di*screenshot*) bersumber dari https://www.facebook.com/miftah.alustadz.12 diakses dari https://seword.com/umum/kami-ummat-islam-kami-ummat-islam-lalu-ustadz-miftahul-chair-apa-H1VUQR-GX

4) Rudi Suntari; 5) Tamrin Munte; 6) Sangkot Saragih; 7) Nasib Selmi; 8) Sangkot Sirait; 9) Iqbal Parinduri; 10) Hayatisna Mph; 11) Harmaini Sitorus; 12) Dr. Adznan Lelo; 13) Marasutan Ritonga; 14) Ust. Al Ghazali Siregar; 15) Ust. Raja Edy S. Ag; 16) Hermanto; 17) Sarwo Edi; 18) Lukmanul Hakim.[10]

Sebelumnya, indikasi poralisasi ulama ini sudah terlihat. Gerakan rihlah spiritual dalam rangka menggaet dukungan ulama ini telah dimodifikasi kegiatan pemberangkatan umroh untuk 40 orang ulama, mereka telah diberangkatkan umrah, dan di sana mereka diajak untuk mendoakan secara berjamaah kandidat gubernur yang teah memfasilitasi mereka.[11] Sebaliknya, ada gerakan ulama yang diprakarsai oleh salah satu kandidat untuk mengajak pendukung dan umat melaksanakan shalat subuh berjamaah, dan mendoakan paslon kandidat pemerakarsa tersebut pula.[12] Senantiasa saja ada kreasi baru gerakan ulama untuk menggalang dukungan kepada paslon tertentu, dan juga diiringi dengan gerakan balasan ulama lain, sebagai penyeimbang, atau kaunter atas gerakan terdahulu yang dilakukan oleh ulama pendukung kandidat tersebut. Dalam situasi yang lebih menyedihkan, ada pula ulama yang mengaku bahwa dia telah diteror.[13]

Indikasi polarisasi dan pertaraungan ulama pada Pilpres kali ini juga terlihat cukup mencolok. Ekses dari sikap pro dan kontra yang dilakonkan oleh ulama sudah nyasar nyerempet-nyerempet

---

[10] Angga Putra, (postingan Grup *Whatsapp* yang dibagikan difacebook) dikutip dari https://seword.com/umum/kami-ummat-islam-kami-ummat-islam-lalu-ustadz-miftahul-chair-apa-H1VUQR-GX

[11] *Ulama Berangkat Umroh Berdoa Agar Sumut Dipimpin DJOSS.* Bentengtimes.com, Kamis 14 Mei 2018, diakses dari https://www.bentengtimes.com/medan/2018/05/24/7359/40-ulama-berangkat-umroh-berdoa-agar-sumut-dipimpin-djoss/

[12] *Martono Ajak Pendukung Djoss Salat Subuh Berjamaah Sebelum Mencoblos.* Medan Tribun News, Selasa, 12 Juni 2018, diakses dari http://medan.tribunnews.com/2018/06/12/ustaz-martono-ajak-pendukung-djoss-salat-subuh-berjamaah-sebelum-mencoblos

[13] *Ustadz Pendukung Djarot Sihar Mengaku Kembali Diteror,* Liputan6.com, 22 Juni 21018, diakses dari https://www.liputan6.com/pilkada/read/3568272/ustaz-pendukung-djarot-sihar-mengaku-kembali-diteror

sampai mengarah kepada penghinaan dan sikap merendahkan pribadi seseorang, dalam hal ini termasuk ulama. Media sosial banyak dihiasi dengan ujaran kebenciandan dan hoax yang dikemas dengan bahasa agama, realitas ini disajika sampai di pangkuan masyarakat dalam segala macam starata sosial secara menyeluruh. Pertarungan yang melibatkan ulama ini sudah terlihat muncul dalam penampakan yang kurang sehat.

Di samping ada ulama yang direndahkan, di sisi lain ada pula ulama yang disamjung tinggi. Berbagai macam latarbelakang ulama, cendikiawan, kiai dan tokoh agama yang mumpuni digaungkan namanya sebagai kandidat calon presiden. Di antaranya; Amien Rais, Zulkifli Hasan, Yusril Ihza Mahendra. Untuk calon wakil presiden disebutkan namanya: Abdul Somad, ustadz Din Syamsuddin, K.H. Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Muhammad Romahurmuziy, Muhammad Zainul Majdi, Said Aqil Siradj, dan Salim Segaf Al-Jufri, serta yang lainnya.[14]

Lebih teknis lagi, munculllah sekelompok ulama yang menamakan dirinya dengan Tim 11 Ulama Alumni 212. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persaudaraan Alumni 212 di Cibubur, Jakarta Timur pada Selasa, 29 Mei 2018, mereka merekomendasikan bakal Capres dan Cawapres. Nama-nama bakal capres pada Pilpres 2019, antara lain: 1) Rizieq Shihab, 2) Prabowo Subianto, 3) Tuan Guru Bajang, 4) Yusril Ihza Mahendra, 5) Zulkifli Hasan. Nama-nama bakal Cawapres, yakni: 1) Ahmad Heryawan, 2) Hidayat Nur Wahid, 3) Yusril Ihza Mahendra, 4) Anies Matta, 5) Zulkifli Hasan, 6) Eggi Sudjana, 7) Bachtiar Nasir, 8) Prabowo Subianto; dan 9) Anies Baswedan.[15] Ulama ini teah bergerak maju di luar sistem.

[14] *Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019,* Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019

[15] *Ini Nama-nama yang Direkomendasikan Persaudaraan Alumni 212 Sebagai Bakal Capres dan Cawapres,* tribun news.com, 31 Mei 2018, diakses dari http://wartakota.tribunnews.com/2018/05/31/ini-nama-nama-yang-direkomendasikan-persaudaraan-alumni-212-sebagai-bakal-capres-dan-cawapres?page=2

Selanjutnya, kegiatan tersebut diiringi lag dengan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang lebih mengerucut lagi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) yang digelar di Hotel Peninsula, Jakarta pada hari Minggu 29 Juli 2018. Hasil kegiatan ini adalah merekomendasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto direkomendasikan sebagai Capres di Pilpres 2019, dan dibantu oleh dua nama ulama yang direkomendasikan sebagai Capres, yaitu Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri dan penceramah kondang Ustaz Abdul Somad.[16] Belakangan, Prabowo Subianto tetap tampil sebagai capres karena memiliki partai pengusung setelah berkoalisi dengan partai lain, sementara dua nama untuk cawapres tersebut, tidak satu pun namanya yang tetap muncul ke permukaan karena tidak teragendakan dalam kesimpulan partai pengusung.

Salah seorang ulama tasawuf yang juga Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) KH Zainul Majdi, tiba-tiba menyampaikan sikap politiknya untuk mendukung dan merekomendasikan Joko Widodo sebagai capres untuk Pilpres 2019 (Jokowi dua periode).[17] Informasi dukungannya terhadap Jokowi ini meluas dengan cepat, orang-orang yang mengidolakan Jokowi pun mulai bermunculan dan memberikan dukunganya. Dengan hal ini nama Jokowi pun muncul di pentas kandidat capres 2019 setiap saat dan secara meluas.

Polarisasi ulama yang sudah mengkristal ini pun memperlihatkan ekses negatifnya. TGB yang merupakan ulama kesohor dalam barisam alumni 212 kemudian menjadi sasaran bullying, meme, cacian dan hinaan di media sosial mulai dialamatkan kepadanya, bahkan, ekses dari

---

[16] *Ijtima Ulama Salim Segaf atau Ustaz Somad Cawapres,* waspada.co.id, 29 Juli 2018.

http://waspada.co.id/warta/ijtima-ulama-salim-segaf-atau-ustadz-somad-cawapres-prabowo/

[17] *TGB: Saya Dukung Jokowi Dua Periode Sejak 2016.* Tempo.co, Sabtu 14 Juli 2018, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1106694/tgb-saya-dukung-jokowi-dua-periode-sejak-2016

pilihan politik TGB tersebut menyebabkan namanya sampai dicoret sebagai Capres yang diusung oleh Alumni 212 yang kemudian menjadi kontroversi di media.[18] Di sisi lain, memang masih tetap saja banyak orang yang bersikap realistis, yaitu menghargai pilihan politik beliau sebagai seorang warga negara, apalagi sebagai seorang ulama yang berkeinginan untuk mengajak umat ke jalan yang benar.

Selain TGB, di Bogor Jawa Barat, sebagaimana dimuat kompas. com, sekelompok ulama yang menyebut diri dengan Solidaritas Ulama Muda Indonesia (Samawi) menyatakan dukungan kepada Joko Widodo untuk maju sebagai capres dalam Pilpres 2019. Disebutkan, organisasi tesebut telah terbentuk di 10 provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel dan NTB). Kabarnya, acara dekralasi tersebut dihadiri 15.000 ulama muda dari sejumlah wilayah di Indonesia.[19] Dukungan ini memperlihatkan tentang panjangnya deretan ulama yang sudah tercebur dalam politik praktis ini.

Para ulama dari Jawa Barat juga tidak ketingalan untuk masuk dalam polarisasi ini. Saat bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 10 April 2018, ulama Jawa Barat ini pun turut menyatakan dukungan mereka kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden pada priode kedua. Di antara mereka ini adalah Pengasuh Ponpes Al Hamidiyah Depok, KH Zainuddin Maksum Ali.[20] Keterlibatan ulama dalam prosesi pilpres kali ini menjadi sesuatu yang menarik.

Selain dukungan ulama, dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pelaku politik resmi pun turut merespon realitas ini. PKB

---

[18] *Kontroversi TGB Dicoret dari Capres Persaudaran Alumni 212,* detik,com, Jumat 06 Juli 2018, 20:44 WIB, diakses dari https://news.detik.com/berita/4102415/kontroversi-tgb-dicoret-dari-capres-pa-212

[19] *Ulama Muda Indonesia Deklarasi Dukung Jokowi di Pilpres 2019,* kompas. com, diakses dari https://regional.kompas.com/read/2018/07/10/18471521/ulama-muda-indonesia-deklarasi-dukung-jokowi-di-pilpres-2019

[20] *Ulama Jabar Siap Dukung Jokowi di Pilpres,* detik.com, Selasa 10 April 2018, 15:25 WIB, diakses dari https://news.detik.com/berita/3963612/ulama-jabar-siap-dukung-jokowi-di-pilpres-2019

pun sebagai pemilik sampan pengusung menyatakan dukungan secara penuh kepada Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2019, dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.[21] Ternyata dukungan suara yang semula berjalan menyelusuf secara informal, belakangan menguat, dan menjadi dukungan formil.

Penelitian Ari Ganjar Herdiansah, dkk mengutip Ghoshal dalam Inayatullah (2009), menyebutkan, sejak era reformasi 1998, peningkatan partisipasi politik masyarakat meningkat. Bentuk respons yang beragam, termasuk kemunculan kelompok berdasarkan identitas; keagamaan, kesukuan, dan kedaerahan. Ratusan organisasi Islam telah didirikan untuk mengekspresikan orientasi ideologi politiknya dalam rangka turut mewarnai dinamika politik praktis tersebut. Ini termasuk ciri transisi demokrasi di Indonesia. Mujani dan Liddle (2009) menyebutkan, pesatnya perkembangan kelompok-kelompok Islam turut berperan aktif dalam membangun demokratisasi di Indonesia. [22]

Sejak 2014, pola politik aliran kembali menjadi lintasan konflik ideologis yang membelah basis massa pendukung dan mempengaruhi dinamika keamanan nasional. Hasil kajian ini merupakan analisis awal yang perlu didalami lagi untuk mengungkapkan bagaimana indikasi-indikasi menguatnya politik aliran dapat membentuk polarisasi kekuatan politik dan membentuk ulang demokratisasi di Indonesia.[23]

Adat Sudrajat (2002) dalam penelitiannya tentang *Agama dan Perilaku Politik*, mengatakan; Pada saat agama mempengaruhi kehidupan seseorang, maka di saat yang sama, corak pemikiran dan pemahaman keagamaannya berimplikasi terhadap kehidupannya.

---

[21] *PKB Resmi Dukung Jokowi untuk Pilpres 2019*, Kompas.com, 14 Juli 2018, diakses dari https://regional.kompas.com/read/2018/07/14/14044011/pkb-resmi-dukung-jokowi-untuk-pilpres-2019.

[22] Ari Ganjar Herdiansah, Junaidi, dan Heni Ismiati, 2017. *Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional* dalam Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 – 9185, Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 61 – 73, , DOI: 10.24198/jwp.v2i1.11480, hlm. 62

[23] Ari Ganjar Herdiansaha, dkk. *Ibid.*

Adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat membentuk perilaku politik seseorang.[24] Menjamurnya hal ini, sekaligus menguatnya polarisasi uama di Indonesia ini.

Dalam penelitian Arfriani Maifizar (2017) terkait polarisasi, disebutkan; Islam di Aceh telah menjadi basis ideologis kerakyatan *(populer ideology)* yang belum tertandingi oleh ideologi lain (Ali, 2006: 10). Polarisasi yang berbasis politik aliran di Aceh tetap berada di bawah payung Islam. Islam telah menjadi bagian integral masyarakat Aceh dan dasar keberagamaan yang paling prinsipil *(principle of live)*.[25] Dalam hal ini, kajian polarisasi ulama di Aceh semakin mendapat tempat.

Kajian Riyanto tentang kesadaran pemilih pada prosesi Pilpres, menyebutkan; Melalui Pilpres secara langsung lewat pilihan rakyat, pola-pola kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru dapat dielakkan. Pembangunan kehidupan bermasyarakat kini lebih terbuka. Ini tampak dari sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum," dan Pasal 8 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik".[26]

---

[24] Adat Sudrajat, 2002. *Agama dan Perilaku Politik*, dalam *Jurnal Humanika,* No. 1, Tahun 1, 2002, h. 6.

[25] Arfriani Maifizar, Kamaruddin M. Said & Rahimah Embong, 2017. *Peranan Ulama dan Umara dalam Memartabatkan Syariat Islam di Aceh, (Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization),* Rahimah Embong, dkk. (eds.), Research Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), ISBN 978-967-0899-70-1, diakses dari http: //www.inspire.unisza.edu.my, hlm. 383.

[26] Riyanto, 2015. *Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ri Tahun 2014 Di Kabupaten Demak*, *Addin,* Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, hlm. 424 -435.

Sebenarnya, kriteria pilihan politik ulama sudah dapat secara eksplisit disampaikan dari fatwa MUI yang ditetapkan di Padang panjang, Sumatra Barat, pada 26 Januari 2009. Sedangkan pimpinan MUI yang menandatangani adalah pimpinan Komisi Fatwa MUI KH.Ma'ruf Amin, Wakil Ketua MUI M.Masyhuri Na'im, dan Sekretaris Sholahudin Al Aiyub. Fatwa tersebut adalah tentang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum. Dalam salinan fatwa disebutkan: 1) Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2) Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. 3) *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur *(shiddiq),* terpercaya *(amanah),* aktif dan aspiratif *(tabligh),* mempunyai kemampuan *(fathonah)*, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. 5) Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Rekomendasi: a. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugasamr ma'ruf nahy munkar. b. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi. [27]

Tingginya suhu politik, sekaligus besarnya keterlibatan ulama pada pilpres kali ini seperti telah digambarkan mengantarkan penulis untuk menetapkan fokus penelitian pada kesempatan ini adalah menukik pada, Dampak pilpres 2019 terhadap polarisasi ulama di Indonesia: Kajian terhadap perbedaan pilihan politik.

[27] M. Sam ichwan dkk. 2019, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia* III Tahun 2009.39 (salinan fatwa), dalam Majlis Ulama Indonesia (MUI) 2009. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975,* Jakarta: Erlangga, hlm. 867, 2009, hlm. 867.

Penelitian ini menjadi mendesak dan teramat penting ketika kelompok-kelompok ulama yang tidak terafiliasi, setidaknya berkoordinasi dengan MUI secara kelembagaan dan resmi, telah menggiring baik secara langsung maupun tidak langsung opini publik bahkan menggunakan *ijmak* atau *ijtima ulama.* Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, berbagai kelompok yang disebut sebagai ulama oleh sebagian umat Islam telah secara leluasa berfatwa melalui jejaring dan media sosial (seperti *youtube*) serta lewat TV kabel dan sebagainya. Hal ini menambah tidak mengkristalnya pemahaman yang sama yang dapat mengurangi dampak negatif perbedaan peran, sikap maupun pilihan politik.

Melalui penelitian ini diharapkan, dapat memperoleh kejelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya dan perilaku memilih ulama, polarisasi yang terjadi di kalangan ulama pada Pilpres 2019, kecenderungan sikap yang akan mengarah menjadi budaya politik ulama (baik secara parokial, subjek maupun oartisipan); bagaimana perilaku memilih ulama, (apakah cenderung menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis atau rasional); dan tentu saja menjawab pertanyaan kunci yang paling sentral dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dampak polarisasi akibat perbedaan pilihan politik ulama pada Pilpres 2019.

BAB II
PEMILIHAN PRESIDEN 2019

A. Pelaksanaan

1. Pemilu Terbesar

Ajang perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah tampilan Pemilihan Umum (Pemilu) terbesar di dunia. New York Times menyebutnya sebagai "*the world's largest direct presidential election*" yang berarti pemiilihan presiden secara langsung terbesar di dunia. Sementara CNN menampilkan laporan Lowy Institute (lembaga kajian Australia) dengan menyebut bahwa pemilu Indonesia 2019 sebagai Pemilu paling menakjubkan, dan pemilu paling rumit di dunia. Hal ini diamini oleh Al Jazeera, dan media internasional lainnya. Luar biasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sekaligus pilpres terbesar di dunia.

Pemilu di India dan Amerika dianggap masih kalah besar dengan Indonesia. Pemilu di India memang menghadirkan 900 juta pemilih ke (Tempat Pengungutan Suara (TPS), namun dilaksanakan dalam masa 6 tahapan. Begitu juga dengan Amerika Serikat, memiliki jumlah pemilih sebanyak 214 juta jiwa, namun dilakukan dengan terlebih dulu memilih dewan wakil rakyat untuk menentukan calon presiden. Sementara Pemilu Indonesia menjadi luar biasa karena menghadirkan 193 juta jiwa orang untuk memilih secara langsung dalam 1 (satu) hari saja. Secara persentase antara jumlah hari yang diperlukan dan jumlah pemilihnya jelas bahwa Pemilu Indonesia tetap lebih besar, dan

agung, apalagi ditinjau dari aspek tarik menarik kepentingan di dalamnya, dan juga aksi dan reaksi para pendukungnya yang antagonis dan saling menyerang.

Pilpres Indonesia 2019 menjadi sangat istimewa, terutama jika dilihat dari prosesnya. *Pertama;* Karena adanya penggabungan antara Pilpres dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Di samping memilih 2 (dua) pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, juga memilih 245.000 orang Anggota Legislatif yang namanya masuk dalam kertas suara, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota) se-Indonesia periode 2019–2024., *Kedua;* Pemilu ini dilaksanakan hanya dalam waktu 1 (satu) hari saja, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 809.500 lokasi. Hal ini menjadi lebih spektakuler lagi, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, maka penyediaan logistinya, pengawasan dan pengendalianya cukup sulit, pengantaran kertas suara itu terkadang harus dilakukan dengan berkuda, naik sampan, pakai ojek, bahkan jalan kaki naik dan turun gunung untuk menjangkau daerah tujuan. Karenanya tidak heran kalau total 554 jiwa orang KPPS, Panwas dan Polisi tewas di Pemilu 2019 ini.[1]

2. Pemilu Serentak

Pemilu serentak ini berawal adanya ide Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak menggugat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2013 lalu, dan Gugatan itu teregisterasi dengan nomor 14/PUU-XI/2013. Mereka menggugat dengan

[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019., juga, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47958825, dan lain-lain.

alasan efisiensi dana Pemilu, yaitu dapat menghemat uang negara sekitar 5 s/d.10 triliun rupiah, menurut hitungan Ferry Kurnia Rizkiansyah (anggota KPU aktif) waktu itu, sementara menurut hitungan Arief Wibowo (anggota DPR Fraksi PDIP) menyebutkan jauh lebih besar lagi, yaitu 150 triliun rupiah, dan ini sama dengan 1/10 (sepersepuluh) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indonesia. Tahapan proses itu pun bergulir, akhirnya MK pun memutus dan mengabulkan sebagiananya, sekaligus MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 UU Pilpres.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 telah memaksa berlakunya Pemilu serentak tahun 2019. Kelanjutannya, Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun menyusun naskah akademik UU Pemilu baru dengan memasukkan ketentuan pemilu serentak di dalamnya, kemudian dikirimkan ke DPR, dan bergulir terus mengikuti proses sesuatu tradisinya, akhirnya dinyatakan selesai setelah diketok palu pada tangal 21 Juli 2017. Selanjutnya, Presiden Jokowi mengesahkan UU Pemilu itu pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sehari sesudahnya.

Semula pemohon menginginkan Pemilu serentak itu dimulai pada tahun 2014 yang lalu, sehubungan dengan gugatan itu telah diajukan pada tahun 2013. Penggugat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sebenarnya merasa kecewa dengan Putusan MK yang memperlambat Pemilu serentak menjadi 2019. Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak, Muhammad Fadjroel Rachman menyampaikan tentang keanehan putusan MK ini, yaitu Putusan MK mengabulkan pemilu serentak, tapi pelaksanaannya ditunda sampai pada tahun 2019. Dia mengatakan, idealnya diberlakukan pada tahun 2014, sementara

persoalan teknis adalah persoalan yang bisa diatasi oleh pihak-pihak terkait dengan cara bijaksana. Akhirnya, putusan MK ini pun dipedomani, Pemilu serentak ditunda menjadi berlaku pada tahun 2019, dan sesuatu yang dihindari itu (biaya besar pemilu) pada tahun 2014 tetap saja mengoyak kantong negara.

Hal senada juga disampaikan oleh Hajriyanto Y Thohari (Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat). Dia mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi itu, di satu sisi telah mengabulkan pelaksanaan pemilu serentak, tapi di sisi yang lain, putusan itu baru diberlakukan pada tahun 2019. Hal ini sangat janggal, lantaran baru dilaksanakan pada pemilu mendatang. Keputusan MK menjadi banci, padahal MK itu harusnya memberi jawaban tegas kalau UU Nomor 42 Tahun 2008 menyalahi konstitusi, ya go ahead langsung diterapkan saja yang benar, ujarnya. Dia menyoroti keputusan MK yang menyatakan sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai inkonstitusional namun tetap dilaksanakan pada tahun berikutnya (2014). Lalu dia bertanya, apakah kita dipaksa untuk melakukan pemilu yang inkonstitusional di tahun 2014, karena UU nya sudah dinyatakan batal?. Menjadi lebih aneh lagi, karena sebenarnya MK hanya berwenang mengatakan sebuah undang-undang konstitusional atau tidak, tidak termasuk untuk mengatakan masa berlakunya.[2] Ketegasan MK sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir menjadi tergangu.

Selanjutnya, Yusril Ihza Mahendra juga turut mengkritik putusan MK tersebut. Dia menyatakan, seharusnya putusan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden itu menyatakan, pemilu serentak bisa digelar mulai 2014, tapi nyatanya

[2] https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1916301/MPR. Kritik. Putusan.MK.soal.Pemilu.Serentak.2019https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1916301/MPR.Kritik.Putusan.MK.soal.Pemilu.Serentak.2019

tidak, dia mengatakan baru berlaku pada tahun 2019. Dalam pertimbangannya MK mengatakan; KPU sudah melaksanakan tahapan-tahapan, sehingga belum siap. Untuk hal ini, dengan lantang saya mengatakan bahwa MK bukan KPU, katanya. Seharusnya, agar putusan itu lebih adil, MK memanggil KPU, dan bertanya tentang kesiapan mereka, apakah mereka bisa melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2014 yang masanya sudat tersebut, atau tidak. Putusan MK itu lain dari Pengadilan pada umumnya, yaitu lanagsung berlaku saat diputuskan, karena dia secara otomatis berkekuatan hukum.

3. Tahapan Kegiatan

Tahapan Pilpres ini menghabiskan masa yang cukup panjang. Tahapan itu melewati perjalanan masa 3 (tahun), yaitu sejak tahun 2017 sampai kepada tahun 2018. Pnjangnya masa tersebut dapat dilihat pada jadwal pemilu sebagai berikut:[3]

Jadwal pemilu ini dikelompokkan kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Pra Pemilu

Keterangan: *Ditulis miring* berarti jadwal tetap

Tanggal *(Paling lambat)*	**Kegiatan**
30 September 2017	Pembentukan Panwaslu kecamatan, kelurahan dan luar negeri
17 Agustus 2017	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksana penyelenggaraan pemilu
17 Oktober 2017	Pendaftaran partai politik peserta pemilu
17 Desember 2017	Menteri Dalam Negeri menyerahkan data kependudukan ke KPU
17 Februari 2018	Verifikasi partai politik calon peserta pemilu diselesaikan

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/PemilihanumumPresidenIndonesia2019

18 Februari 2018	Pengumuman nama partai politik peserta pemilu
17 Maret 2018	Daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan
25 Maret 2018	Pembentukan pengawas TPS
17 Juli 2018	Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten
4-10 Agustus 2018	Pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden
20 September 2018	KPU melakukan verifikasi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden
21 September 2018	Pengumuman nama pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden
17 Oktober 2018	Pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara
23 September 2018- 13 April 2019	Kampanye pemilu
14-16 April 2019	Masa tenang
17 April 2019	Pemungutan suara

b) Pasca Pemilu

Keterangan: *Ditulis miring* berarti jadwal tetap

Tanggal *(Paling lambat)*	**Kegiatan**
19 April 2019	Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS
17-19 April 2019	Penetapan hasil perolehan suara di luar negeri
6 Mei 2019	Penetapan hasil perolehan suara untuk calon presiden dan wakil presiden oleh KPU
9 Mei 2019	Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPRD kota/kabupaten oleh KPU kota/kabupaten
12 Mei 2019	Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPRD provinsi oleh KPU provinsi

15 Mei 2019	Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPR dan DPD oleh KPU
6 Oktober 2019	Penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih

B. Peserta Kontestasi

1. Joko Widoo

- Biodata singkat:
  - Jabatan : Presiden Republik Indonesia
  - Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961
  - Kebangsaan : Indonesia
  - Partai : PDI-Perjuangan
  - Isteri : Iriana Joko Widodo
  - Anak : Gibran Rakabuming Raka, Ka Hiyang Ayu, Kaesang Pangarep
  - Profesi : Potilisi, Pengusaha
- Presiden Republik Indonesia
  - Masa Jabatan : 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
  - Wakil : Jusuf Kalla
  - Mengantikan : Susilo Bambang Yudhoyono
- Gubernur
  - Gubernur DKI : ke – 16
  - Masa Jabatan : 5 Oktober 2012 - 16 Oktober 2014

- ➢ Mengantikan : Fauzi Bowo
- ➢ Wakil : Basuki Tjahaja Purnama

o Wali Kota

- ➢ Wali Kota : ke – 16 Surakarta
- ➢ Masa Jabatan : 28 Juli 2005 - 1 Oktober 2012
- ➢ Wakil : F.X. Hadi Rudyatmo
- ➢ Menggantikan : Slamet Suryanto
- ➢ Digantikan : F.X Hadi Rudyatmo

Dalam bentuk narasi, biodata Joko Widodo diperkenalkan lagi. Dia akrab dipanggil dengan Jokowi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, dia adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.

Dua tahun menjalani periode kekuasaannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Nasib mujur mnyertainya dalam pertarungan ini, dia pun memenangkan persaingan ini, lalu berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk memajukannya sebagai calon presiden untuk ajang pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk

maju sebagai calon presiden, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.

Gelar anak Pinggir kali sampai Tukang Mebel pun tidak jarang dialamatkan kepadanya. Laman jokowicenter.com menyebutkan; Sejak lahir pada 21 Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Jokowi tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di bantaran sebuah sungai di Solo. Hidup mereka sangat sederhana. Ayah Jokowi yang sehari-hari menghidupi keluarga dengan berjualan kayu terpaksa membawa istri dan anak-anaknya hidup berpindah-pindah dari satu rumah sewa menuju rumah sewa lainnya.

Dalam kondisi kehidupan keluarga yang sederhana ini mereka telah melalui banyak kesulita. Sebagai penghuni pinggiran sungai, keluarga Jokowi harus rela digusur Pemerintah Kota Solo dari tempat tinggalnya di bantaran Kali Pepe dan tinggal menumpang di kediaman seorang kerabat di daerah Gondang. Namun, pengalaman masa kecil tersebut tidak dirasakan Jokowi sebagai sebuah penderitaan. Jokowi yang sewaktu kecil dipanggil Mulyono berkata bahwa waktu-waktu sulit tersebut merupakan cara Tuhan yang sangat tepat untuk membangun karakter dirinya dalam mempersiapkan untuk tugas-tugas besar yang harus dipikulnya di masa depan.

Dengan mempersingkat biodatanya, dilanjutkan pada masa dewasa. Selepas berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jokowi muda sempat mencicipi pengalaman kerja pada sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Perusahaan ini memiliki lapangan kerja di tengah hutan, lalu Jokowi pun melaluinya untuk beberapa saat. Mengingat lokasinya yang jauh berada di tengah hutan, kondisi kerja yang keras, dan rencana untuk mempunyai buah hati menuntun Jokowi dan istri untuk kembali ke Kota Solo pada tahun 1988. Akhirnya dia pun meningalkan pekerjaan sebagai pengalaman pertamanya di perusahaan BUMN tersebut.

Sesampainya di Solo dia pun mencari pekerjaan baru lagi. Untuk mengisi kekosongan waktu dalam rangka mempertahankan hidup maka maka Jokowi bekerja di pabrik perusahaan milik pamannya, sampai suatu ketika memutuskan untuk berhenti dan Jokowi memulai usaha mebel sendiri. Pada kesempatan ini dia sudah menetapkan pendirian untuk berwira-usaha walau dengan taraf usaha yang masih sangat sederhana.

Usaha sendiri yang ditekuninya tersebut diperjuangkan dengan gigih, dan akhirnya dapat meraih kesuksesan. Usaha yang mulanya berjalan dengan kondisi sederhana lambat laun berkembang. Semula produk yang dihasilkan hanya dipasarkan untuk kebutuhan lokal, lama kelamaan berkembang menjadi usaha yang bertaraf regional, akhirnya Nasional dan internasional. Perkembangan usaha ini ternyata tak pelak lagi sudah turut meramaikan pasar manca negara.

Kesuksesan atas bisnis mebel yang ditekuninya, tidak membuatnya berfikir bisnis semata, tetapi dia mulai masuk di ranah sosial. Ia memperhatikan banyaknya usaha kecil masyarakat Solo yang sesungguhnya memiliki potensi untuk maju, tapi tidak dapat berkembang dengan baik, karena persoalan relasi dan birokrasi. Latarbelakang masa lalunya yang sulit di bantaran sungai ini, menjadi motivasi tersendiri baginya untuk memberi spirit bagi pengusaha kecil untuk bisa berkembang lebih cepat secara bersama-sama, lalu dia pun bersama beberapa rekan pengusaha lain mulai menggagas terbentuknya organisasi pengusaha mebel Nasional cabang Solo yang diberi nama "Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia" atau akrab disebut "Asmindo". Untuk assosiasi ini pun, Jokowi didaulat menjadi ketuanya. Lewat Asmindo, dia bergerak lincah memimpin berbagai kegiatan, dan ternyata telah berhasil mengangkat daya usaha para pengusaha kecil dan menengah di lingkungan sesama anggota Asmindo. Kenyataan ini membuat Jokowi semakin dikenal, nama Jokowi sebagai seorang pemimpin sukses semakin diapresiasi.

Kesuksesan Jokowi memimpin Asmindo membuat rekannya percaya diri untuk menjual ide bahwa Jokowi pantas untuk menjadi pimpinan publik yang lebih luas. Setelah dua tahun memimpin Asmindo, para pengurus dan anggota serikat pengusaha tersebut mulai melontarkan ide pencalonan diri Jokowi untuk mencalon sebagai Walikota pada Pilkada Kota Solo 2005. Saat Jokowi diperdengarkan tentang ide ini, dia hanya menanggapinya dengan senyum dan tawa, serta menolaknya secara halus, karena dia merasa tidak pantas untuk memangku jabatan tersebut. Gambaran tawadhu` (rendah hati) yang dimilikinya telah membuatnya merasa tawaran itu berlebihan kepadanya.

Aspirasi mengusung Jokowi untuk menjdi Walikota Solo tetap berhembus, bahkan menjadi semakin kencang dan konsisten. Mengingat rekan-rekan yang cukup percaya diri terhadap Jokowi, dan gagasan untuk mengantarkannya menjadi Walikota Solo telah konstan dan lebih solit, maka Jokowi pun mempertimbangan ide, gagasan dan usaha ini. Joko Widodo pun kemudian maju dalam pilkada ini, bersama FX Hadi Rudyatmo sebagai wakilnya, dan ternyata sukses telah menyertainya. Jokowi pun terpilih menjadi Walikota Solo periode 2005-2010.

Kesuksesan Jokowi pada Pilkada Solo 2005 adalah tonggak sejarah pertama bagi Jokowi dalam dunia politik. Kesuksesannya, dalam dunia bisnis dengan menggeluti usaha mebel yang ditekuninya, meningkat kepada upaya membangun kebersamaan dengan sesama pengusaha, bahkan terakhir menjalar sampai ke bidang sosial, dalam rangka perduli terhadap sesama, terutama kelompok lemah dan terbelakang, akhirnya mengantarkannya meraih sukses dalam bidang pilitik. Basis Jokowi yang kuat di tingkat grass root tersebut ternyata telah menjadi modal penyangga yang tangguh baginya untuk tetap bisa eksis dalam dunia politik ini.

Amanah di bidang politik sebagai Walikota Solo yang dipercayakan masyarakat kepadanya telah ditunaikan dengan

baik oleh Jokowi. Dia dipandang sukses mengelola beberapa kegiatan, di antaranya; Mengatur tata kelola lokasi pedagang kaki lima (PKL), menciptakan efisiensi birokrasi kota, dan melakukan peremajaan pasar-pasar tradisional membuat dirinya menjadi sosok populer di kalangan warga Solo (Surakarta). Politisi muda ini pun sukses memimpin kota Solo.

Masyarakat Solo ternyata haus dengan sosok kepemimpinan Jokowi. Berakhirnya masa jabatan Jokowi pada priode pertama sebagai Walikota Solo, membuat para pendukungnya tetap semangat dan fight untuk mendukungnya kembali maju dalam kontestasi pemilihan Walikota Solo untuk yang kedua kalinya. Akhirnya Jokowi pun dimajukan lagi untuk kandidat calon Walikota priode kedua kota Solo.

Pilkada langsung Walikota Solo periode kedua ini pun dimenangkan Jokowi dengan sangat fenomenal. Jokowi terpilih kembali untuk menjadi Walikota Solo priode kedua, yaitu priode 2010-2017. Jokowi menang telak, dengan perolehan suara yang sangat mencolok, yaitu sebesar 90,09%. Kemenangan ini merupakan gambaran kuat dukungan mayoritas masyarakat Solo yang memberi kepercayaan kepeminpinan Solo kepadanya.

Kebijakan Jokowi senantiasa saja membuatnya menjadi semakin dikenal dan disenangi publik. Jokowi mulai dikenal di tingkat Nasional setelah ia secara resmi mengganti mobil dinasnya dengan mobil Esemka, yaitu mobil yang lahir sebagai hasil karya para pelajar SMK 2 dan SMK Warga Surakarta pada bulan Januari 2012. Pemberitaan mengenai hal itu meluas dan menimbulkan berbagai tanggapan positif terhadapnya. Dengan hal ini, namanya pun menjadi harum di tingkat Nasional.

Di saat ada orang yang berpikiran miring terhadapnya, ternyata justeru hal kontra produktif sebaliknya yang terjadi. Suatu ketika Bibit Waluyo (Gubernur Jawa Tengah) menanggapi kebijakan Jokowi untuk mengganti mobil dinasnya dengan mobil

buatan Esemka adalah merupakan langkah yang sembrono. Komentar tersebut bukannya membuat Jokowi terstikma, tetapi justeru simpati publik semakin mengalir deras kepadanya, nama Jokowi semakin dikenal dan semakin disenangi. Ternyata, masyarkat Indonesia sangat merindukan kehadiran pemimpin yang sederna.

Nama Jokowi yang semakin harum inilah membuatnya tercium di tingkat Nasional. Jusuf Kalla (JK) sebagai politikus kondang yang memiliki analisis politik yang tajam mengajak Jokowi bergabung bersamanya ke Jakarta, sekaligus memberi tawaran kepadanya untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur DKI pada pemilihan Kepala Daerah yang sudah dekat di depan mata. Megawati Soekarno Putri setuju dengan usulan JK itu, sekaligus Prabowo Subianto pun meresponnya dengan menawarkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pasangan Jokowi untuk calon wakil gubernurnya.

Nasib baik seakan senantiasa menyertainya. Kebersamaan PDIP dan Partai Gerindra mengusung Jokowi-Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2012 ini pun ternyata meraih sukses. Pasangan Jokowi berhasil meraih suara tertinggi dari lima pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur DKI yang ada. Pada putaran pertama, Pasangan Jokowi Ahok menang dengan persentase perolehan suara sebesar 42,60 persen. Sementara pada putaran kedua, Jokowi dan Ahok berhasil mengungguli pasangan calon Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan persentase perolehan suara 53,82% dan 46,18%. Dengan ini Jokowi dan Ahok pun terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012-2017.

Bukan hanya kesuksesannya pada pencalonan Gubernur di DKI semata, tetapi gebrakan yang dilakukannya di ibu kota ini pun membuat orang secara Nasional mengenalnya dengan baik. Hanya dalam masa singkat Jokowi-Ahok menjabat di DKI ini, keduanya langsung membuat gebrakan, di antaranya;

Memperbaiki sistem penanganan banjir dengan menormalisasi waduk dan perbaikan drainase, dan juga melakukan perbaikan sarana angkutan umum dengan optimalisasi moda transportasi busway (kedua hal tersebut merupakan hajat hidup orang banyak). Ditambah lagi dengan kegiatan yang cukup populer dari Jokowi yang disebut namanya dengan "*blusukan*" yang sudah menjadi tradisi Jokowi, semua ini membuat namanya melejit dan populer di tengah masyarakat. Jokowi pun sukses di DKI.

Melihat prestasi Jokowi di DKI yang cukup gemilang ini, PDIP pun kembali ingin memberi tawaran yang lebih besar kepadanya, yaitu Calon Presiden RI. Meski dengan penampilan kesederhanaannya Jokowi mengikuti saja alur perjalanan politik yang dilewatinya, PDIP pun memberi tawaran kepadanya untuk menjadi Calon Presiden RI berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Dengan tetap memperlihatkan penampilan *tawadhu`* yang dimilikinya, Jokowi pun menerima taaran ini. Akhirnya Jokowi bersana JK pun maju dalam pertarungan pilpres ini.

Perpaduan Jokowi-JK ini telah menjadi tim yang tanguh. Keduanya adalah tokoh politik yang luar biasa, Jokowi memiliki karir yang cemerlang dan cepat melejit naik, demikian juga JK sebagai tokoh polotik legendaris, meski dalam usianya yang sudah cukup tua (72 tahun), namun dia masih cukup enernik, pria kelahiran Sulawesi Selatan ini, selain dikenal sebagai pengusaha sukses, namanya telah lama melambung di pentas nasional sebagai wakil presiden 10 tahun lamanya, Ia juga pernah memimpin partai terbesar di negeri ini, yaitu Partai Golkar, dan terakhir dipercaya menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Perpaduan mereka berdua ini memang benar-benar tak tergoyahkan sama sekali, mereka pun sukses pada pilpres tersebut, dan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden priode 2014-2019.

Jokowi menang pada pilpres tersebut meskipun terlebih dahulu terpaksa melewati jalan terjal dan berduri. Jokowi-JK

sukses dalam pilpres 2014 melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kesuksesan itu terpaksa diuji di Mahkamah Konstitusi karena adanya gugatan dari kompetitornya yang tidak menerima hasil pilpres tersebut. Mulai dari penetapan hasil Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum sudah mulai dipersoalkan, hingga di tingkat Mahkamah Konstitusi sebagai tinkat penyelesaian tertinggi dan final, para pesaing tetap gigih untuk berjuang. Ternyata nasib mujur tetap menyertai Jokowi-JK, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan otomatis kemenangan ada di tangan Jokowi-JK. Sukses Jokowi-JK pun diraih.

2. Prabowo Subianto

- Boidata Singkat[4]
  - ➢ Nama Lengkap : Prabowo Subianto Djojohadikusumo
  - ➢ Lahir : 17 Oktober 1951, Jakarta
  - ➢ Agama : Islam
  - ➢ Orang Tua :
    - ✓ Ayah : Prof Soemitro Djojohadikusumo
    - ✓ Ibu : Dora Marie Sigar
  - ➢ Saudara :
    - ✓ Laki-laki : Hashim Djojohadikusumo
    - ✓ Perempuan : Maryani Djojohadikusumo
      : Bianti Djiwandono
  - ➢ Istri : Siti Hediati Hariyadi
  - ➢ Anak : Didit Prabowo
  - ➢ Kekayaan : 1.9 Triliun Rupiah (elhkpn.kpk.go.id, 2018)

[4] https://www.biografiku.com/biografi-prabowo-subianto/

Dalam bentuk narasi, biodata Prabowo Subianto dapat dijelaskan sebagai berikut. Dia lahir di jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Prabowo merupakan anak dari pakar Ekonomi Indonesia yang lahir, hidup dan berkarir pada masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto, yaitu Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Ibunya bernama Dora Marie Sigar yang berasal dari Manado.

Dari segi agama, berdasar informasi yang dilansir oleh Tribunnews.com, Prabowo Subianto mengikuti kepercayaan ayahnya yakni Islam, sementara adik serta kakaknya mengikuti kepercayaan ibunya yang beragama Kristen Protestan dan Katolik.

Dilihat dari silsilah keluarga, Prabowo Subianto juga merupakan cucu dari Pendiri Bank Indonesia dan juga anggota BPUPKI untuk kemerdekaan Indonesia yaitu Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Semasa masih kecil, Prabowo mulai bersekolah di Sekolah Sumbangsih, Jakarta ketika usianya lima tahun. Pada tahun 1957 ketika pemberontakan PRRI pecah, Ayah Prabowo, Prof Soemitro Djojohadikusumo membawa semua keluarganya termasuk prabowo mengungsi ke Padang menumpang pesawat Dakota DC-3.

Dari segi tempat tinggal, dia senantiasa berpindah-pindah. Karena tuntutan kebutuhan hidup orang tuanya senantiasa pindah, maka diapun mengikuti tempat tinggal orang tuanya. Selain pindah ke Padang, orang tuanya juga memboyong keluarganya untuk pindah ke Singapura, maka diapun menetap di sana pada tahun 1958. Pada saat itu Prabowo pun disekolahkan pada British Elementary School, Singapura. Karena gejolak politik yang terjadi di Singapura pada waktu itu maka orang tuanya pun pindah lagi ke Hongkong pada tahun 1962. Di Hongkong ini, Ayahnya mendaftarkan Prabowo beserta saudaranya bersekolah di Glenealy Junior School. Dalam rangka tuntutan profesi orang

tuanya sebagai konsultan ekonomi, maka Prabowo hanya tinggal dua tahun di Hongkong ini, kemudian pindah pula ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Semasa remaja Prabowo Subianto tinggal di Malaysia, dan ia bersekolah di Victoria Institute. Berhubung terjadi konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1963, pada saat itu Prof. Soemitro Djojohadikusumo secara terang-terangan membela Indonesia, bangsanya sendiri walaupun kala itu ia sering berbeda pandangan dengan Penguasa Indonesia Presiden Soekarno. Dalam kesempatan ini maka Prabowo pun beserta keluarganya pindah ke Zurich, Swiss. Di negara tersebut, Prabowo bersekolah di American International School dan mulai belajar bahasa Jerman dan Prancis. Namun belum lama di sana, Pemerintah Swiss mengubah kebijakan suaka politik dari Prof Soemitro Djojohadikusumo dan keluarganya. Akhirnya Prof Soemitro Djojohadikusumo memboyong istri dan anak-anaknya termasuk Prabowo Subianto pindah ke Inggris sebab pemerintah Inggris berkenan memberikan mereka izin tinggal permanen di sana. Prabowo kemudian kembali melanjutkan sekolahnya di American International School hingga tahun 1968. Setelah itu Prabowo kemudian kembali ke Indonesia.

Pada tahun 1970, Prabowo Subianto ingin memulai karirnya dalam bidang militer. Saat itu ia mendaftarkan diri di Akademi Militer Magelang, kemudian ia lulus pada tahun 1974 dari Akademi Militer, lalu pada tahun 1976, ia ditugaskan sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kesusksesannya dalam bidang militer ini sudah mulai terlihat.

Setelah kembali dari Timor Timur, karir militer Prabowo terus melejit. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus).

Setelah menyelesaikan pelatihan "*Special Forces Officer Course*" di *Fort Benning*, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.

Kemudian, Prabowo Subianto menikah dengan Titiek yang merupakan anak Presiden Soeharto. Pernikahan Prabowo dengan titiek berakhir tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dari pernikahannya dengan Titiek, Prabowo dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Didiet Prabowo. Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.

Dalam Biografi Prabowo Subianto diketahui bahwa setelah berhenti berkarier dari dunia Militer, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungannya menjadi seorang Pengusaha mengikuti jejak adiknya yaitu Hashim Djojohadikusumo. Karir Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Perusahaan Kertas yaitu Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Perusahaan Prabowo Subianto tersebut sebelumnya dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto. Selain mengelola Kiani Kertas, yang kini menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.

Setelah sukses menjadi seorang pengusaha, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungan kariernya di bidang politik. Berbekal pengalaman serta reputasinya. Dalam biografinya Prabowo Subianto diketahui pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar 2004. Meski kehadirannya sangat diperhitungkan, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto. Pada tahun 2009, Prabowo Subianto memulai peruntungannya

kembali menjadi Calon Presiden pada pemilu 2009, namun karena Partai Gerindra yang didirikannya belum cukup kuat untuk mengusung calon presiden secara mandiri, akhirnya dia rela menjadi Calon wakil Presiden mendampingi Megawati yang maju menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.

Saat itu Prabowo mendirikan partai bernama Gerindra (gerakan Indonesia Raya) dan menggunakannya sebagai kendaraan politik. Namun hasil pemilihan umum berkata lain, Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang berhasil memenangkan pertarungan menajdi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada pemilu 2014 Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Ia memilih Hatta Rajasa yang berasal dari Partai Amanat Nasional sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dengan dukungan dari beberapa partai yang menjadi koalisinya yang disebut sebagai Koalisi Merah Putih. Namun, pada pilpres 2014 yang lalu, Prabowo Subianto kalah suara dari lawannya yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla.

Kini Prabowo kembali diusung sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2019. Kali ini ia maju bersama dengan calon Wakil Presidennya Sandiaga Uno pada pilpres tahun 2019. Pada kesempatan ini, ia kembali bertemu dengan saingannya pada pilpres 2014 yang lalu, yaitu Joko Widodo yang berpasangan dengan JK. Siapa pemenangnya, berikut ini jawabannya.

C. Hasil

Setelah melewati proses panjang pilpres 2019 tersebut maka hasil akhir menentukan bahwa pemenangnya adalah pasangan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin. Sesuai pengumuman Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Republik Indonesia secara resmi pada hari Selasa dini hari, tangal 21 Mei 2019, setelah berhasil meraih suara terbabanyak 55,50% (85.607.362) suara, sementara untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya meraih 44,50% (68.850.239) suara. Dengan demikian Joko Widodo kembali dinyatakan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya.

Kemenangan pasangan Jokowi Ma`ruf Amin ini tidak secara serta merta disetujui oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan pendukungnya. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengklaim telah menang dan layak dinobatkan menjadi Presiden Indonesia 2019-2024. Dia mengaku, tim internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mencatatkan kemenangan sebesar 62 persen. Dimas, Koordinator Nasional Ruang Sandi mengungkap pihaknya telah bekerja secara simultan dan mendapat form C1 di 20 ribu tempat pemungutan suara (TPS) dengan cara merima dari foto C1 via WhatsApp Kontak Center Ruang Sandi lalu ribuan data tersebut disortir dan diverifikasi yang selanjutnya ditabulasi dan diolah datanya.[5] Dengan demikian suasana pun menjadi agak panas.

Meski sedikit terjadi gesekan antar pengikut dua kubu kandidat capres cawapres, akhirnya persoalan ini dibawa oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan pendukungnya ke Mahkamah Konstitusi. Jakarta, berita CNN Indonesia Kamis, 27/06/2019 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus menolak seluruh permohonan sidang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Majelis hakim konstitusi yang diketuai Anwar Usman menyatakan berdasar Rapat Permusyawaratan Hakim menyimpulkan pokok permohonan Prabowo-Sandi tidak beralasan menurut hukum. “Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon

[5] https://www.liputan6.com/pilpres/read/3988968/3-perubahan-angka-kemenangan-versi-prabowo-dari-62-persen-hingga-52-persen

untuk seluruhnya," demikian putusan MK yang dibacakan Anwar dalam sidang di Gedung MK.[6]

Perhitungan suara manual dan resmi pilpres 2019 oleh KPU tersebut dapat dilihat dalam hitungan sebagai berikut;

Ringkasan hasil pemilihan umum Presiden Indonesia 17 April 2019				
Calon	Pasangan	Koalisi	Suara	%
Joko Widodo	Ma'ruf Amin	Koalisi Indonesia Kerja	85.607.362	55,50
Prabowo Subianto	Sandiaga Uno	Koalisi Indonesia Adil Makmur	68.650.239	44,50
Total			**154.257.601**	**100%**
Suara sah			154.257.601	97,62
Suara tidak sah			3.754.905	2,38
Pemilih pengguna hak pilih			158.012.506	81,97
Pemilih golput			32.757.823	18,03
Pemilih terdaftar			190.770.329	
Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI				

[6] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626160007-12-406648/mk-tolak-gugatan-sengketa-pilpres-prabowo.

Suara menurut wilayah		Joko Widodo Ma'ruf Amin Koalisi Indonesia Kerja		Prabowo Subianto Sandiaga Uno Koalisi Indonesia Adil Makmur		Total suara	Grafik Selisih suara
		Suara	%	Suara	%		
Sumatra	Aceh	404.188	14,41	2.400.746	85,59	2.804.934	
	Sumatra Utara	3.936.515	52,32	3.587.786	47,68	7.524.301	
	Sumatra Barat	407.761	14,08	2.488.733	85,92	2.896.494	
	Riau	1.248.713	38,73	1.975.287	61,27	3.224.000	
	Jambi	859.833	41,68	1.203.025	58,32	2.062.858	
	Sumatra Selatan	1.942.987	40,30	2.877.781	59,70	4.820.768	

	Bengkulu	583.488	49,89	585.999	50,11	1.169.487	
	Lampung	2.853.585	59,34	1.955.689	40,66	4.809.274	
	Bangka Belitung	495.729	63,23	288.235	36,77	783.964	
	Kepulauan Riau	550.692	54,19	465.511	45,81	1.016.203	
Jawa	**Banten**	2.537.524	38,46	4.059.514	61,54	6.597.038	
	DKI Jakarta	3.279.547	51,68	3.066.137	48,32	6.345.684	
	Jawa Barat	10.750.568	40,07	16.077.446	59,93	26.828.014	
	Jawa Tengah	16.825.511	77,29	4.944.447	22,71	21.769.958	

	Yogyakarta	1.655.174	69,03	742.481	30,97	2.397.655	
	Jawa Timur	16.231.668	65,79	8.441.247	34,21	24.672.915	
Sunda Kecil	**Bali**	2.351.057	91,68	213.415	8,32	2.564.472	
	Nusa Tenggara Barat	951.242	32,11	2.011.319	67,89	2.962.561	
	Nusa Tenggara Timur	2.368.982	88,57	305.587	11,43	2.674.569	
Kalimantan	**Kalimantan Barat**	1.709.896	57,50	1.263.757	42,50	2.973.653	
	Kalimantan Tengah	830.948	60,74	537.138	39,26	1.368.086	
	Kalimantan Selatan	823.939	35,92	1.470.163	64,08	2.294.102	

	Kalimantan Timur	1.094.845	55,71	870.443	44,29	1.965.288	
	Kalimantan Utara	248.239	70,04	106.162	29,96	354.401	
Sulawesi	**Sulawesi Utara**	1.220.524	77,24	359.685	22,76	1.580.209	
	Gorontalo	369.803	51,73	345.129	48,27	714.932	
	Sulawesi Tengah	914.588	56,41	706.654	43,59	1.621.242	
	Sulawesi Tenggara	555.664	39,75	842.117	60,25	1.397.781	
	Sulawesi Barat	475.312	64,32	263.620	35,68	738.932	
	Sulawesi Selatan	2.117.591	42,98	2.809.393	57,02	4.926.984	

Maluku	**Maluku**	599.4 57	60, 40	392.9 40	39, 60	992.3 97	
	Maluku Utara	310.5 48	47, 39	344.8 23	52, 61	655.3 71	
Papua	**Papua**	3.021. 713	90, 66	311.3 52	9,3 4	3.333. 065	
	Papua Barat	508.9 97	79, 81	128.7 32	20, 19	637.7 29	
Luar negeri		570.5 34	73, 31	207.7 46	26, 69	778.2 80	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

BAB III

TINJAUAN ISLAM TENTANG PEMIMPIN

A. Keutamaan Pemimpin

Keistimewaan pemimpin ini bisa dilihat pada beberapa hal, di antaranya sebagai berikut;

1. Dipatuhi dan diperderetkan dengan Allah dan Rasulnya

   Hal ini sejalan dengan kandungan QS al-Nisa` ayat 59 yang berbunyi;

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

   Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah (taatlah) kamu kepada Allah, dan patuhlah kamu kepada Rasul, dan para pemimpin-pemimpin kamu.

   Ubai mengataka*n bahwa ulil amri pada ayat ini adalah al-salathin (para pemimpin), yaitu jamak dari* sulthan (pemimpin).[1]

   Ibn Katsir mengatakan bahwa ulil amri itu mengandung makna beberapa pengertian, di antaranya; 1). Ahli fikih dan agama (menurut Abi Thalhah dan Ibn Abbas), 2). Ulama (menurut Mujahid, Atha`, al-Hasan al-Basyri, dan Abu al-`Aliyah), 3). Umara` atau para pemimpin (menurut pemahaman lahiriyah ayat).[2] Jelas bahwa ulil amri ini adalah pihak yang didengar dan diikuti perkataanntya.

---

[1] Al-Suyuthi, *Dur al-Mantsur fi al-Ta`wil bi al-Ma`tsur*, jus.3, hlm. 152.

[2] Ibn Katsir, Tafsir Alqur`an al-`Azim, (1420 H./ 1999 M., Dar al-Thoybah li al-Nasyar wa al-Tauzi`, Cet. Ke-2, juz.2, hlm. 345.

Imam al-Sanqithi memberi penjelasan dengan ulil amri pada ayat ini adalah perpaduan antara penguasa (umara) dengan ulama. Dalam perpaduan ini maka ulama bertindak untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan RasulNya, sedangkan penguasa bertindak untuk melaksanakan (mengeksekusi) kebijakan yang diambil.

Taat kepada Allah dan RasulNya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Taat kepada keduanya tidak boleh ada keraguan sama sekali, karena sesuatu yang datang dari keduanya, yaitu Alqur`an dan al_hadis adalah kebenaran mutlak, yang tidak mungkin dan tidak akan tersalah. Alqur`an dan al-Hadis adalah sumber dari segala sumber yang paling utama dalam Islam.

Ketaatan terhadap pemimpin tidaklah bersifat mutlak. Ulil amri harus ditaati di saat perintahnya itu dalam rangka taat kepada Allah dan RasulNya. Ulil amri itu bisa saja salah atau tersalah, karenanya di saat perintahnya menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya maka ulil amri itu tidak boleh ditaati. Dalam hal ini ketaatan terhadap ulil amri harus bersifat selektif.

Eksistensi Penguasa ini menjadi istimewa karena diperderetkan dengan Allah dan Rasulnya. Keutamaan ini terlihat pada kedudukanya di posisi ketiga untuk ditaati setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul maka disebutlah Pemimpin. Meskipun penyebutan kata Pemimpin tidak didahului oleh kata ketaatan, tetapi dalam kaidah bahasa Arab ketaatan terhadap Pemimpin/ Penguasa itu juga harus dilakukan karena posisinya di sana sebagai *`atab*, yaitu yang dipersamakan dengan sebelumnya. Penyertaan kata ketaatan pada Allah dan juga Rasul dipahami sebagai ketaatan mutlak, sementara ketaatan kepada Pemimpin/ Penguasa itu tentatif sifatnya, yaitu selama tidak mengganggu ketaatan kepada Allah dan RasulNya.

2. Perwakilan Tuhan di Bumi

Eksistensi Penguasa itu disebut sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah yang mengatakan;

السُّلْطَانُ ظِلُّ الله فِي الأَرْضِ

Artinya; Penguasa itu adalah bayang-bayang Allah di bumi.

Untuk hal ini Imam al-Razi mengatakan; Maka sesungguhnya bayangan itu adalah gambaran yang terjadi di sore hari, di sana ada bayang-bayang. Hal ini adalah kinayah tentang luar biasanya kebesaran dari bayang-bayang di petang hari itu, dan ini menggambarkan ketinggian.[3]

Abdul Rauf al-Manawi mengatakan; Sebagaimana halnya Penguasa menghindari kesulitan yang terjadi terhadap umatnya maka demikian pulalah halnya dengan bayang-bayang menghidarai kepanasan dari orang yang berlindung disebelahnya.[4] Ada kesejalanan antara perlindungan yang diberikan oleh Penguasa dengan bayang-bayang dalam rangka menghindari kesulitan mereka.

3. Dapat Naungan Di sisi Allah

Hal ini sejalan dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Mukhari, Muslim, Malik, dan yang lainnya, dari Abi Hurairah, Rasul bersabda;[5]

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ ...

Artinya; Ada tujuh kelompok orang yang mendapat naungan di sisi Allah pada saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naunganNya, yaitu; Pemimpin yang adil, ….

[3] Al-Razi, *Tafsir al-Fakhrur al-Razi*, juz.5, hlm. 242.

[4] Abdul Rauf al-Manawi, *Al-Taisir bi Syarah al-Jami`u al-Shagir*, Juz.2, hlm. 138.

[5] Ibn al-Milqan, *al-Taudhih li Syarah al-Jami`u al-Shahih*, (Damsik: 1429 H./ 2008 M., Dar al-Nawadhir, cet. Ke-1, juz.6), hlm.443.

Imam al-Nawawi memberi penjelasan tentang keadaan ini adalah suasan di akhirat nanti. Dalam ungkapannya dia mengatakan; Yang dimaksud dengan naungan di sini adalah naungan `arasy, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh hadis lain. Hari yang dimaksud pada hadis ini adalah hari kiamat, saat itu seluruh manusia telah berdiri untuk menghadap Tuhannya, dan matahari terasa dekat dengan mereka, sehingga panasnya luar biasa, dan mereka bermandikan keringat, saat ini tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan `arasy tersebut, maka salah seorang yang memperoleh naungan itu adalah pemimpin yang adil.[6]

Pemimpin yang adil itu dapat keistimewaan di sisi Allah. Pertama; Terilustrasi bagi kita bahwa suasana ini adalah saat di Padang Mahsyar nantinya, ketika itu terik matahari terasa luar biasa panasnya sehingga semua orang membutuhkan tempat bernaung, padahal tidak ada tempat bernaung sama sekali kecuali naungan Allah Swt. Pada naungan ini hanya ada tujuh orang yang bisa ikut berteduh, maka salah seorang dari mereka adalah pemimpin yang adil., Kedua; Dari tujuh orang yang daat naungan itu maka yang pertama disebut adalah pemimpin yang adil. Sungguh luar biasa perhatian Allah Swt. terhadap pemimpin yang adil ini.

4. Do`anya mustajab

Hal ini sejalan dengan hadis Rasul, lewat riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abi Hurairah, rasul bersabda;[7]

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم

[6] Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj*, (Beirut: 1392 H., Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, cet.-2, juz.7), hlm.120.

[7] Ahmad bin Abdurrahman, *al-Fath al-Rabbani li Tartibi Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Ttp., Dar Ihya al-Turats al-`Arabi, cet.ke-2, juz.19), hlm.237.

Artinya; Ada tiga macam orang yang do`anya tidak ditolak oleh Allah Swt., yaitu; 1). Pemimpin yang adil, 2). Orang yang sedang puasa sampai dia berbuka, 3). Orang yang terzalimi.

Dalam hadis ini pemimpin yang adil tetap ditempatkan sebagai orang yang istimewa. Dari hanya tiga orang yang tidak ditolak oleh Allah Swt. do`anya, maka orang pertama dari mereka itu adalah pemimpin yang adil. Meskipun pada beberapa hadis riwayat lain, pemimpin yang adil ini disebutkan pada nomor urut 2 (dua), namun dia tetap istmewa karena telah menjadi pilihan Allah Swt.

5. Rasul Saw. Menjamin Mereka Sebagai Ahli Surga

Hal ini sejalan dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ima Muslim, dan dinyatakan sebagai hadis shahih, Rasul bersabda;[8]

أَهلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلطَانٍ مُقسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ۞ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلبِ لِكُلِّ ذِى قُربَى وَمُسلِمٍ۞ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

Artinya; Ahli surga itu ada tiga macam orang, yaitu; 1). Pemimpin yang adil yang memperoleh petunjuk dari Allah Swt, dan yang mendapat taufik, 2). Seorang yang kasih sayang, berlaku lemah lembut bagi setiap karib kerabat dan orang Islam lainnya, 3). Seorang miskin yang berkeluarga dan menjaga kehormatan dirinya.

B. Kerusakan Pemimpin

1. Pemimpin yang zalim

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubaidullah bin Ziyad, Abi al-Ashab, Ja`far bin Hyyan al-`Atharidi al-Basri al-Hiza al-A`ma, dari al-Hasan bahwa Abdullah bin

[8] Al-Qurtubi, *al-Mufham lima Askala min Talkhis Kitab Muslim*, (Beirut: 1417 H./ 1996 M., Dar Ibn Katsir, cet. Ke-1, juz.7), hlm. 165.

Ziyad sewaktu dia kembali dari berziarah kepada Ma`qal yang sedang sakit, lalu Ma`qal berkata kepadanya, saya mendengar Raslullah Saw. bersabda;[9]

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهْوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ

Artinya; Tidak ada seorang pemimpin yang melaksanakan kepemimpinan karena diangkat oleh umat Islam, sampai mati dia masih menipu mereka (umat Islam), kecuali Allah Swt. mengharamkannya masuk sorga.

Dalam tujuan yang sama, namun datang dalam redaksi yang berbeda, Ma`qal mengatakan, bahwa Rasul bersada *"... tidak akan mencium harumnya sorga"*. Ini artinya ada beberapa riwayat hadis yang bersumber dari Ma`qal, namun tetap dalam pesan yang sama. Antara satu hadis dengan hadis lain saling menguatkan, sehingga keyakinan kita terhadap eksistensi hadis tersebut menjadi lebih kokoh.

Imam al-Harwi mengatakan bahwa maksud merampas dalam hadis ini adalah bersifat umum. Bukan hanya mengambil harta umat Islam padahal itu bukan sesuatu yang menjadi kewajiban mereka, tetapi juga termasuk terhadap tindakan tidak menyalurkan sesuatu yang menjadi hak mereka.

Ulama ahli sunnah wal-jama`ah berpendapat bahwa pesan hadis ini adalah bagi mereka yang menzalimi rakyatnya sampai dia wafat dan tidak memperoleh keridhaan Allah Swt. Kesuksesan dan kegagalan seseorang sangat banyak ditentukan oleh kehendak dan keridhaan Allah Swt., bagi mereka yang sempat bertaubat dan Allah mengampuninya maka selamatlah dia, tetapi jika Allah tidak suka kepadanya maka berlakulah janji Allah tentang diharamkan baginya masuk sorga. Karenanya perlu

[9] Ibn Baththal, *Syarah Shahih al-Bukhari*, (1423 H./ 2003 M., Maktabah al-Rusydi, Cet. Ke-2, Juz.8), hlm.219.

mencari keridhoan Allah, karena sesungguhnya yang menentukan seseorang masuk sorga atau tidak adalah lebih banyak ditentukan oleh keridhaan Allah.

Hadis ini adalah hadis yang agung karena menjadi peringatan bagi penguasa supaya berlaku adil dalam kekuasaannya. Intinya, hindari dari dari berbuat zalim terhadap rakyat yang dipimpim lewat kekuasaan yang dimilikinya, dan jika telanjur salah maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah, semoga taubatnya masih sempat diterima Allah Swt. sebelum ajal tiba.

Hadis lain datang dalam riwayat Imam Abu Dawud, dari al-Azdi, dia berkata; aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda;[10]

مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ۞ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ۞ احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya; Siapa saja orang yang diberi Allah tugas kepemimpinan untuk mengurus kebutuhan umat Islam, lalu dia bersembunyi di balik hajat, kekurangan dan kefakiran mereka, maka Allah juga akan bersembunyi dibalik hajat, kekurangan, dan kefakirannya di hari kiamat.

2. Pemimpin Otoriter

Hadis riwayat Imam Ahmad dan Turmuzi, dari Abu Hurairah, Rasul bersabda;

... وإنى لأعلم أول ثلاثة يدخلون النار: سلطان متسلط۞ وذو ثروة من مال لا يؤدى حقه۞ وفقير فخور.

Artinya; … dan aku adalah orang yang paling tahu tentang tiga macam orang yang pertama masuk neraka, yaitu; Penguasa

[10] Al-Maqdisi al-Ramli al-Syafi`I, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (Mesir:1437 H./ 2016 M., cet. Ke-1, Juz.12), hlm.565.

(Sulthan) yang otoriter, orang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya, dan orang fakir yang sombong.[11]

Kata otoriter (mutasallith) dalam hadis ini dapat diberi penjelasan sebagai berikut;

(جبار) أى متسلط متكبر

Artinya; (Maha Perkasa) itu adalah perpaduan sifat otoriter dan sombong.

Dari segi kajian pemaknaan kata, otoriter *(mutasallit)* itu adalah masuk pada pemaknaan kata *"jabbar"*. Abu Mujahid Abdul `Aziz mengatakan otoriter atau mutasallit itu adalah kata sifat dari kata yang terdapat sebelumnya, dalam hal ini adalah "Penguasa". Kata sifit ini adalah sebagian dari makna kata *"jabbar"*, yaitu gagah perkasa. Dia mengartikan *"jabbar"* (gagah perkasa itu dengan otoriter dan sombong. Ini adalah salah satu sifat Tuhan, di mana Dia dapat memaksakan kehendakNya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia juga adalah pihak yang berada di atas semuanya (paling agung). Dengan demikian kata otoriter *(mutasallit)* itu adalah bagian dari sifat egoisme *(ananiyah)*, yang tidak pantas dimiliki oleh manusia apalagi Penguasa.

Penggunaan kata "Penguasa" itu memang mengandung makna kemampuan untuk melaksanakan seseuatu. Penguasa berasal dari kata kuasa, yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Tidak heran kalau dikatakan bahwa "Penguasa" itu adalah *zillu Allah fi al-ardhi* (bayang-bayang Tuhan di bumi). Dia memiliki kemampuan untuk mengatur umatnya dalam rangka menerapkan pesan syari`at di bumi. Kemampuan yang dimilikinya inilah yang membuat dia disebut dengan Penguasa.

---

[11] Hadis ini dinyatakan sebagai hadis hasan., lihat, Al-Sa`ati, *al-Fatah al-Ribani litartibi Musnal al-Ima Ahmad ibn Hnabal*, (Dar Ihya`I al-Turats al-`Arabi, cet. Ke-2, juz.24), hlm.159.

Penguasa (sulthan) ini bukanlah menentukan sendiri keinginannya untuk diterapkan kepada umat, tetapi dalam rangka menjalankan titah Allah di bumi. Pihak yang paling berkuasa itu adalah Allah Swt., jadi kalau seseorang menjadi Penguasa berarti Allah Swt telah memberikan sebagian kecil dari kekuasaan kepadanya untuk menjalankan titahNya, bukan untuk membuat sendiri aturan pribadi di luar hukum Tuhan yang akan dijalankan secara otoriter. Konsistensi dalam menjalankan hukum Tuhan tidak termasuk dalam pemaknaan otoriter yang dimaksud dalam hadis ini, tetapi cenderung memaksakan sendiri aturan hukum yang dibuatnya walau bertentangan dengan hukum Tuhan. Ciri khas dari otoriter dalam hadis ini adalah memperlihatkan arogansi seseorang untuk melaksanakan sendiri aturannya di luar aturan hukum Tuhan yang telah disampaikan lewat risalah kenabian.

Penguasa yang baik adalah Penguasa yang rendah hati. Hal ini adalah persoalan adab, yaitu diperlukan cara-cara yang baik untuk menjamin terlaksananya hukum-hukum Allah Swt. di bumi. Hukum Tuhan harus tetap dapat dilaksanakan walau dalam situasi dan kondisi bagaimana pun juga adanya, tetapi harus memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhannya untuk dapat dilaksanakan dengan tidak menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Dalam hal ini diperlukan sifat *tawadhu`* (rendah hati) dan *hikmah* (bijaksana).

3. Pemimpin Bodoh

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa`i dan Ahmad ibn Hanbal, dari Jabir bin Abdullah, Rasul Saw. berkata kepada Ka`ab bin `Ujrah;[12]

أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِى لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ

[12] *Ibid*., juz, 24, hlm.26.

بِكَذِبِهِمِ وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا منى

Artinya; Berlindunglah engkau dari Penguasa yang bodoh, dia bertanya; Siapakah penguasa yang bodoh itu?, Rasul menjawab; Penguasa yang bodoh itu adalah Penguasa yang datang sesudahku, dia tidak mempedomani petunjukku, dan tidak mengikuti sunnahku, siapa orang yang membenarkan kebohongan mereka, dan menolong kezaliman mereka maka mereka itu bukan golonganku.

Pemimpin yang bodoh dalam hadis ini terlihat digambarkan Rasul bukanlah karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tetapi yang kurang kesadarannya. Boleh jadi dia paham dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh Rasul, dan juga boleh jadi dia banyak mengetahui sunnah yang dilakukan oleh Rasul, namun semua itu tidak dipedomani dan dilaksanakannya karena ada intres tertentu yang menjadi tujuan dan perhatiananya.

C. Mengangkat Pemimpin

Pemimpin adalah sosok insan terbaik yang muncul dari komunitas mereka sendiri. Paling tidak, dia dipandang istimewa karena umat telah membaiatnya dan memberi kepercyaan kepadanya untuk mengurusi dan menyelesaikan masalah keumatan mereka. Boleh jadi *leadershi*p, manejerial, dedikasi dan amanahnya telah teruji dan diapresiasi oleh banyak orang sehingga dia dipercaya untuk mengemban tugas itu. Pemimpin itu menjadi pilihan karena dia bukan hanya mampu mengurusi dirinya sendiri tetapi juga mengurusi orang banyak.

Di saat pemimpin itu dipandang sebagai orang yang istimewa karena memiliki kewenangan yang luas untuk merekayasa kepentingan keumatan maka Islam memandang penting untuk menominasikan orang-orang tertentu yang dapat diajukan untuk mengemban amanah tersebut. Mereka itu dinominasikan paling tidak dengan menyaring beberapa unsur, di antaranya;

1. Islam

Aspek seagama, yaitu Islam menjadi unsur penting untuk dipandang layak diangkat menjadi pemimpin bagi umat Islam. Hal ini sejalan dengan maksud QS ali Imran ayat 28 berbunyi;

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya; Janganlah orang beriman itu memilih orang kafir menjadi wali bagi mereka dengan mengenyampingkan orang-orang yang beriman, siapa saja yang melakukan hal yang demikian maka dia tidak mendapat pertolongan dari Allah sama sekali, kecuali bagi mereka yang bersiasat karena ketakutan (menyembunyikan keimanan untuk membela diri alias ber*taqiyah*), dan Allah memperingatkan kepada kamu tentang kebesaran Allah, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali.

Alqur`an dan Terjemahnya oleh Departemen Agama RI., menyatakan bahwa “wali” pada ayat ini memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu; 1). teman yang akrab, 2). Pemimpin, 3). Pelindung atau penolong.[13]

Sedang tafsir Ibn Katsir mengartikan wali itu dengan; berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, menjadikan mereka sebagai penasihat, dan memiliki ikatan batin dan kasih sayang dengan mereka, membongkar rahasia umat Islam kepada mereka.[14]

Sebab turun ayat ini adalah pada peristiwa tertentu. Ibn Abbas mengatakan bahwa al-Hajjaj ibn Umar mewakali Ka`ab ibn al-Ashraf, ketika itu Ibn Abi al-Haqiq dan Qais ibn Zaid (keduanya adalah tokoh Yahudi) sudah berhasil memikat

---

[13] Departemen Agama RI., Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Sewmarang: 1989, Edisi Baru, Revisi Terjemah 1989), hlm.80.

[14] Ibn Katsir*, Tafsir Alqur`an al-`Azim*,(Ttp.: 1420 H./ 1990 M., Dar Tayibah li al-Nasyar wa al-Tauzi`, Cet. Ke-2, Juz.2), hlm.441.

sekelompok golongan Anshar untuk memfitnah mereka tentang agamanya, maka Rifa`ah ibn Munzir ibn Zubair dan Abdullah ibn Jubair, dan Sa`ad ibn Khoistamah memperingatkan mereka seraya berkata; Jauhilah oleh kamu orang Yahudi itu, nanti suatu ketika kamu akan bisa terperdaya oleh mereka sehingga kamu menjadi jauh dari agamamu, maka mereka membantah (menolak) untuk tetap dekat dan bersama dengan mereka, maka Allah Swt. menurunkan ayat tersebut.[15]

2. Tidak Lemah

Tidak boleh mengangkat pemimpin yang lemah. Di samping menyulitkan dirinya sendiri, juga akan dapat mecelakakan umat Islam secara keseluruhan. Orang seperti ini tidak boleh disuruh untuk memangku jabatan, karena akan memikul beban berat yang berada di luar batas kemampuannya.

Hal ini sejalan dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukharhi dan Muslim (*muttafaq `alaih*), dan ulama hadis lainnya, dari Abu Zar al-Ghifari, dia berkata, Aku berkata kepada Rasulullah Saw.; Tidakkah ada keinginanmu untuk mangangkatku menjadi pejabat ya Rasulullah?, Rasul memukul bahuku dengan tangannya seranga ngomong;

يا أَبَا ذَرٍّ ◉ إِنَّكَ ضَعيفٌ ◉ وإِنَّها أَمَانَةٌ ◉ وإنها يومَ القيامةِ خِزىٌ
وَنَدَامَةٌ ◉ إلا مَنْ أَخذَها بِحَقِّها ◉ وَأَدَّى الَّذِى عليه فِيهَا

Artinya; Ya Abu Zar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah, sementara jabatan itu adalah amanah, dan amanah itu nanti di hari kiamat akan dipertanggung-jawabkan, lalu menjadi duka cita dan penyesalan, kecuali bagi orang yang pantas untuk mendudukinya, dan dapat menunaikan sesuai dengan kemestiannya.

[15] Al-Thabari, *Jami`u al-Bayan fi Ta`wil al-Qur`an*, (Ttp.: 1420 H./ 2000 M., Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-1, Juz.6), hlm. 313.

Di dalam kitab Tarjamah oleh Abi Salim ibn Syufyan bin Hani al-Jaisyani dari Abi Zar sendiri yang menyampaikan, dari beberapa orang yang menginformasikan sejalan dengan hal itu, bahwa Rasulullah[16] Saw. berkata kepadanya; Hai Abu Zar, menurut pengamatanku Engkau ini adalah orang lemah, demi sesungguhnya saya sangat sayang kepadamu, saya menyayangimu seperti menyayangi diriku sendiri. Aku mengingatkan untuk tidak menyuruh orang lemah pada dua hal, yaitu; untuk memangku jabatan, dan memelihara harta anak yatim.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abi Hurairah, Rasul Saw.[17] bersabda;

الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

Artinya; Mukmin (orang beriman) yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Swt. ketimbang mukmin yang lemah.

Kuat yang dimaksud pada hadis ini bukanlah semata-mata kuat fisik, tetapi lebih pada kekuatan psikis. Ada beberapa ulama yang menjelaskan hadis tersebut, kemudian mengemukakan pendapatnya, di antaranya;

a) Imam al-Qurtubi[18]

Dalam ungkapannya , dia menyebutkan; Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat badannya, dan tangguh jiwanya, tekadnya membaja, dianya layak untuk menegakkan aturan-aturan ibadah, seperti; puasa, haji, jihad, *amru bi al-ma`ruf* dan *nahi `anil munkar*, serta tabah dalam menghadapi

[16] Muhamad ibn Futuh al-Hamidi, *al-Jam`u Baina al-Shahihain*, (Beirut: 1423 H,. 2002 M., Dar al-Nasyar, Cet. Ke-2, Juz.1), hlm.159.

[17] Muhammad Amin bin Abdullah al-Army, al-Kaukab al-Wahhab wa al-Raud al-Bahhaj fi Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj, (Makkah al-Mukarromah: 1430 H./ 2009 M., Dar al-Minhaj, Cet. Ke-1, Juz. 24), hlm.577.

[18] Muhammad bin Ali, *Masyarik al-Anwar al-Wahhajah wa Mathali` al-Asrar al-Bahajah fi Syarah Sunan al-Imam ibn Majah*, (Riyad: 1427 H./ 2006 M., Dar al-Mughni, Cet. Ke-1, Juz.2), hlm.476.

penderitaan yang menimpanya, juga hal-hal lain dalam urusan menegakkan agama, dan menggerakkan suara umat Islam.

b) Al-Nawawi; [19]

Sesungguhnya yang dimaksud dengan kuat pada hadis tersebut adalah kekuatan tekad (prinsip), dan kesiapan berdarah-darah untuk urusan akhirat, maka jadilah orang dengan sifat seperti ini pada umumnya akan tampil di depan untuk menghalau musuh-musuh Allah, dan memiliki tekad yang tak bergeming dalam rangka menegakkan *amar bi al-ma`ruf dan nahi `an al-munkar* (menyuruh orang berbuat baik dan melarang mereka dari kedurjanaan).

3. Memiliki niat yang baik

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Musa, dia mengatakan;[20]

سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ۞ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً ۞ وَيُقَاتِلُ رِياءً ۞ أَىُّ ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللهِ ۞ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِىَ العُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ

Artinya; Rasul saw. ditanya orang tentang keadaan orang yang berperang (jihad) dengan niat ingin memperlihatkan keberanian, dan ada pula orang yang berperang (jihad) ingin pamer, dan ada pula yang berperang (jihad) ingin memperlihatkan perjuangannya kepada orang lain, manakah di antara mereka yang berada di jalan Allah?, maka Rasul Saw. menjawab; siapa orang yang berperang dalam rangka meninggikan kamatullah maka dialah yang sebenarnya berada di jalan Allah.

[19] Muhammad bin Ismail bin Shalah, *al-Tanwir Syarah al-Jami`u al-Shaghir*, (Riyad: 1432 H./ 2011 M., Maktabah Dar al-Salam, Cet. Ke-1, Juz.4), hlm. 353.

[20] Abu al-Fadhil, Ikmal al-Muklim bi Fawaid al-Muslim, (1419 H./ 1998 M., Daar al-Wafa li al-Thaba`ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi`, Cet. Ke-1, Juz.6), hlm.327.

Imam al-Qusyairi mengatakan bahwa hdis ini menjadi dalil terhadap kemestin berniat ikhlas pada jihad fisabilillah, sekaligus mempertegas tentang berjihad karena mempertunjukkan keberanian kepada manusia, pamer dan riya tidak termasuk dalam keikhlasan. Riya itu bertentangan dengan substansi ikhlas. Karenanya, antara riya dengan ikhlas itu tidak mungkin bersatu pada satu niat dalam waktu tertentu, yaitu antara berperang melawan orang kafir karena Allah Swt., dan juga karena manusia.

Orang yang berperang karena ingin memperlihatkan keberanian itu ada tiga macam, yaitu; 1). Rusaknya kegiatan ini terletak pada tujuan (niat) berperang itu sendiri, yaitu dilakukan bukan karena Allah, akan tetapi untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa dia adalah seorang yang pemberani, maka hal ini jelas menghilangkan keikhlasan., 2). Rusaknya kegiatan ini karena bentuk peperangan yang dilakukan, yaitu tidak termasuk dalam perang yang diperbolehkan dalam Islam. Tujuan perang yang sesungguhnya adalah untuk mengagungkan Allah, mencegah kebakhilan dan penyiksaan terhadap makhlukNya semata. Karenanya tidak boleh dilakukan dalam rangka menagih sesuatu dari orang lain, dan mencelakakan seseorang yang tidak termasuk sasaran perang. Keberanian itu bukan dalam rangka gagah-gagahan dilihat orang meskipun dengan cara melakukan perbuatan yang salah., 3). Rusaknya kegiatan ini kerena sifat pemberaninya semata, jadi dia berperang karena sifat pemberani yang ada pada dirinya, bukan karena Allah, dan meninggikan agama Allah.[21]

4. Tidak Meminta Jabatan

Rasulullah Saw. tidak memperkenankan orang untuk meraih jabatan dengan cara meminta-mita. Hal ini tersirat dari sabda beliau lewat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari,

[21] Al-Qusyairi, *Ihkam al-ahkam Syarah `Umdat al-akam*, (Madinah: 1426 H./ 2005 M., Maktabah al-Madinah al-Rokmiah, cet. Ke-1, jus 1), hl. 502.

Muslim, Ahmad, Abu Daud, Imam al-Nasa`i, dan yang lainnya, dari Abu Musa al-As`ari, lalu dia berkata;

دخلت على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنا ورجلان من بني عمي فَقَالَ أَحدهمَا يَا رَسُول الله أمرنَا على بعض مَا ولاك الله وَقَالَ الآخر مثل ذَلِك فَقَالَ إِنَّا وَالله لَا نولي هَذَا الْعَمَل أحدا سَأَلَهُ أَو أحدا حرص عَلَيْهِ

Artinya; Saya dan dua orang dari anak pamanku menjumpai Rasul Saw., maka salah seorang di antara mereka berucap; Ya Rasulullah, angkatlah kami menjadi pejabat (pemimpin) pada sebagian daerah kekuasaanmu yang telah dianugerahkan Alah kepadamu, dan anak pamanku yang satu lagi pun berucap pula dalam permintaan yang sama, maka Rasul bersabda; Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan mengangkat seseorang menjadi pejabat (pemimpin) atas dasar permintaannya, atau atas dasar kerakusannya.

Imam `Izzuddin mengatakan bahwa larangan meminta jabatan itu adalah berupa peringatan yang sangat keras. Hadis tersebut memperlihatkan bahwa Rasul bersumpah untuk tidak mengangkat orang yang meminta jabatan. Hal ini menjadi dalil tentang haramnya mengangkat pejabat karena permintaan, bukan karena keahlian, dan keharaman ini dapat ditangkap secara jelas dari kerasnya sikap Rasul secara zahir untuk tidak berkenan mengangkat mereka yang meminta kekuasaan tersebut untuk menjadi pejabat.[22]

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai hadis shahih, dari Abdurahman bin Tsamurah, dia berkata, Rasululah Saw. bersabda yang khitabnya kepadanya;[23]

يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ◉ لا تَسْأَلِ الإمَارَةَ ◉ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ

[22] `Izzuddin, *al-Tahbir li Idhah Ma`ani al-Taisir*, (Riyad mamlakah al-`Arabiyah al-Syu`udiyah: 1433 H./ 2012 M., Maktabah al-Rusydi, cet. Ke-1, juz.3), hlm.730.

[23] Ibn Baththal, *Syarah Shahih al-Bukhari*, (Riyad: 1423 H./ 2003 M., Maktab al-Rusydi, cet. Ke-2, juz.6), hlm.88.

وُكِلْتَ إِلَيْهَا ۞ وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

Artinya; Wahai Abdurrahman, jangan engkau meminta jabatan. Demi sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena telah memintanya maka engkau akan celaka dalam jabatan itu, tapi sebaliknya jika engkau diberi jabatan bukan karena engkau memintanya, niscaya engkau akan ditolong dalam jabatan itu.

Al-Mihlab mengatakan; hadis ini menjadi dalil tentang jika seorang disibukkan dengan tugas yang diperoleh dengan cara memintanya, lalu dia bekerja di situ maka akan dihinakan dalam situasi menurut biasanya, karena orang yang meminta jabatan itu tidak memintanya kecuali dia melihat bahwa dia ahli tentang tugas itu, maka sesungguhnya Rasul telah mengatakan bahwa dia akan celaka dalam tugas itu, artinya dia tidak ditolong dengan pemberian jabatan itu, dan senantiasalah dia dekat kepada kehinaan. Sebaliknya, jika seseorang diajak untuk memangku jabatan atau kepemimpinan sesuai dengan aturan agama maka dia mengendalikan dirinya dari pemberian tersebut, Allah akan memberinya kemudahan (*ma`unah*). Hal ini didasarkan pada; Orang yang *tawadhu`* (rendah hati) karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya.[24]

Pemimpin ideal sesungguhnya akan tersaring secara alamiah. Kelayakan seseorang untuk menjadi pemimpin sangat ditentukan oleh kapasitas dirinya sendiri. Keunggulan itu di satu sisi tidak perlu dipermaklumkan ke publik, sebagaimana halnya kelemahan itu di sisi yang lain tidak perlu disembunyikan juga dari publik, semua itu akan terekam dalam sejarah perjalanan hidup kita dalam memori pengenalan orang banyak. Inilah yang akan bercerita, tidak lewat kata-kata dan huruf-huruf yang tercetak dalam berbagai literatut, tetapi dalam memori umat.

Jabatan itu tidak untuk diminta, tapi untuk dipersiapkan. Meminta jabatan dengan tanpa mempertimbangkan kemampuan

[24] Ibn Baththal, juz.8, hlm.217.

orang yang akan menjabat tersebut maka hal itu bisa berakibat fatal terhadap dirinya sendiri, dan juga terhadap pemenuhan kebutuhan umat yang mejadi aspek sasarannya. Sebaliknya, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang unggul sehingga layak dan mampu mengemban jabatan tertentu akan membuka peluang baginya untuk mendapatkan hal itu. Jabatan yang diraih karena spek profesionalitas itu pastilah akan mendatangkan kebaikan yang lebih luas.

D. Berdo`a Untuk Pemimpin

Tulisan ini diawali dengan ungkapan menyentak yang disampaikan Ibn Taimiyah dengan mengutif pernyataan "al-Fudhail ibn `Iyadh", pada kitabnya "*al-Khulashah fi Bayani Ra`yu Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah bi al-Rawafidh*" yang mengatakan;[25]

لو أنّ لى دعوة مستجابة ما جعلتها إلا فى إمام ۞ فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد ۞ وهذا الذى استقرت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة

Artinya; Seandainya aku diberi doa mustajab tidak aku arahkan doa itu kecuali untuk penguasa (Presiden). Bagusnya Penguasa menentukan bagusnya negara dan warganya. Inilah pendirian kokoh yang sudah dipancangkan oleh ulama Ahli Sunnah Waljamaah dalam berakidah.

Al-Qahthani memberi penjelasan tentang ungkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa al-Fudhail ditanya orang tentang apa maksud pernyataannya yang menempatkan do`a terhadap Pemimpin itu demikian penting, lalu al-Fudhail menambahkan penjelasannya dengan ungkapan;[26]

إذا جعلتُها فى نفسى لم تَعْدُنى۞ وإذا جعلتُها فى السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد

[25] Ibn Taimiyah, *al-Khulashah fi Bayani Ra`yu Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah bi al-Rawafidh,* (Ttp., tt., Juz.1), hlm.151.

[26] Al-Qahthani, *`Aqidah Muslim fi Dhu`i al-Kitab wa al-Sunnah*, (Riyad: tt., Maba`ah Sufair, Juz.1), hlm.148.

Artinya; Seandainya aku mengarahkan do`a itu untuk kepentingan diriku sendiri maka tidak akan ada apa-apanya sama sekali, akan tetapi kalau aku arahkan do`a itu untuk kebaikan Pemimpin maka negara dan rakyatnya akan turut menjadi baik.

Pernyatan ini menempatkan urusan politik menjadi urusan nomor wahid. Dari sekian banyak hal yang mesti didoakan, mulai dari do`a keampunan timbunan dosa, keselamatan orang tua yang sangat kasih sayang, masa depan isteri dan anak cucu yang menjanjikan, sampai kepada do`a keselamatan dunia dan akhirat, ternyata semua itu masih dibelakangkan dari do`a terhadap Pemimpin. Dengan mendoakan peminpin, semua yang sudah disebut ternyata termasuk di dalamnya bahkan lebih dari itu, mencakup seluruh kebutuhan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nantinya.

Abu Muhammad al-Hasan al-Barbahari mengatakan bahwa berdo`a untuk Penguasa itu adalah ajaran agama yang seyogianya kita lakukan, dalam ungkapannya Dia mengatakan;[27]

وإذا رأيتَ الرَّجلَ يدعو على السلطان فاعلم أنَّه صاحبُ هوى◉ وإذا رأيتَ الرَّجلَ يدعو للسلطان بالصّلاح فاعلم أنَّه صاحبُ سنَّةٍ إن شاء الله

Artinya; Jika engkau melihat seorang berdo`a untuk (kecelakaan) Penguasa maka ketahuilah sesungguhnya dia sedang memperturutkan hawa nafsunya, dan jika engkau melihat seorang berdo`a untuk Penguasa tentang kebaikan maka ketahuilah sesunguhnya hal itu tuntunan sunnah, insya Allah.

Do`a yang tulus terhadap Penguasa itu sangat diperlukan. Adanya kesadararan yang tinggi untuk perduli terhadap umat lewat kearifan dan kebijakan Penguasa yang baik, sehingga kekuasan diisi dan langgeng dalam kendali Penguasa yang baik merupakan sikap yang diperlukan setelah berusaha secara maksimal untuk turut serta berperan aktif dalam membingkai Penguasa senantiasa dalam koridor syari`at, bukan sikap seseorang yang ingin dikenal Penguasa, atau cari perhatian

[27] Abdul Muhsin ibn Hamdi, Qothfu al-Jani al-Dani Syarah Muqaddimah, (Riyadh: 2002 M./ 1423 H.,Dar al-Fadhilah al-Mamlakah al-Su`udiyah, Cet. Ke-1), hlm.176.

dengan tujuan tertentu sehingga rela menawarkan atau menyodorkan diri, dan mengambil alih kesempatan secara langsung dengan tanpa pendelegasian sama sekali untuk berdo`a. Dukungan supaya Penguasa ini tetap berada pada kebaikan sangat diperlukan, dalam hal ini termasuk dukungan moril dengan cara berdo`a.

BAB IV

TERKOYAKNYA ULAMA PADA PILPRES 2019

A. Terkoyaknya Ulama

Terkoyaknya ulama pada saat pilres 2019 adalah suatu keniscayaan yang secara realitas sudah terjadi. Pertarungan pilpres itu bukan hanya sekedar pertarungan merebut kursi di istama, tetapi jauh lebih luas dari itu, yaitu pertarungan dua ideologi keislaman yang berkembang di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ulama yang ada sekarang ini terkonsentrasi pada dua kutub ideologi yang berseberangan, yaitu; 1). kelompok moderat, yaitu kelompok yang memiliki paham keagamaan yang lebih lunak, akomodatif, dan toleran terhadap pihak lain dan, 2). kelompok eksklusif, yaitu kelompok yang ingin memperjuangkan Islam itu secara tekstual, sekaligus sebagai kelompok yang lebih bersemangat untuk menempatkan Islam sebagai agama yang harus memperoleh keistimewaan di Indonesia ini. Perjuangan kedua kelompok ini ideal dan bagus, karena terlihat secara umum adalah dalam rangka memperjuangkan eksistensi Islam di Indonesia ini.[1]

---

[1] Perbedaan pandangan politik seperti ini sangat wajar terjadi. Perbedaan seperti ini pernah terjadi dalam sejarah keislaman, seperti pandangan keislaman yang berawal dari perbedaan ijtihad politik, dan akhirnya menyulut terjadinya Perang Jamal dan Perang *Shiffin*, demikian juga di Indonesia ini, yaitu pandangan yang ingin mempertahankan tujuh kata Piagam Jakarta, dan pandangan yang ingin mendropnya, dan menggantinya dengan sila pertama Pancasila yang terlihat netral agama. Belakangan, pandangan eksklusif itu senantiasa saja muncul, seperti lahirnya gerakan NII (Negara Islam Indonesia), DI (Darul Islam) dan TII (Tentara Islam Indonesia) pada tahun 1949 di Jawa Barat, demikian juga dengan gerakan yang senantiasa ingin menghidupkan kembali tujuh kata Piagam Jagarta pada saat amandemen UUD 1945 pertama sampai keempat tahun 1999 s/d 2002., Hasil wawancara dengan Abdul Hafiz Anshari (Ketua KPU 2007-2012, Ketua Senat UIN Antasari Banjarmasin, dan Wakil Ketua MUI Kalimantan Selatan) pada tanggal 3 Oktober 2019 di Inna Hotem Parapat.

Tercabiknya ulama di Indonesia pada saat pilpres 2019 ini telah menampakkan diri dalam bentuknya yang cukup parah. Hal ini dapat dilihat pada cabikan ulama yang bermukim pada antar ormas Islam, terlebih lagi pada cabikan ulama internal ormas Islam. Lebih jelasnya, sebagai berikut:

Pertama; Cabikan ulama pada antar ormas Islam

Tercabiknya ulama pada antara ormas Islam ini adalah cabikan ulama dengan mengacu kepada ormas tempat dia bernaung. Cabikan ulama dalam bentuk ini dapat dilihat dari ormas Islam tempat ulama itu sendiri bernaung. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa ulama/ warga NU secara umum mendukung paslon nomor urut 1. Sebaliknya, ulama/ warga Muhammadiyah mendukung paslon nomor urut 2. Dalam hal ini terlihat bahwa ulama itu telah tercabik berdasar antar ormasnya masing-masing.

Dalam koridor antar organisasi, terlihat ulama NU dan jamaahnya adalah pihak yang berjuang paling gigih untuk memenangkan paslon nomor 1. NU sebagai Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, dengan tetap tidak membawa nama ke-NU-annya, tampak jelas isyarat tubuh para elitnya memberikan dukungan yang transparan terhadap paslon nomor urut 1. Secara resmi ormas ini tetap menyatakan kenetralannya terhadap kedua paslon yang ada, mereka senantiasa memperdengarkan politik kebangsaan, bukan politik praktis dalam mendukung salah satu paslon yang ada. Secara moral, tidak dapat diingkari bahwa ormas ini sebenarnya fight mendukung paslon nomor urut 1. Sebagai warga negara, jama`ah NU ini wajar menggunakan haknya, dan berdiskusi dengan saudaranya untuk menentukan pilihan mereka yang kebetulan diarahkan kepada nomor urut 1.

Pemberian dukungan ini telihat cukup besar dan sungguh-sungguh, karena ada kesejalanan dengan dukungan yang diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB sebagai partai politik yang secara resmi terlibat dalam prosesi pilpres ini ternyata sudah terlebih dahulu memberikan dukungannya kepada paslon nomor urut

1, yaitu telah memberikan sampan bersama partai pendukung lainnya, sehingga 20 % suara dukungan partai atau lebih sudah terpenuhi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden RI. Kebersamaan NU dan PKB ini membuat perjuangan mereka menjadi signifikan dan lebih meyakinkan.

Secara historis kesejalanan pilihan politik jamaah NU dan PKB ini sangat layak dan sudah diperkirakan sebelumnya. PKB itu didirikan oleh ulama NU, tidak dapat dipungkiri bahwa pendirian PKB oleh Ulama NU tersebut dimaksudkan adalah dalam rangka mempersiapkan saluran aspirasi politik warga NU secara formil. Mengingat NU sebagai ormas Islam sudah berikrar lewat khittahnya seperti tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya bahwa dia adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi politik, dan pimpinan NU yang memiliki jabatan politik harus mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pimpinan NU di semua tingkatan, dan jajaran organisasi, intinya NU harus steril dari politik, maka NU secara organisasi harus steril dari kegiatan politik, lalu didirikanlah PKB sebagai kanalisasi politik jamaah NU. Di satu sisi, PKB sebagai anak kandungnya NU, sekaligus NU adalah orang tua biologis yang telah melahirkan PKB, sangat layak memiliki pilihan politik yang sama, di sisi yang lain, PKB sebagai anak dari NU sudah terbiasa sebelum melangkah untuk melakukan sesuatu, dia telah terlebih dahulu menyampaikan keinginannya, pamit, dan mohon arahan supaya tidak tersesat di jalan kepada NU, dengan demikian NU memberikan petunjuk kepadanya sesuai jalan kebaikan dan keselamatan yang sesungguhnya menurut NU. Dengan pemikiran seperti ini maka jadilah PKB itu memiliki pilihan politik yang senantiasa sejalan dengan NU.

Dukungan yang diberikan oleh NU terhadap paslon nomor urut 1 ini dilakukan secara sungguh sungguh. Di tengah masifnya gerakan yang mendukung dan mengajak untuk berpihak kepada paslon nomor urut 2, jama`ah NU, sejak dari elitnya sampai ke bawah bergerak mensosialisasikan kandidat nomor 1. Tidak tangung-tanggung, jaringan yang sudah mengakar dan menjalar di seluruh penjuru bumi Indonesia

ternyata lewat akar tunggangnya telah mengalirkan energi dakwah untuk mengkampanyekan supaya tetap berada dalam satu barisan memperkokoh idealisme wasathiyah Islam pada kubu nomor urut 1, gerakan ini tak terbendung, dia mengalir terus meskipun banyak rintangan dan kendala dalam perjalanannya, mulai dari ramainya pemberitaan media sosial yang mendeskriditkan NU, tokoh dan simpatisannya, sampai kepada pola komunikasi langsung di tengah masyarakat yang secara langsung berimplikasi kepada tercederainya hubungan sosial mereka. Dengan menjual idealisme ke-NU-an wasathiyah Islam yang sudah dikenal sebagai jargon NU sejak lama, jama`ah NU berkolaborasi dan berintegrasi dalam memperkokoh dukungannya terhadap paslon nomor urut 1. Dengan tetap tidak membawa nama NU, warga NU ternyata lumayan solit dalam menyatukan dukungannya. Hal ini menjadi lebih solid lagi mengingat gencarnya serangan pihak lain terhadap NU dan pilihan politik NU.

Sebaliknya Muhammadiyah pun demikian juga, dengan tanpa membawa-bawa nama organisasinya,[2] warga Muhammadiyah memberi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Secara umum ulama Muhammadiyah ini cenderung memilih pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tidak heran kalau di basis-basis Muhammadiyah akan semarak jargon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Demikian juga halnya dengan ulama Muhammadiyah yang berkecimpung di tengah masyarakat, mereka tampaknya telah memiliki pilihan politik tersendiri. Pada ceramah-ceramah yang disampaikan

[2] Secara organisasi, Muhammadiyah ini netral. Sewaktu Haedar Nasir datang ke UMSU, dia menyampaikan tentang kenetralan Muhammadiyah dalam menyikapi pilpres ini. Hal ini dapat dicontohkan dengan kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang dilaksanakan di Bengkulu, sebagai wujud kenetralannya, saat itu kedua paslon diungdang (Nomor 1, dan 2). Mengingat hal itu dilaksanakan di kampus yang seyogianya tidak boleh terkontaminasi dengan kegiatan politik, dan saat itu sudah masuk masa kampanye, maka keduanya tidak ada yang datang, demikian juga Din syamsuddin tidak bisa masuk, akan tetapi sebagai Presiden (bukan sebagai kandidat presiden 2019-2024) Joko Widodo hadir pada acara tersebut, dia didampingi oleh Mendiknas yang sekaligus juga sebagai salah seorang pimpinan PP Muhammdiyah (dengan tetap mengatas-namakan Pemerintah) Prof. Muhajir berjalan bersamanya.

oleh ustad/ muballigh, secara umum tetap menjaga etika kenetralan ini. Para ulama ini piawai dalam beretorika, meskipun secara tekstual tidak menyampaikan dukungan dan ajakannya untuk berpihak pada nomor urut tertentu, namun sajian ulama Muhammadiyah ini dapat terasakan tentang dukungan dan ajakannya adalah pada nomor urut 2.[3]

Dengan menganalisis teori kebersamaan, tampak jelas bahwa Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu bersama-sama mensukseskan kandidat nomor 2. Kita tahu bahwa ulama Muhammadiyah ini telah melahirkan partai politik penyalur aspirasi mereka, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), sejak semula PAN ini telah memberikan sampan dukungan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa berlayar menuju istana, maka tidak heran kalau ulama dan jama`ah ormas Muhammadiyah ini rela bertarung habis-habisan untuk mensukseskan jagoannya. Intinya mereka fight bertarung untuk memenangkan pasangan nomor urut 2.

Demikian juga halnya dengan ulama Forum Pembela Islam (FPI) yang terlihat dengan sangat gigih bahwa mereka ingin mensukseskan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan sangat fulgar, tapi tetap dengan menggunakan bahasa agama terlihat mereka menggerakkan dan menggiring umat pada pilihan politiknya, mereka memilih kata dan kalimat yang tepat, membuat mereka tetap aman dalam berbahasa, tapi fulgar dari segi konten. Gerakan besar yang mereka prakarsai di antaranya adalah "Unjuk Rasa Dami 212" yang terkenal dan fenomenal dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Semua orang dapat menangkap kesan bahwa warga/ ulama FPI itu adalah pendukun kuatnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tak terkecuali ulama eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), jelas paling kuat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Eks kelompok Pengusung Faham Khilafah ini pun demikian juga, secara nyata-nyata memberikan dukungan mereka kepada paslon

---

[3] Hasil wawancara dengan Prof. DR. Nawir Yuslem, MA., pada tanggal 3 – 10 – 2019 di Inna Hotel Parapat.

nomor urut 2, bukan hanya karena corak beragama dan idealisme yang berbeda, bahkan kemarahan mereka atas pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas pengususng idealisme khilafah ini pun oleh Pemerintah, sekaligus sebagai incumben dan maju dalam pilpres pada nomor urut 1untuk priode kedua telah turut menjadi pemicu mengalihkan dukungan sekaligus memantapkannya pada paslon nomor urut 2. Meskipun secara organisasi HTI ini telah dibubarkan, namun secara substansi idealisme dan personil mereka ini tidak ada yang berubah dan tetap hidup sebagaimana biasanya. Dinamika keberagamaan yang demikian lentur di Indonesia telah berkontribusi mewarnai dukungan, sekaligus penentuan pemberian dukungannya pada saat evan pilpres itu berlangsung.

Seirama dengan Eks HTI, kelompok Salafi juga kokoh mendukung paslon nomor urut 2. Meskipun ada nuansa ideologi yang berbeda di antara keduanya, namun sesama aliran keagamaan trasnasional pastilah memiliki pilihan politik yang sejalan dengan HTI. Baik Salafi demikian juga HTI terkategori sebagai pemangku Islam Eksklusif, yaitu paham keagamaan yang memiliki ideologi khas dalam perjuangannya untuk memberikan keistimewaan pada komunitas Islam di tengah bangsa yang plural. Dengan demikian terlihat kelompok Salafi ini termasuk yang cukup keras bertarung untuk memenangkan jagoanya.

Tanpa kecuali, ulama dari ormas Islam lainya pun terlihat telah memiliki pilihan politik tersendiri. Secara umum ulama/ warga semua ormas tertentu tersebut terkonsentrasi kepada pilihannya masing-masing, yang secara umum mendukung pasangan nomor urut 2. Hal ini dapat dilihat pada; Forum Umat Islam, Al-wasliyah, Al-Ittihadiyah, Partai Umat Islam (PUI), Dewan Dakwah Islamiyah, serta yang lainnya yang tidak bisa diperinci satu persatu. Framing organisasinya tersebut sangat berpengaruh kepada komunitas ulama pada jajarannya.

Kedua; Cabikan ulama pada internal ormas Islam

Cabikan ulama pada bentuk ini adalah menggambarkan tentang dahsyatnya cabikan ulama berdasar pada perbedaan pilihan politik

ulama meskipun mereka berada dan bernaung di bawah satu ormas Islam. Hal ini terjadi pada banyak ormas di Indonesia.

Sebagai indikasi tentang betapa dahsyatnya cabikan ulama pada saat pilpres tersebut adalah terjadinya polarisasi ulama pada komunitas ulama yang satu ideologi berdasarkan ormasnya. Hal ini dapat dicontohkan pada Muhamadiyah dan NU. Lebih detail hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

Meskipun Warga Muhamadiyah cenderung untuk mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ternyata dukungan ini tercerai-berai juga. Ternyata sejumlah tokoh dan ulama Muhammadiyah pun berseberangan dengan pada umumnya tokoh, ulama, dan warga Muhammadiyah, yaitu tidak memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tetapi mereka *uzlah* (mengasingkan diri) untuk memilih Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin. Ilustrasi menarik terjadi sewaktu Abdul Malik Fadjar (2015-Sekarang sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres), sekaligus sebagai mantan Mendiknas Kabinet Gotong Royong 2001—2004, dan juga mantan Menteri Agama (Menag) kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1998—1999, dan mantan Rektor UIN Malang 1983—2000, datang berkunjung ke UMSU Medan, sejak di depan kampus terlihat dia mengacungkan tangan berteriak dengan yel, yel, yel, satu, satu, satu, sebagai pertanda bahwa dia adalah pendukung paslon nomor urut 1 Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin (hal ini wajar karena dia sekarang berada di jajaran pemerintahan sebagai anggota wantimpres), mendapat raksi keras dari mahasiswa yang secara umum kokoh berpihak pada nomor urut 2, mengimbangi dan membalasnya dengan ungkapan yel, yel, yel, dua, dua, dua yang lebih kuat, semarak dan ramai. Menjadi sangat seru pertemuan ini, karena sesama warga Muhammadiyah, yaitu antara tokoh Nasional bertemu dengan kader-kadernya berada dalam hiruk pikuk yang berseberangan dan saling menyerang.

Selanjutnya polarisasi ulama pada internal organisasi ini terlihat juga pada tokoh/ ulama Muhamadiyah lainnya. Prof. Muhajir sebagai salah seorang unsur PP Muhammadiyah dan juga pemangku jabatan

Menteri Pendidikan Nasional (Mediknas) secara eksplisit jelas dapat ditangkap bahwa dia sebagai tokoh dalam unsur aparatur negara dia berpihak kepada nomor urut 1, demikian juga dengan Prof. Malik Fajar, dia terlihat secara terang-terangan telah memberikan dukungannya pada nomor urut 1. Selanjutnya Syafii Ma`arif sebagai mantan ketua PP Muhammadiyah setelah Amin Rais, juga dia sebagai wantimpres, terlihat sangat akomodatif terhadap nomor urut 1 dan terlihat jelas dukungannya terhadap paslon ini, untuk contoh Sumatera Utara dapat kita sebut dengan nama Prof. DR. Faisar Ananda termasuk yang fight untuk mendukung nomor 1. Berbeda halnya dengan Ketua PP Muhamadiyah Haedar Nasir sendiri menyampaikan secara organisasi tentang kenetralannya dan juga organisasinya, serta dia tidak menghimbau atau melarang jamaahnya untuk berpihak kepada salah satu dari dua paslon tersebut. Sementara Prof. Din Syamsuddin terlihat sangat soft, namun secara arif, orang-orang dapat juga memahami bahwa dia bersama kelompok unjuk rasa damai 212 yang secara nota bene juga berada di pihak paslon nomor urut 2. Benar bahwa warga Muhammadiyah secara internal pun telah tercabik-cabik pada dua faksi sesuai kandidat pilpres yang ada pada waktu itu.

Bukan hanya saat prosesi pilpres, pasca pilpres pun polarisasi itu tetap berlangsung. Belakangan (setelah usai pertarungan), terlihat Zulkifli Hasan sebagai ketua PAN mendekat kepada nomor 1, sebagai tokoh politik tentu paham apa yang terbaik bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi partainya, lalu dia merapat kepada Jokowi sebagai pemenang pilpres. Berbeda halnya dengan Prof. Amin Rais, dia juga sebagai sesepuh politik sekaligus sebagai pendiri PAN berbeda dengan ketua PAN, dia kokoh dengan pendiriannya, sejak awal sampai akhir tetap komit bersama dengan nomor urut 2, bahkan walaupun kandidat yang diusungnya telah kalah, dia tetap konsisten bersamanya, dan mengecam orang-orang yang mengalihkan dukungannya kepada nomor urut 2. Tercabiknya ulama dan umat Islam pada pilpres 2019 ini telah mengukir sejarah fenomenal sebagai pilpres paling dahsyat melibatkan ulama, dan mengoyaknya, memperalat agama dan menunganginya.

Berikutnya NU, demikian solitnya jamaah NU memberikan dukungannya kepada paslon nomor urut 1, ternyata tetap saja ada ulama NU yang *mufaroqoh* (mengasingkan diri) memilih paslon nomor urut 2. Sejumlah orang yang mengatas-namakan diri kiai dan ulama *dzurriyah* (keturunan) pendiri Nahdlatul Ulama (NU) menentukan pilihannya bukan pada Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, tetapi kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pada tanggal 28 Nopember 2018 malam, jauh-jauh mereka telah datang dari tempat tingalnya di Jawa Timur ke Jalan Kertanegara IV Jakarta, tempat kediaman Prabowo khusus untuk menyampaikan dan mendeklarasikan dukungannya. Pada kesempatan itu, KH Hasyim Karim sebagai salah seorang cucu dari pendiri NU (KH Bisri Syamsuri) mengatakan; "Kami bangga bagaimana fokus (Prabowo-Sandiaga) mengatasi persoalan ekonomi," Hasyim bangga bahwa Prabowo Subianto menjadi pembicara utama di *The World 2019 Gala Diner* yang diselenggarakan *The Economist* di Singapura, sebelumnya. Dia memuji Prabowo yang telah dapat berbicara di forum internasional, dan mampu meyakinkan para CEO perusahaan besar dunia tentang program ekonomi yang diusungnya. Seorang pemimpin harus jelas dan bisa meyakinkan saat berbicara di forum internasional, pungkas sang kiai. Dia mengapresiasi pasangan ini sebagai kandidat yang lebih berkualitas.

Sejumlah kiai dan ulama *dzurriyah* (keturunan) pendiri NU yang datang dan memberi dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, adalah sebagai berikut;

Dzuriyyah Pesantren Tebuireng :

1. Gus Irfan (KH Irfan Yusuf Hasyim) cucu Mbah Hasyim
2. Gus Aying (KH Hasyim Karim) Cucu Mbah Hasyim
3. Gus Fahmi (KH Fahmi Amrullah) Cucu Mbah Hasyim
4. Gus Dhowi (KH Ir. A. Baidhowi). Cucu Mbah Hasyim
5. Gus Billy (Putranya Gus Sholah) Cicitnya Mbah Bisyri Sansuri
6. Gus Adib (Anak KH Saifuddin Zuhri salah satu Pendiri NU) Dzurriyah Pensatren Tambak Beras.

7. KH Hasib Wahab (Putra KH Wahab Hasbullah)
8. Hj Siti Fatimah Hasib
9. KH Ghozli Wahib Wahab (Cucu KH Wahab Hasbullah)
10. Gus Solachul Aam Wahib Wahab (Cucu KH Wahab Hasbullah)
11. Hj Sukmawati Solachul Aam Wahib.
12. Hj Maslachah Wahib Wahab (Cucu KH Wahab Hasbullah)
13. Prof. Dr. KH Rohmad Wahab (Putra KH Wahab Hasbullah)
14. Gus Wachid Muin (Cucu KH Wahab Hasbullah)
15. Gus Abdul Rozak (cucu KH Wahab Hasbullah)
16. Nyai Hj. Oni Idris Hamid (Cucu KH Abd Hamid Pasuruan).[4]

Polarisasi internal ini terlihat demikian keras pada Dewan Dakwah Islamiyah (DDI). Prof. DR. Nawir Yuslem mengatakan; Meskipun tidak mengatas-namakan organisasi, lewat kiprah jama`ahnya, organisasi ini telah memberikan dukungan yang kuat (kental) ditujukan kepada nomor urut 2. Miltansi jamaahnya terlihat dengan jelas tentang bagaimana mereka di tengah masyarakat, misalnya dengan menggunakan bahasa agama, mereka telah beretorika dan berargumentasi memperkokoh alasan mereka tentang betapa pentingnya memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 tersebut., sebaliknya bagaimana celakanya jika tidak sejalan denga mereka, tetapi mendukung nomor urut 1. Sejak awal arus dukungan ini mengalir dari DDI itu seirama dalam ayunan buaiyan kebersamaan mereka yang harmoni. Langkah ini membuat mereka lebih yakin dan percaya diri dalam perjuangannya.

Secara internal, hampir seluruh organisasi yang ada di Indonesia ini juga mengalami perpecahan pada pilihan politik. Perpecahan dalam bentuk internal organisasi juga tidak kalah kontrasnya untuk mewarnai dinamika pilpres tersebut. Tanpa terkecuali ormas yang paling sakral

[4] https://www.merdeka.com/politik/kiai-dan-ulama-keturunan-pendiri-nu-deklarasi-dukung-prabowo-dan-sandiaga.html

sekali pun dalam pemahaman bangsa Indonesia seperti MUI, turut juga mengalami polarisasi. Ketua umumnya saja sudah menjadi kandidat calon wakil presiden nomor urut 1, apatah lagi anak buahnya, banyak yang sudah terlihat secara jor-joran memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 1 tersebut, bahkan sebagian elitnya sudah sejak lama telah mewacanakan dan merencanakan hal itu akan terjadi, dan ternyata memang benar-benar terjadi, karenanya mereka memberikan dukungan yang kuat kepadanya. Sebaliknya, ada beberapa orang yang tidak ikut arus ini, tetapi mereka menyeberang dan memberi dukungan yang terlihat secara signifikan kepada paslon nomor urut 2. Untuk hal ini dapat dicontohkan pada Wasekjen Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat KH. Tengku Zulkarnain, MA., yang terlihat beberapa kali di TV demikian fulgar dan berada di barisan terdepan memberikan dukungan kepada nomor urut 2. Dinamika ini jelas telah memberikan gambaran tercabiknya ulama dalam internal MUI pada pilpres 2019 tersebut.

Tak pelak lagi polarisasi internal ini terjadi juga pada DDI. Saat ketua umumnya Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra telah beralih dari habitat dasarnya (awalnya), di pertengahan jalan dia telah menarik dukungannya yang semula secara resmi diberikan kepada pasangan nomor urut 2, ternyata dianya berputar arah menjadi mendukung paslon nomor urut 1. Hal ini bukan hanya menimbulkan keruwetan pada DDI sendiri, tetapi juga pada jamaah Partai Bulan Bintang, di mana Prof. Yusril juga sebagai ketuanya. Keruwetan dalam komunitas ini sangat terasa karena ketuanya sendiri yang *uzlah* (mengasingkan diri) meninggalkan jamaahnya yang kokoh bertahan pada pendirian awalnya.

Suatu hal yang membuat serunya perseteruan ulama/ tokoh dan umat pada internal ormas dan partai ini adalah pada perseteruan sesama mereka, di mana kepergian ketuanya tidak membawa pergi dengan ikut serta dukungan anggotanya. Pada jajaran *grass root*, tidak banyak yang turut serta pergi bersama perginya sang pimpinan. Seolah perginya pimpinan secara sendirian saja, dan tingalnya jamaah juga dengan tanpa keperdulian sama sekali, maka terpisahlah dukungan keduanya

pada titik kulminasi perjuangan mereka. Jamaah DDI dan Partai Bulan Bintang ini mencari dukungan dalam masyumi (jika mengaitkan sejarah keberadaan mereka pada sejarah masa silam) dalam istilah Prof. Nawir. Jadilah mereka ibarat ayam kehilangan induk.

Tidak mudah untuk menyelesaikan terkoyaknya ulama dan pengikut ulama dalam pilpres tersebut.[5] Pilpres telah usai, namun luka lara ulama masih masih terasa dan belum belum terobati. Tahapan pilpres telah usai yang ditandai dengan, tanggal 21 Mei 2019 KPU sudah menetapkan dan mengumumkan pemenang pilpres. Lebih dari itu, tanggal 27 Juni 2019 gugatan sengketa pilpres sudah diputus oleh Mahkamah Konsthitusi (MK), tanggal 20 Oktober 2019 pelantikan pemenang pilpres sudah diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahkan para kandidat presiden dan wakil presiden yang bertarung pun sudah berpelukan, yang menjadi sangat luar biasa lagi, yaitu kandidat yang dalam kondisi hidup mati pun telah jungkir balik diperjuangkan Prabowo Subianto ternyata telah bergabung dalam kabinet Jokowi dengan menjadi pembatunya sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinetnya, namun para ulama dan pendukungnya masih berkabung dalam duka nestapa sebagai dampak dari tercabiknya ulama dan umat Islam Indonesia pada pilpres 2019 tersebut. Sejalan dengan hal itu Harian Republika mengatakan bahwa pertarungan politik antara pendukung Jokowi dan Prabowo menjadi semakin tajam, karena Pilpres 2019 adalah merupakan kelanjutan pertarungan kedua kubu pada Pilpres 2014 yang tampaknya masih membekas (belum selesai).

Politik, ternyata telah meluluh-lantakkan ulama di Indonesia ini. Mengingat kandidat yang muncul pada pertarungan pilpres itu hanya terdiri dari 2 (dua) paslon saja maka terlihat pengelompokan ulama yang muncul ke permukaan pun di Indonesia ini hanya terdiri dari dua warna pula. Kelompok itu terdiri dari; Pertama, Pasangan nomor utut 1 ditopang oleh ulama berpaham moderat (ulama sarungan atau ulama

---

[5] Hasil wawancara dengan Prof. DR. Katimin, MA. (Dekan Fa. Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU, Mustasyar PWNU Sumatera Utara, dan Pakar Politik Islam), di kantornya pada tanggal 2 Oktober 2019.

konvensional), yang bersamaan juga dengan calon wakil presidennya adalah K.H. Ma`ruf Amin yang terkategori sebagai ulama berfaham moderat pula, hal ini dengan mudah dilihat dari warna organisasinya NU (sebagai pendekar moderasi beragama di Indonesia), di mana di sana dia sebagai Rois `Am (Pimpinan tertenggi), dan juga Ketua Umum MUI Pusat (Nasional)., Kedua, Pasangan nomor urut 2 ditopang oleh kelompok ulama yang berpaham eksklusif, mulai dari HTI sebagai ormas pengusung khilafah sampai kepada mereka yang berpaham salafi wahabi, dan simpatisan-simpatisannya sebagai yang ingin melakukan perubahan dari figur sampai kepada program kerja, bahkan warna dari bangsa dan negara Indonesia.

Idealnya, ulamalah yang mewarnai polarisasi politik di suatu negara, bukan sebaliknya, yaitu politik mewarnai ulama. Status yang tinggi yang disandang oleh ulama itu, mulai dari sebagai bintang penerang bagi umat, sebagai pewaris Nabi yang akan menyampaikan missi kebenaran, dan sebagai uswah hasanah (contoh teladan yang baik), bahkan sebagai orang yang paling takut kepada Allah Swt. tidak mudah untuk diwarnai oleh politik yang sedang berkembang, apalago dicabik-cabik oleh politik itu sendiri, sementara bibit, persamaian dan tumbuhnya politik tersebut tidak didampingi oleh ulama sejak dari semula. Di antara pemerhati Islam banyak yang menyayangkan tentang terlanjur adanya keterlibatan ulama dalam politik praktis tersebut, terlebih lagi berdampak pada rusaknya tatanan (tercabiknya) ulama terrsebut akibat dinamika politik yang diselenggarakan.

Bila Perbedaan ulama itu identik dengan lahirnya potensi rahmat, maka polarisasi ulama yang terjadi akibat politik di Indonesia saat ini menimbulkan kecemasan akan lahirnya potensi laknat. Kecemasan akan adanya laknat tersebut telah mengkhawatirkan kita pada beberapa indikasi, mulai dari ada baikot ulama tertentu di tengah masyarakat, yang semula dia memiliki panggung di tempat tertentu menjadi tidak memperoleh kesempatan lagi, terstikma dengan informasi media sosial yang tidak sehat, sehingga merusak nama baiknya, sampai kepada kecemasan akan rusaknya pilar berbangsa dan bernegara. Perseteruan

ulama secara tidak sehat secacam itu justeru bisa berakibat kontra produktif dalam pembangunan bangsa.

Genderang perang ideologi pun sudah ditabuh, kedua belah pihak berjuang dengan cara dan strateginya masing-masing. Kelopok ulama eksklusif pun berjuang dengan menjual eksklusifisme idealisme religuisnya, mereka menghiasi kegiatan keulamaannya dengan muatan pandangan pilihan politik mereka, akhirnya sarana pendidikan formil dan non formil pun turut terbawa-bawa, apalagi media sosial yang secara bebas dapat digunakan, secara otomatis turut menjadi sarana penyampaian aspirasi dan pandangan politik. Demikian juga pada kelompok ulama moderat, tidak kalah lincah dan gesitnya untuk memperjuangkan ideologi kebangsaannya, menabur wawasan keislaman dan kebangsaan sekaligus untuk menarik simpati umat bahkan untuk tetap mempersatukan anak bangsa. Kedua kelompok ini benar-benar sudah berada pada dua sisi yang sedang berhadap-hadapan.

Pertarungan pilpres tersebut sekaligus merupakan bagian dari pertarungan dua ideologi besar paham keagamaan di Indonesia ini.[6] Nur Khamid mengatakan; Belakangan ini sudah mulai banyak umat Islam yang terperangkap dalam konflik paham keagamaan antara satu dengan yang lainnya, termasuk para ustad (ulama). Kita melihat banyak sekali ustad (ulama) yang beradu argumentasi di publik lewat dunia maya, misalnya dengan menggunakan sarana You tube, seorang ustad (ulama) menghujat/ menghina/ merendahkan/ menyalahkan/ bahkan menista ustad (ulama) yang lain. Hal ini menjadi ancama serius terhadap kebersamaan dalam NKRI.[7]

Katimin memperkirakan bahwa polarisasi ini akan masih tetap berlangsung pada masa yang akan datang. Selama corak beragama ini sebagai penyebab belum diselesaikan, maka dampak yang terjadi, yaitu polarisasi ulama ini tetap saja akan terjadi. Pihak yang paling sakral

---

[6] Hasil wawancara dengan Abdul Hafiz Anshari (Ketua KPU 2007-2012, Ketua Senat UIN Antasari Banjarmasin, dan Wakil Ketua MUI Kalimantan Selatan) pada tanggal 3 Oktober 2019 di Inna Hotem Parapat.

[7] IAIN Salatiga, …, hlm.130.

dalam hal ini adalah MUI, mengingat MUI ini sudah terpapar paham wahabi dengan ideologi transnasional yang cenderung radikal ini maka MUI itu harus dibersihkan dari orang-orang yang seperti ini. MUI ini adalah lembaga keislaman yang paling diikuti oleh umat, jadi MUI ini harus benar-benar steril dari orang yang berpaham seperti ini. Ke depan Pemerintah harus lebih banyak menciptakan program-progran dalam rangkan mempersatukan ulama ini kembali, termasuk dengan cara membersikan orang-orang (ulama) yang yang cenderung berpaham radikal tersebut.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik para ulama tersebut. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Warna paham keagamaan

   Prof DR. Katimin mengatakan bahwa polarisasi ini terjadi karena adanya perbedaan corak paham keberagamaan. Paling tidak corak keberagaan ini ada 2 macam, yaitu; Pertama, Corak keberagamaan yang moderat. Corak ini cenderung elastis, toleran, dan akomodatif terhadap keragaman (pluralisme) yang ada di Indonesia, terutama dari aspek SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), mereka juga nyaman dengan eksistensi umat Islam seperti apa yang ada sekarang di Indonesia ini, bahkan setuju dan mendukung sistem negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Corak ini adalah berupa arus besar keyakinan umat Islam Indonesia, sejak dari dulu sampai sekarang ini. Dari segi ormas maka terlihat pengelompokan ini dihuni oleh orang-orang NU, dan sebagian kecil ulama Muhamadiyah, dan Alwasliyah. Kelompok ini cenderung berpihak pada kandidat paslon nomor urut 1., Kedua, Corak keberagamaan salafi, Wahabi, Eks HTI, dan yang lainnya, yang cenderung sudah terpengarauh ideologi tansnasional, dan ini ditandai dengan faham garis keras yang dimilikinya. Kelompok ini cenderung radikal (menurut istilah yang sering digunakan pada tulisan ini adalah eksklusif), dan ini mengerucut untuk berpihak pada pasangan nomor urut

2. Misalnya, jamaah Ormas Muhammadiyah yang cenderung mendukung palon nomor urut 2, namun ada tokoh-tokoh tertentu karena kepentingan politiknya, dia merasa bahwa kepentingan politiknya terakomodasi pada paslon nomor urut 1, lalu dia berada di tempat ini, walau lari dari habitatnya secara organisasi.

Sebenarnya, paham eksklusif telah lama ada di Indonesia ini. Semula paham ini dibiarkan tumbuh, berkembang, dan berurat berakar di Indonesia ini, dan dia merambah sampai pada tempaat-tempat yang vital, seperti sekolah, Perguruan Tinggi, Pesantren, dan MUI, serta yang lainnya. Pada masa Orde Baru, ruang gerak komunitas ini terkekang, dan tidak bisa menampakkan diri secara vulgar. Tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan euporia kebebasan, termasuk munculnya paham-paham radikal di Indonesia. Sejak tahun 1997 paham keagamaan radikal ini mulai menampakkan diri, misalnya; 1). Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab, 2). Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir , 3). JAMI adalah yang dipimpin oleh Al-Habshi, 4). Laskar Jihad (LJ) yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib, 5). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 6). Forum Umat Islam Indonesia (FUI), 7). Laskar Mujahidin (LM), 8). Gerakan Pemuda Islam, FKASWJ, Forum Betawi Rembug (FBR) dan yang lainnya. Yang bersifat kedaerahan dijumpai pula; Forum Pemuda Islam Surakarta, Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam di Banten, Gerakan Penegak Syari'at Islam di Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Penerapan Syariat Islam di Pamekasan, Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Syariat Islam di Sukabumi, Front Thoriqatul Jihad di Kebumen dan yang lainnya.[8] Kemunculan mereka ini seiring dengan berhembusnya angin kebebasan berpikir, berkreasi,

---

[8] Tulisan Din Wahid, pada, UIN Syarif Hidayatullah, *Studia Islamika*, (Jakarta: 2007, Vol. 14, No. 2, 2007), hlm. 345., Juga tulisan Suparman Syukur, pada Fakultas Ushuludidn dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Jurnal Theologia, (Semarang: 2017, Volume 23, Nomor 1, Januari 2012), hlm.93.

berkeyakinan, bahkan berekspresi. Dengan demikian, paham keagamaan radikal yang dipandang tabu selama ini ternyata telah mendapat tempat di era reformasi.

Selain istilah radikal, untuk pelebelan pada kelompok ini dipergunakan juga pada banyak terminologi. Di antaranya; Islam fundamentalis, Islam militan, Islam garis keras, Islam ekstrim, dan lain sebagainya. Sejalan dengan lebel tersebut maka kelompok ini memang dikenal dengan kelompok yang gencar, dan secara terang-terangan menyuarakan penerapan syariat Islam, dan gemar melakukan kekerasan dalam memperjuangkan ideologinya, baik kekerasan fisik, seperti melakukan perkelahian dan teror, demikian juga kekerasan non-fisik, dengan cara mengeluarkan fatwa; murtad (keluar dari Islam), kafir (mengingkari keislaman), syirik (mempersekutukan Tuhan), dan terminologi lain semisalnya. Eksklusivisme Islam dalam dalam implementasi yang mereka idamkan menjadi menjadi khas ditangan mereka.

Ciri khas kelompok ini terlihat pada penekanan ketaatan paripurna (penuh) terhadap apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Kelompok ini ingin mencontoh gaya hidup Nabi sampai hal yang sekecil-kecilnya, termasuk penampilan fisik dan juga cara berpakaiannya, mulai dari; memanjangkan jenggot, memakai gamis ala Arab, bercelana panjang gantung di atas mata kaki, dan mengikat kepala ala Arab bagi kaum laki-lakinya. Untuk kaum wanita dengan mengenakan busana yang menutupi seluruh tubuh hingga batas yang tersisa hanya wajah dan kedua telapak tangan saja, bahkan cadar. Formalitas keislaman dalam aspek kehidupan duniawi ini pun turut disakralkan.[9]

Paham baru yang cenderung rdikal ini, tidak terlepas dari pengaruh paham salafi wahabi yang ada di Arab Saudi dan Yaman. Salafi Wahabi ini adalah paham keagamaan yang mengajak umat Islam supaya kembali mengikuti ajaran Islam

[9] Fakultas Ushuludidn dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, *ibid*., hlm.94.

yang murni sebagaimana ajaran yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw., dan *al-salaf al-salih*, yaitu tiga generasi sesudah Rasul. Sejak lama. Para Pembaharu dalam sejarah keislaman telah mengkampanyekan hal ini sejak dari masa silam, misalnya; Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh beserta muridnya Rasyid Ridha. Di era reformasi ternyata Gerakan ini telah menerobos gerbang Indonesia melalui beberapa pintu, di antaranya;

a. Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII)

Semula DDII ini didirikan oleh M. Natsir dan rekan. Setelah mereka tidak berkiprah lagi dalam dunia politik karena dibubarkannya masumi oleh Orde Lama, maka belakangan DDII inilah yang menjadi pentolan Arab Saudi untuk menyelurkan dana yang cukup besar kepada muballigh/da`i yang diterjunkan ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Karena para muballigh/ da`I ini telah ditraining terlebih dahulu oleh pihak Arab Saudi, maka lewat mereka inilah mengalir paham keagamaan salafi wahabi ini. Demikian juga melalui mahasiswa yang yang dikirim oleh DDII, dan mereka memperoleh beasiswa dari Arab Saudi melalui rekomendasi DDII tersebut.

b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa (LIPIA)

Bibit gerakan ini telah diawali dari tahun 1980, yaitu saat lembaga ini didirikan. Belakangan, Arab Saudi menjadi sponsor lembaga ini dengan cara memberi beasiswa bagi pelajar-pelajarnya, mereka diberi pelajaran beberapa kitab bahasa Arab yang bepaham Wahabi di Indonesia ini. Mengingat kitabnya berbahasa Arab, maka banyak dari pelajarnya adalah alumni pesantren dari berbagai daerah di Indonesia ini. Tidak jarang juga melalui lembaga ini, para mahasiswa memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi ke Arab Saudi, terutama ke Universitas Imam Muhammad ibn Sa'ud di Riyad Arab

Saudi. Setelah menyelesaikan studinya, maka mereka inilah yang banyak berkiprah di tengah masyarakat dan mengajar di Pesantren di Indonesia.

c. ITB, UI dan UGM.

Munculnya perubahan paradigma mahasiswa dari orientasi politik ke orrintasi relijius mengakibatkan munculnya pusat-pusat studi keislaman di kampus-kampus, terutama ITB, UI dan UGM. Sebagai contoh, lahirnya jama'ah Shalahuddin di UGM Yogyakarta, kegiatan masjid Salman ITB di Bandung dan yang lainnya. Lewat pengkajian keagamaan ini muncullah tokoh kampus semisal Imaduddin Abdurrahim di kota Bandung, A.M. Saefuddin di kota Bogor, dan M. Amien Rais di kota Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung dengan baik sejalan dengan dukungan Pemerintah lewat Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) nya Perguruan Tinggi. NKK melarang mahasiswa untuk berpolitik, sebaliknya mendorong mahasiswa pada pengkajian keagamaan kampus yang ada. Lewat pusat studi inilah mengalirnya paham salafi Wahabi di Indonesia. Ditambah lagi munculnya kecenderungan berkembangnya penerbitan buku modernisasi Islam, seperti; kitab-kitab Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Imam Khumaeini, Murtadha Mutahhari, Ali Syari'ati dan yang lainnya. Halaqah semakin semarak setelah banyaknya alumni Arab Saudi kembali ke tanah air, misalnya; Abu Nida, Ahmad Faiz Asifuddin dan Aunur Rafiq Gughron bergabung langsung dengan komunits ini, dan halaqoh pun menjadi ramai dan semarak.[10]

Pemahaman keagamaan baru ini cenderung meresahkan umat yang konsisten dengan tradisi paham keagamaan lama. Idiologi ini menghendaki ekslusivisme Islam dalam setiap kesempatan, dan cenderung lebih mengedepankan tindakan

[10] UIN Syarif Hidayatullah, …, hlm.348.

kekerasan untuk mencapai tujuannya. Terma-terma yang ada pada teks keislaman ditafsirkan secara dangkal dan kaku, bahkan dipergunakan untuk melegitimasi prilaku radikal dengan tetap mengatasnamakan agama. Kehadiran ideologi ini juga turut diperparah oleh ISIS (Negara Islam Iraq dan Syiria, yang dalam bahasa Inggerisnya disebut dengan *Islamic State in Iraq and Syiria*), yaitu suatu kelompok jihadis militan Islam yang ideologi dan pengaruhnya terus berkembang dan dikembangkan secara global ke seluruh dunia melalui situs internet, buku keagamaan, pendidikan, baik lewat sekolah, kampus sebagai pendidikan formil, demikian juga lewat ceramah, media sosial semisal face book, you tube, twitter dan lain sebagainya sebagai pendidikan non formal, dalam hal ini termasuk Indonesia.[11]

Sebagai contoh, mereka terinspirasi dengan hadis ini, dan menafsir dalam bentuk yang lebih refresif.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, dari Abu Sa`id al-Khuduri, dia berkata, aku mendengar Rasul Saw. bersabda;[12]

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ◉ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ◉
فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ◉ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ

Artinya; Siapa di antara kamu yang melihat kemungkran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya sendiri, kalau dia tidak mampu akan hal itu maka hendaklan dengan peringatannya, kalau dia juga tidak mampu untuk melakukan hal itu maka hendaklah dengan hatinya (hatinya berontak terhadap hal itu), dan yang demikian itu adalah gambaran iman yang paling lemah.

Kelompok ini mengartikan hadis ini secara tekstual. Tekstualitas hadis ini memperlihatkan tentang langkah awal

[11] Tulisan Nur Khamid, Pada, IAIN Salatiga, *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, (Salatiga: 2016, Vol.1, Nomor 1, Juni, 2016), hlm.123.

[12] Mahir Yasin al-Fahli, *al-Muntakhof min Shahih al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Ambar: 1427 H./2006 M., Jami`ah al-Ambar, Juz.1), hlm. 15.

merubah kemungkaran itu dengan tangannya sendiri, artinya dengan kekerasan. Inilah dakwah yang paling utama dalam Islam. Padahal, jika hal ini ditafsir secara kontekstual bisa berarti "kekuasaan", jadi tidak perlu dengan menggunakan kekerasan, tetapi dengan cara lain yang dipandang ampuh untuk dapat memberantasnya. Dengan memahami terma keagamaan seperti ini membuat mereka menjadi eksklusif.[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute merilis 3 (tiga) pembuktian tentang keikutsertaan mereka dalam tindak kekerasan di Indonesia, yaitu; 1). konflik antar agama yang terjadi di Maluku dan Poso, 2). Proyeksi positivisasi syariat Islam pada beberapa daerah di Indonesia (Prosesi Perda syari`at), dan 3). Penyerangan terhadap prilaku melanggar syari`at, seperti; Penyerangan terhadap pengikut aliran sesat, mensponsopri gerakan anti kristenisasi, dan gerakan anti maksiat yang sudah berlangsung secara masif di seluruh daerah Indonesia. Untuk keterlibatan mereka pada konflik antar agama yang terjadi di Maluku dan Poso, maka konflik itu telah mengubah cara pandang keagamaan dan ketegangan masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan pada beberapa daerah telah muncul sentimen keagamaan terhadap pemeluk agama lain karena dengan melihat tayangan yang ada di TV, internet, dan media cetak dalam mempublikasikan konflik di Maluku dan Poso tersebut. Laskar-laskar pun mereka kirim ke lokasi konflik, sehinga wujud pembelaan diri umat Islam di satu sisi, dan membantu umat Islam yang sedang diserang di sisi lain menjadi dapat diimplementasikan.[14]

Ideologi ini tumbuh subur pada beberapa tempat di Indonesia, terutama pada masyarakat marginal (terpinggirkan), dan komunitas yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Filosofinya, masyarakat terpinggirkan ini sangat mengharapkan perhatian dan perbaikan kebutuhan hidup mereka, demikian

[13] IAIN Salatiga, …, hlm. 129.
[14] Fakultas Ushuludidn dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, …, hlm.95.

juga masyarakat terzalimi yang ingin memperoleh hak-hak individualnya memiliki apresiasi yang kurang sehat terhadap Pemerintah, sekaligus mereka ini sangat rentan dengan pengaruh luar, terutama jika harapan mereka ini tetap tidak terpenuhi. Tumbuh subur ideologi ini turut memperkokoh eksistensi mereka sekarang ini di Indonesia.

Di sisi lain, Sejarah keberagamaan di Indonesia ini telah memperlihatkan kemapanannya pada paham keagamaan kultural. Paham keagamaan ini senantiasa mempertimbangkan kearifan lokal sebagai motivasi untuk menetapkan hukum. Dengan pendekatan seperti ini terlihat paham ini menjadi moderat, lunak, akomodatif, dan membawa kedamaian. Sebenarnya inilah pendekatan yang dilakukan oleh para walisongo yang senantiasa menghargai budaya dalam aktivitas dakwahnya mengajak dalam umat memaknai Islam. Tradisi baik yang ada itu tetap dipertahankan, sementara untuk tradisi menyimpang juga tetap dengan mempertahankan kearifan lokalnya, namun terlebih dahulu dimodifikasi menjadi sesuatu penampilan baru yang islami, bukan dengan cara membatalkan dan membuangnya. Inilah paham keagamaan asli/ lama yang sudah memasyarakat di Indonesia.

2. Kepentingan

Selain dari corak agama, perpecahan ulama di Indonesia ini ternyata tidak sunyi dari kepentingan, dalam hal ini adalah kepentingan politik. Kebetulan ulama tersebut merasa di tempat tersebut dia bisa diakomodasi maka dia bergabung dengan kandidat capres tersebut. Sebagai contoh dapat dikatakan dengan Gerakan 212. Gerakan ini diawali dengan lahirnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pada saat prosesi pilaka DKI sebelumnya. Gerakan 212 ini dipahami punya kepentingan politik, karena gerakan ini diprakarsai oleh GNPF-MUI, sementara Ketua

Umum MUI nya K.H. Ma`ruf Amin sudah nyata-nyata berada di pihak Jokowi, terbukti dia sudah resmi menjadi pasangan Jokowi sebagai calon wakil presiden, namun pengawalnya (GNPF-MUI) masih saja berada di pihak Prabowo, Katimin mengatakan bahwa inilah indikasi mereka itu punya kepentingan politik, semula mereka ingin menggiring K.H. Ma`ruf Amin bersama mereka ke Prabowo, ini yang menjadi target mereka, tetapi mereka tidak berhasil, karena kepentingan politik mereka sudah sejak dari awal ke Prabowo, meskipun K.H. Ma`ruf Amin sudah lepas dan tidak berhasil digaet maka mereka tetap tegar menjadi pendukung Prabowo.[15]

3. Visi misi (Program)

Janji politik nomor urut 2 cukup muluk. Dengan tidak terlalu mempertimbangkan kemampuan negara, suasana politik, dan dinamika indek pasang surut perekonomian negara, kandidat ini memberikan janji kampanyenya yang berpihak secara totak bersama rakyat kecil, orang miskin, warga pribumi, menstikma asing dan aseng, membatasi import dan lain sebagainya, ternyata sungguh menggiurkan dan menarik simpati banyak calon pemilih, dengan hal ini semakin kokohlah keberadaan kelompok ulama eksklusif ini bersamanya.

Prof Nawir mengatakan, Visi misi dan program yang dijual oleh paslon nomor urut 2 terasa kental semangat membumikan Islamnya, dan membela kegiatan-kegiatan keislaman, dan ulama. Selanjutnya tentang program keberpihakan kepada rakyat pribumi yang mayoritas muslin, dan membedakannya dengan asing dan aseng.

Di sisi lain, kelompok ulama moderat ini semakin memperlihatkan kebersamaannya dengan komunitas bangsa secara umum dengan tidak membedakan agamanya sama sekali.

[15] Wawancara dengan Prof. Katimin.

Kebersamaan kelompok ulama moderat ini pun semakin terlihat bersama seluruh lapisan komponen anak bangsa. Akhirnya menguatlah polarsasi tersebut.

4. Janji yang belum terealisasi

Mengingat Jokowi itu adalah capres incumben yang sudah berkuasa hampir satu priode, karena dialah pemenang pada pilpres tahun 2014 yang lalu. Pada saat itu, para pendukung mengnggap ada banyak janji-janji muluk Jokowi yang belum ditunaikan sampai saat ini, di antaraanya tentang kesehatan, pendidikan, dan akses lapangan pekerjaan, seperti maksud kartu-kartu yang senantiasa dijanjikan ke publik, lalu sekarang jaji-jabji itu diumbar kembali ditambah lagi dengan janji-janji baru oleh paslon nomor urut satu sebagai incumben. Karena umat kecewa dengan janji-janji ini, lalu komunitas ini mengkristal dan menggelinding bergulir ke nomor urut 2, dengan demikian menguatlah polarisasi ulama ini.

C. Dampak Pilpres Terhadap Perpecahan Ulama

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terganggu

Sejak dari awal sudah terasa ada kecemasan tentang terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak masih awal prosesi pilpres, Berita CNN Indonesia Senin, 27 Agustus 2018 telah merilis ungkapan Inspektur Jenderal Setyo Wasisto (Kepala Divisi Humas Polri) yang mengatakan acara Deklarasi #2019 Ganti Presiden dapat berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sampai kepada pengumuman pemenang pilpres oleh KPU sudah dibacakan, perang tagar di mesia sosial masih saja berkecamuk, karena kedua kubu sama-sama mengklaim kemenangan. Kedua tagar yang bertarung itu adalah antara #JokoWinElection versus #VictoryForPrabowo.

Tingginya kecemasan akan rusaknya persatuan anak bangsa terlihat pada beberapa indikasi. Iqbal Saputra Zana (Sekjend Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Mulawarman) mengatakan; Tak heran jika di tengah masyarakat telah terjadi perpecahan karena perbedaaan pilihan politik. Pada satu keluarga, terkadang karena perbedaan pilihan politik hubungan persaudaraan menjadi rusak. Misalnya, kejadian di Gorontalo, salah satu makam di pemakaman keluarga diminta untuk pindah hanya karena tidak mendukung calon dari kerabat dekat yang mencalonkan diri pada kegiatan politik. Demikian juga pada perlakuan terhadap seorang karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta menjadi korban pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena berbeda pilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pimpinannya. Aziz Kormala (Pemerhati Sosial Kemasyarakatan) mengatakan; acapkali kita menemukan pertengkaran di dunia maya, demikian juga di dunia nyata hanya karena perbedaan pilihan politik yang didukung. Kegaduhan yang terjadi membuat kita merasa gelisah dan memunculkan pemikiran di dalam benak bahwa negeri ini sudah berada diambang kehancurannya. Kita sangat menyayangkan mengapa persatuan yang kita agung-agungkan bisa sirna sekejap hanya karena pesta demokrasi sekali dalam lima tahun. Hal ini terjadi karena maraknya berita hoax serta adanya politisasi isu SARA, dan juga ulah politisi nakal yang tega memprovokasi umat hanya karena ingin menang. Hal ini sejalan dengan penilaian Susilo Bambang Yudhoyono (presiden Indonesia ke-6), melalui surat yang dibacakan oleh Sekjen Partai Demokrat di Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, dia menyatakan; "Saya mengamati kontestasi dalam Pemilu 2019 ini, utamanya Pilpres, lebih keras dibandingkan dengan Pilpres di era reformasi sebelumnya," Beliau cemas, jika kerusuhan semakin berkembang, lalu keutuhan dan persatuan bangsa akan terancam.

Hari Sanyoto membenarkan adanya kecemasan tersebut. Dia mengatakan; Kita bisa menyaksikan bahwa dalam prosesi

Pemilu 2019 kemarin, perbedaan pandangan sangat tajam, kontestasi juga berlangsung dalam tensi yang cukup tinggi, rivalitas seperti pertentangan tak memiliki batas hingga rakyat terkoyak oleh fanatisme yang berlebihan, panatisme masing-masing pendukung diimplementasikan secara berlebihan. Energi bangsa ikut tersedot percuma lantaran Pemilihan Umum 2019 yang sejatinya merupakan pesta demokrasi, yang terjadi justeru sebaliknya, yaitu menjadi ajang perseteruan yang dihelat lima tahun sekali.

2. Kelompok Ekstrim Mengambil Kesempatan

Tengku Zulkarnain Jened (Pimpinan Pondok Pesanteren Safinatus Salamah, sekaligus sebagai Anggota MPU Propinsi Aceh) mengatakan; bahwa ada kelompok ekstrim yang mencuri kesempatan dalam prosesi pilpres 2019. Ada segelintir kelompok ulama yang masuk, bergabung dan mendukung paslon tertentu, karena ingin menunggangi/ mempengaruhi kandidat tersebut dengan warna religiusitas Islam ekstrim, sehingga kalau kandidat ini nantinya menang dan berkuasa maka mereka berharap bahwa corak Islam yang mereka inginkan secara bertahap akan bisa dimplementasikan di Indonesia ini. Mereka ini menampilkan diri sebagai ulama, sesungguhnya mereka bukan ulama, tetapi adalah ulama-ulama yang mengulamakan dirinya saja, keulamaan mereka itu hanyalah klaim mereka sendiri saja. Sesungguhnya kelompok ini kecil, tapi perlu diwaspadai karena kegigihan dan kelihaian mereka untuk memanfaatkan kesempatan. Kesempatan itu mereka gunakan dengan sebaik-baiknya, karena ada sikap mutualis yang saling memerlukan di antara mereka, mereka ingin mewarnai Indonesia dengan corak keberagamaan mereka di satu sisi, sementara si paslon tersebut pun mengakomodasi mereka karena memperoleh dukungan suara dalam rangka memenangkan pertarungan pilpres yang sungguh sangat sengit tersebut.

3. Ulama Tereliminasi Dari Komunitasnya

    Karena ada kemiripan pertarungan dalam pilpres ini dengan pertarungan pilkada Sumatera Utara kurang dari setahun sebelumnya, maka tereleliminasinya ulama tersebut dari komunitasnya juga sudah diawali pada saat pilkada tersebut. Pada Pilgubsu, orang-orang Muhammadiyah ternyata berpihak pada Edi Rahmayadi, dalam pilpres mendukung Prabowo, maka ulama yang tidak mendukung Unjuk Rasa 212 dan berpihak pada Jokowi pada saat pilpres tersebut dikucilkan dari Muhammadiyah, ada di antara meraka yang jam mengajarnya di UMSU dikurangi, ada yang diberhentikan sebagai khatib dan penceramah pada mesjid tertentu, ada yang tidk diberi kesempatan untuk berceramah pada tempat tertentu, dan lain sebagainya. Dikabarkan, hal ini telah dialami oleh sekirat 40 orang ulama di Sumatera Utara, di antaranya; 1) Miftahul Khair; 2) Agus Riza Koto; 3) Edi Purnomo; 4) Rudi Suntari; 5) Tamrin Munte; 6) Sangkot Saragih; 7) Nasib Selmi; 8) Sangkot Sirait; 9) Iqbal Parinduri; 10) Hayatisna Mph; 11) Harmaini Sitorus; 12) Dr. Adznan Lelo; 13) Marasutan Ritonga; 14) Ust. Al Ghazali Siregar; 15) Ust. Raja Edy S. Ag; 16) Hermanto; 17) Sarwo Edi; 18) Lukmanul Hakim.[16]

4. Ulama Tersandung Hukum

    Untuk hal ini dapat dicontohkan pada beberapa ulama, di antaranya adalah;

    a) Slamet Ma›arif

        (Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212) ditetapkan menjadi tersangka. Polres Surakarta, Jawa Tengah telah melayangkan Surat Penggilan kepada Slamet Ma`arif dengan status tersangka atas dugaan kasus pelanggaran

[16] Angga Putra, (postingan Grup *Whatsapp* yang dibagikan difacebook) dikutip dari https://seword.com/umum/kami-ummat-islam-kami-ummat-islam-lalu-ustadz-miftahul-chair-apa-H1VUQR-GX

pidana Pemilu pada hari Senin tangal 11 Pebruari 2019. Dia dinyatakan tersangka karena melanggar aturan Pasal 280 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dugaan ini dilakukan oleh Slamet Ma`arif dalam acara Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya, di Jalan Slamet Riyadi, depan kantor BCA KCU Solo-Slamet Riyadi, Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, pada Minggu 13 Januari 2019 Pukul 06.30-10.30 WIB. Pihak kepolisian menduga, kalau orasinya pada acara Tabligh Akbar tersebut telah bermuatan kampanye.

b) Ustaz Bachtiar Nasir

Ustaz Bachtiar Nasir juga ditetapkan sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Yayasan Keadilan Untuk Semua (TPPU YKUS) yang ditangani Bareskrim pada 2017, namun baru dipublikasi pada tahun 2018. Polisi menegaskan bahwa ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF MUI ke Turki, padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada akhir 2016. Diduga dana tersebut diselewengkan olehnya.

Secara formil tersandungnya Ustaz Bachtiar Nasir menjadi tersangka tidak memiliki sangkut-paut dengan aktivitas politik pada pilpres 2019, namun ada pihak-pihak yang meragukannya bahwa substansinya adalah dampak dari penyelenggaraan pilpres 2019. Seperti dilansir Detik News, Prabowo mengatakan; Sebenarnya dia telah diperiksa, di sana tidak ada unsur pidana atau kejahatan, sejalan dengan hal tersebut, Prabowo menduga bahwa pemanggilan Ustaz Bachtiar Nasir, dan sejumlah tokoh lainnya adalah

merupakan buntuk dari penyelenggaraan Ijtimak Ulama III yang diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2019 di Hotel Lor In, Sentul, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh banyak pendukung paslon nomor urut 2, dan Prabowo sendiri hadir pada kegiatan ini. Prabowo menganggap ini semua merupakan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh masyarakat.[17]

c) Ustad Haikal Hasan

Ustaz Haikal Hasan juga tersangka karena kasus penyebaran hoaks. Ustad Haikal Hasan (Salah seorang dari anggota tim juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandiaga. Dia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Achmad Firdaus Mainuri pada Kamis (9/5). Meskipun PSI, sebagai partai non-parlemen, namun mereka ini mendukung capres/ cawapres Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019. Menurut sajian Republika, Jumat 10 Mei 2019, Haikal dituduh melakukan penyebaran kabar bohong di media elektronik pada pada tanggal 6 Mei 2019. Hal ini tertuang pada laporan Nomor: LP/B/0447/V/2019/ Bareskrim. Haikal (ustaz pakar sejarah Islam) tersebut tersangka dalam pelanggaran Pasal 28 ayat 2 UU 11/2008 tentang ITE, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dan Pasal 14 ayat 1, serta Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 207 KUH Pidana. Diduga, semua kegiatan ini ada kaitanya dengan prosesi pilpres 2019.

d) Habib Bahar bin Smith

Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka Habib Bahas bin Smith ini berawal dari

[17] https://news.detik.com/berita/d-4541460/prabowo-yakini-bachtiar-nasir-jadi-tersangka-gegara-ijtimak-ulama.

laporan Laode Kamaruddin (Sekjen Jokowi Mania) ke Bareskrim Polri, karena Habib Bahar bin Smith diduga telah melakaukan tindak pidana berupa kejahatan menghina Penguasa di depan umum dengan cara menyampaikan ceramah yang bermuatan ujaran kebencian/ menghina Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor: LP/B/1551/XI/2018/BARESKRIM tanggal 28 November 2018. Dia diduga telah melanggar Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sejalan dengan hal ini, Abdul Kadir Karding (Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional) menyatakan; memang ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memframing perkara Habib Bahar bin Smith tentang adanya upaya kriminalisasi ulama di sana.

e) Dan lain-lain.

5. Ulama Kabur ke Luar Negeri

Habib Riziq membantah kepergiannya untuk memunaikan umroh sebagai kabur atau melarikan diri ke luar negeri. Saat ulang tahun (*milad*) FPI yang ke-19, Lewat rekaman suara Rizieq Shihab yang diperdengarkan di Stadion Kamal, Petamburan Jakarta, Dia menyinggung soal alasan pemberangkatannya dari Indonesia adalah sebagai hijrah. Dalam ungkapannya, dia menyebut; "Ingat, hijrah bukan sembunyi, hijrah juga bukan lari. Tapi, hijrah untuk lindungi diri, hijrah untuk selamatkan negeri, dan hijrah untuk atur strategi," Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai kabur atau melarikan diri ke luar negeri, tetapi dia telah memperdengarkan tujuan pemberangkatannya tersebut sebagai hijrah.

Keberangkatan Habib Riziq ke Arab Saudi adalah dalam rangka menunaikan Umroh, tetapi tak kunjung pulang sampai saat

ini. Masih segar dalam ingatan kita tentang tujuan Habib Riziq bin Hussein Shihab (HRS) ke Arab Saudi seperti dipredengarkan pada tanggal 26 April 2017 adalah untuk beribadah melaksanakan umrah bersama keluarga, dalam rangka membayar nazar atas kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI 2017 lalu. Juru bicara FPI saat itu, Slamet Ma'arif dalam keterangan persnya pada 29 April 2017 mengatakan tujuan HRS ke KSA adalah untuk beribadah sebagai wujud syukur atas kemenangan ummat Islam. Slamet menambahkan kepergian HRS cuma seminggu saja. "Beliau sedang umrah, rencananya Rabu (3/5) pekan depan sudah tiba di Indonesia," ujarnya sebagaimana dikutip dari Republika. Sejak kepergiannya ke Arab Saudi, berbagai persoalan kontroversial menghunjam dirinya, akhirnya dia bertahan di sana, dan tak pernah lagi puang sampai saat ini.[18]

Penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute merilis 3 (tiga) pembuktian tentang keikutsertaan FPI dalam berbagai kerusuhan, yaitu; 1). konflik antar agama yang terjadi di Maluku dan Poso, 2). Proyeksi positivisasi syariat Islam pada beberapa daerah di Indonesia (Prosesi Perda syari`at), dan 3). Penyerangan terhadap prilaku melanggar syari`at, seperti; Penyerangan terhadap pengikut aliran sesat, mensponsopri gerakan anti kristenisasi, dan gerakan anti maksiat yang sudah berlangsung secara masif di seluruh daerah Indonesia. Untuk keterlibatan mereka pada konflik antar agama yang terjadi di Maluku dan Poso, maka konflik itu telah mengubah cara pandang keagamaan dan ketegangan masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan pada beberapa daerah telah muncul sentimen keagamaan terhadap pemeluk agama lain karena dengan melihat tayangan yang ada di TV, internet, dan media cetak dalam mempublikasikan konflik di Maluku dan Poso tersebut. Laskar-laskar pun mereka kirim ke

[18] https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/5d2603f60d82305cdd4ac293/rizieq-cerdik-paksa-pemerintah-terimanya-kembali

lokasi konflik, sehinga wujud pembelaan diri umat Islam di satu sisi, dan membantu umat Islam yang sedang diserang di sisi lain menjadi dapat diimplementasikan.[19]

[19] Fakultas Ushuludidn dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, …, hlm.95.

DAFTAR PUSTAKA

`Izzuddin, *al-Tahbir li Idhah Ma`ani al-Taisir*, (Riyad mamlakah al-`Arabiyah al-Syu`udiyah: 1433 H./ 2012 M., Maktabah al-Rusydi, cet. Ke-1, juz.3).

Abdul Muhsin ibn Hamdi, Qothfu al-Jani al-Dani Syarah Muqaddimah, (Riyadh: 2002 M./ 1423 H.,Dar al-Fadhilah al-Mamlakah al-Su`udiyah, Cet. Ke-1).

Abdul Rauf al-Manawi, *Al-Taisir bi Syarah al-Jami`u al-Shagir*, Juz.2.

Abu al-Fadhil, Ikmal al-Muklim bi Fawaid al-Muslim, (1419 H./ 1998 M., Daar al-Wafa li al-Thaba`ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi`, Cet. Ke-1, Juz.6).

Adat Sudrajat, 2002. *Agama dan Perilaku Politik*, dalam *Jurnal Humanika,* No. 1, Tahun 1, 2002.

Ahmad bin Abdurrahman, *al-Fath al-Rabbani li Tartibi Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Ttp., Dar Ihya al-Turats al-`Arabi, cet.ke-2, juz.19).

Al-Baghdadi al-Hambali, *Taisir al-Wushul ila Qaid al-Ushul wa Ma`aqid al-Fushul*, (Ttp.:Tt., Jami`ah Muhammad ibn Su`ud, Cet. Ke-2, Juz.1)

Al-Maqdisi al-Ramli al-Syafi`I, *Syarah Sunan Abi Dawud*, (Mesir:1437 H./ 2016 M., cet. Ke-1, Juz.12)

Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj*, (Beirut: 1392 H., Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi, cet.-2, juz.7).

Al-Qahthani, *`Aqidah Muslim fi Dhu`i al-Kitab wa al-Sunnah*, (Riyad: tt., Maba`ah Sufair, Juz.1)

Al-Qurtubi, *al-Mufham lima Askala min Talkhis Kitab Muslim*, (Beirut: 1417 H./ 1996 M., Dar Ibn Katsir, cet. Ke-1, juz.7)

Al-Qusyairi, *Ihkam al-ahkam Syarah `Umdat al-akam*, (Madinah: 1426 H./ 2005 M., Maktabah al-Madinah al-Rokmiah, cet. Ke-1, jus 1).

Al-Sa`ati, *al-Fatah al-Ribani litartibi Musnal al-Ima Ahmad ibn Hnabal*, (Dar Ihya`I al-Turats al-`Arabi, cet. Ke-2, juz.24).

Al-Suyuthi, *Dur al-Mantsur fi al-Ta`wil bi al-Ma`tsur*, jus.3.

Al-Thabari, *Jami`u al-Bayan fi Ta`wil al-Qur`an*, (Ttp.: 1420 H./ 2000 M., Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-1, Juz.6).

Arfriani Maifizar, Kamaruddin M. Said & Rahimah Embong, 2017. *Peranan Ulama dan Umara dalam Memartabatkan Syariat Islam di Aceh, (Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization),* Rahimah Embong, dkk. (eds.), Research Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), ISBN 978-967-0899-70-1

Ari Ganjar Herdiansah, Junaidi, dan Heni Ismiati, 2017. *Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional* dalam Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 – 9185, Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 61 – 73, , DOI: 10.24198/jwp.v2i1.11480

Asip F. Hadipranata & Sudardjo, 1999. *Pengaruhi Pembentukan Kelompok (Team Building) Terhadap Etos Kerja dan Kontribusinya bagi Produktifitas Kerja Insasi,* Universitas Gadjah Mada, dalam *Jurnal Psikologi* 1999, No. 1, 18-28, ISSN : 0215 – 8884

Departemen Agama RI., Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Sewmarang: 1989, Edisi Baru, Revisi Terjemah 1989)

Hamidi. 2004. *Metode* Penelitian *Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan. Proposal dan Laporan* Penelitian. Malang: UMM Press.

Herdiansyah, Haris, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika Dimensi.

IAIN Salatiga, *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, (Salatiga: 2016, Vol.1, Nomor 1, Juni, 2016), hlm.123.

Ibn al-Milqan, *al-Taudhih li Syarah al-Jami`u al-Shahih*, (Damsik: 1429 H./ 2008 M., Dar al-Nawadhir, cet. Ke-1, juz.6).

Ibn Baththal, *Syarah Shahih al-Bukhari*, (1423 H./ 2003 M., Maktabah al-Rusydi, Cet. Ke-2, Juz.8)

Ibn Baththal, *Syarah Shahih al-Bukhari*, (Riyad: 1423 H./ 2003 M., Maktab al-Rusydi, cet. Ke-2, juz.6).

Ibn Katsir, Tafsir Alqur`an al-`Azim, (1420 H./ 1999 M., Dar al-Thoybah li al-Nasyar wa al-Tauzi`, Cet. Ke-2, juz.2.

Ibn Katsir*, Tafsir Alqur`an al-`Azim*,(Ttp.: 1420 H./ 1990 M., Dar Tayibah li al-Nasyar wa al-Tauzi`, Cet. Ke-2, Juz.2)

Ibn Taimiyah, *al-Khulashah fi Bayani Ra`yu Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah bi al-Rawafidh,* (Ttp., tt., Juz.1)

Ivan Muhammad Agung, *Dinamika Kelompok Perspektif Psikologi Sosial,* hlm. 13, dalam Mirra, dkk., 2013. *Psikologi Social* Pekanbaru:Al-Mujahadah Press.

J E Hosio, *Kebijakan Publik & Desentralisasi,* Yogyakarta: Laksbang, 2007.

Joko Subagyo, P. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek),* Jakarta: Rineka Cipta.

Kementerian Agama RI., *Perkembangan Paham Keagamaan Trans Nasional di Indonesia*, Ahmad Syafi'i Mufid (Editor), (Jakarta: 2011, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., Cet. Ke-1)

Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja. Rosdakarya.

M. Quraish Shihab, 2004. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Jakarta: Lentera Hati.

M. Sam ichwan dkk. 2019, *Keputusan Ijtima› Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia* III Tahun 2009.39 (salinan fatwa), dalam Majlis Ulama Indonesia (MUI) 2009. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975,* Jakarta: Erlangga, hlm. 867, 2009

Mahir Yasin al-Fahli, *al-Muntakhof min Shahih al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Ambar: 1427 H./2006 M., Jami`ah al-Ambar, Juz.1).

Marhaeni Fajar, 2009. *Ilmu Komunikasi:Teori & Praktik,* Universitas Mercu Buana, hlm. 68, mengutip Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi,*

Martono Ajak Pendukung Djoss Salat Subuh Berjamaah Sebelum Mencoblos. Medan Tribun News, Selasa, 12 Juni 2018.

Mirra, dkk., 2013. *Psikologi Social* Pekanbaru:Al-Mujahadah Press.

Muhamad ibn Futuh al-Hamidi, *al-Jam`u Baina al-Shahihain*, (Beirut: 1423 H,. 2002 M., Dar al-Nasyar, Cet. Ke-2, Juz.1)

Muhammad Amin bin Abdullah al-Army, al-Kaukab al-Wahhab wa al-Raud al-Bahhaj fi Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj, (Makkah al-Mukarromah: 1430 H./ 2009 M., Dar al-Minhaj, Cet. Ke-1, Juz. 24).

Muhammad bin Ali, *Masyarik al-Anwar al-Wahhajah wa Mathali` al-Asrar al-Bahajah fi Syarah Sunan al-Imam ibn Majah*, (Riyad: 1427 H./ 2006 M., Dar al-Mughni, Cet. Ke-1, Juz.2)

Muhammad bin Ismail bin Shalah, *al-Tanwir Syarah al-Jami`u al-Shaghir*, (Riyad: 1432 H./ 2011 M., Maktabah Dar al-Salam, Cet. Ke-1, Juz.4).

Mukhlis, 2015. *Perilaku Politik Elit Keagamaan dalam Politik Lokal* , dalam SALAM, Volume 18 No. 1, Malang, Juni 2015

Nana Syaodih Sukmadinata, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Remaja Rosdakarya

Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad, Islam, Militan, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru. (Jakarta: 2008, Pustaka LP3ES Indonesia dan KITLV-Jakarta)

Nurlatipah Nasir, 2015. *Kyiai dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015.*

Riyanto, 2015. *Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ri Tahun 2014 Di Kabupaten Demak*, *Addin,* Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

Robert A. Dahl, 1992. *Demokrasi dan Para pengkritiknya,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rubyanti, Rika. 2009. *Pengaruh Popularitas Terhadap Pilihan Pemilih Pemula.* Skripsi pada Universitas Sumatera Utara, Tidak Diterbitkan,

Sahid Gatara, 2008. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia

Said Muhammad, *Sejarah, Ideologi Islam dan Kuasa,* dalam Islam Kepulauan, id., 16 Mei, 2019.

Siti Zubaidah, 2013. *Hubungan Komunikasi Kelompok terhadap Tradisi Hidup Sehat pada Masyarakat Bantaran Sungai Karang Mumus Samarinda Ilir* dalam eJournal llmu Komunikasi, 2013, 1 (3) 465-479, ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id.

Soemarwoto, Otto, 1998*, Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan,* Jakarta: Djambatan

Sugiyono, P., 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabta.

Suharno dan Ana Retnoningsih, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Suparman Syukur, pada Fakultas Ushuludidn dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Jurnal Theologia, (Semarang: 2017, Volume 23, Nomor 1, Januari 2012).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka

UIN Syarif Hidayatullah, *Studia Islamika*, (Jakarta: 2007, Vol. 14, No. 2, 2007).

Umirul Aziz, 2009, *Polarisasi Keberagamaan Masyarakat Ginandong Karanggayam Kebumen*, Fakultas Adab, UNY, Yogyakarta. Hlm.23 mengutip *Kamus Besar Bahasa Indonesi,* 2008. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Uzair Suhaimi, *Focus Group Discussion (FGD), Panduan Bagi Peneliti Studi Kualitatif, Studi Dampak Sosial Krisis Moneter,* kerjasama BPS-ADB, 1999.

Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, (Bogor: 2009, Pustaka At-Taqwa)